



UNIVERSITAS INDONESIA

***PRESTIGE SEBAGAI PENDORONG PENGEMBANGAN MEDIUM BATTLE
TANK HARIMAU INDONESIA-TURKI***

Tesis

FEBRY TRIANTAMA

(1906333036)

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
DEPOK
2021**



UNIVERSITAS INDONESIA

***PRESTIGE SEBAGAI PENDORONG PENGEMBANGAN MEDIUM BATTLE
TANK HARIMAU INDONESIA-TURKI***

Tesis

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si)
pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

FEBRY TRIANTAMA

(1906333036)

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

DEPOK

JULI 2021

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakam dengan benar.**

Nama : Febry Triantama
NPM : 1906333036
Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Febry', written on a light gray background.

Tanggal : 7 Juli 2021

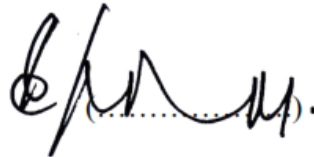
HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Febry Triantama
NPM : 1906333036
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Tesis : *Prestige Sebagai Pendorong Pengembangan Medium Battle Tank* Harimau Indonesia – Turki

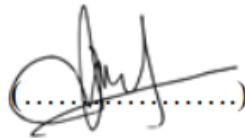
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Edy Prasetyono Ph,D



Penguji Ahli : Dr. I Nyoman Sudira



Ketua Sidang : Broto Wardoyo, Ph.D



Sekretaris Sidang : Arivia Tri Dara Yuliestiana, M.Si



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Juli 2021

KATA PENGANTAR

Sistem internasional dikenal memiliki sifat anarki sehingga setiap negara hanya dapat mempercayakan keamanan dan survivabilitasnya pada diri mereka sendiri. Oleh karena itu negara-negara akan terus menerus meningkatkan akumulasi *power* yang dimiliki yang salah satunya dilakukan melalui akuisisi alutsista. Guna memenuhi kebutuhan alutsista, negara dapat memilih untuk melakukan pengembangan alutsista oleh industri pertahanan nasionalnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan menghindari ketergantungan terhadap negara lain sebagai produsen senjata karena rentan akan diembargo.

Indonesia sebagai negara yang pernah menjadi korban embargo turut menerapkan strategi pengembangan alutsista oleh industri pertahanan nasional. Salah satunya adalah dalam pengembangan *medium battle tank* Harimau bekerjasama dengan Turki. Pengembangan *medium battle tank* ini dimulai pada tahun 2014 dan berhasil memperoleh Sertifikat Tipe pada tahun 2019. Namun keputusan melakukan pengembangan *medium battle tank* Harimau menghadirkan anomali. Pertama, karakter *medium battle tank* kurang cocok dengan karakter ancaman nyata yang dihadapi Indonesia, yakni ancaman non-tradisional serta isu Laut China Selatan. Kedua, *medium battle tank* Harimau masih bergantung pada komponen impor yang mengakibatkan kurang optimalnya daya gentar yang dihasilkan.

Berkaca dari fakta empiris tersebut, penulis tergugah untuk meneliti secara lebih lanjut mengapa Indonesia memutuskan untuk mengembangkan *medium battle tank* Harimau. Di samping itu, tesis ini juga ditulis untuk menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Penulis berharap temuan dalam tesis ini mampu menambah wawasan pada kajian terkait pengembangan industri pertahanan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada tesis ini, oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Depok, 7 Juli 2021

Febry Triantama

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur hanya bagi Allah S.W.T. atas segala nikmat, berkah, rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam untuk Rasulullah Muhammad S.A.W dan keluarga serta sahabat atas contoh dari semangat keikhlasan dalam menyebarkan perintah-Nya. Penulis menyadari tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penyelesaian tesis ini akan sulit tercapai. Maka dalam kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Papa dan Almarhumah Mama yang selalu mendoakan kelancaran dan keberhasilan studi saya serta memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan seluruh proses perkuliahan dan penelitian hingga akhir.
2. Abang dan Kakak penulis, Terimakasih atas segala dukungan dan masukan yang telah diberikan.
3. Edy Prasetyono, Ph.D, selaku dosen pembimbing tesis penulis yang telah bersedia menyediakan dan membagikan waktu, tenaga, serta ilmu beliau untuk membimbing penulis bahkan semenjak penyusunan draft proposal tesis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Narasumber-narasumber penelitian penulis, yaitu Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan selaku Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan 2018 – 2020, Andi Widjajanto, Ph.D dan Iis Gindarsah M.Sc selaku Analis Utama Politik Keamanan Laboratorium Indonesia 2045, Dimas Aryo Pratomo selaku Assistant Manager Pemasaran Hankam PT. Pindad dan Mayor Kav. Adzan Mardjohan Nasution SH. MH selaku Kasilitbangmatsus dan Kudmil Pussenkav Kodiklat AD. yang telah meluangkan waktu, ilmu dan pengalamannya untuk memperkaya perspektif dan data penelitian ini.
5. Broto Wardoyo, Ph.D., selaku Kepala Program Pascasarjana dan Arivia Tri Dara Yuliestiana selaku Sekretaris Program Pascasarjana, Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

6. Dr. I Nyoman Sudira, selaku penguji ahli tesis ini. Terima kasih untuk segala ilmu dan saran yang diberikan kepada penulis agar tesis ini bisa semakin baik. Terima kasih juga untuk apresiasi yang diberikan kepada penulis dalam siding.
7. Dr. Phil. Yandry Kurniawan, selaku pengampu mata kuliah Dinamika Keamanan Internasional dan Seminar Keamanan Internasional yang telah banyak memberikan saran dan membantu penulis dalam membuat karya tulis dan proposal tesis yang baik.
8. Seluruh pengajar Program Pascasarjana Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia atas segala pengetahuan, ilmu dan pengalaman yang diberikan semasa studi penulis.
9. Seluruh staf administrasi Program Pascasarjana Departemen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia atas segala bantuan dan arahan dalam setiap urusan administrasi yang penulis lakukan.
10. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) selaku pemberi beasiswa kepada penulis
11. Dr. Fatchiah Kertamuda selaku wakil rektor bidang kemahasiswaan Universitas Paramadina, Dr Tatok D. Sudiarto dan Djayadi Hanan, Ph.D selaku ketua program studi dan dosen program studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Paramadina karena telah memberikan rekomendasi bagi penulis dalam seleksi beasiswa LPDP Kementerian Keuangan.
12. Teman-teman S2 HI angkatan 2019 dan Squad Galau yang telah menjadi teman diskusi dan memberikan dukungan selama proses perkuliahan maupun penulisan tesis ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Besar harapan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Depok, 7 Juli 2021

Febry Triantama

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febry Triantama
NPM : 1906333036
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Rights)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

***“Prestige Sebagai Pendorong Pengembangan
Medium Battle Tank Harimau Indonesia – Turki”***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 7 Juli 2021

Yang menyatakan



Febry Triantama

ABSTRAK

Nama : Febry Triantama
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul: : *Prestige* Sebagai Pendorong Pengembangan *Medium Battle Tank* Harimau Indonesia – Turki
Pembimbing : Edy Prasetyono Ph.D

Kajian ini menganalisis alasan Indonesia melakukan pengembangan *medium battle tank* Harimau yang bekerjasama dengan Turki. Keputusan Indonesia melakukan pengembangan *medium battle tank* Harimau memiliki beberapa anomali. Anomali tersebut adalah ketidaksesuaian karakter ancaman dominan yang dihadapi Indonesia dengan karakter *medium battle tank* Harimau. Kedua, *medium battle tank* Harimau tidak menghadirkan efek gentar yang optimal mengingat tidak adanya keunggulan teknologi dari *medium battle tank* Harimau. Dengan menggunakan konsep *techno-nationalist impulse* dan metode penelitian *causal-process tracing*, kajian ini menunjukkan bahwa komponen dalam konsep menjadi alasan Indonesia melakukan pengembangan *medium battle tank* Harimau. Komponen tersebut adalah ambisi meningkatkan *prestige* dan status sebagai negara kekuatan utama di kawasan dan menjadi negara mandiri (*pursuit of power*), ambisi memperoleh keuntungan ekonomi dan memperoleh *prestige* sebagai negara maju dan memiliki kedigdayaan teknologi (*pursuit of wealth and technological prowess*) serta ambisi Pemerintah untuk meningkatkan *prestige* dari masyarakat di level domestik untuk kepentingan elektoral (*pursuit of domestic prestige*). Analisis kajian ini menunjukkan bahwa keputusan Indonesia melakukan pengembangan *medium battle tank* Harimau didorong oleh ambisi Indonesia meningkatkan *prestige* dan memperoleh status sebagai negara kekuatan utama di kawasan Asia Tenggara serta terbebas dari pengaruh negara produsen senjata, memperoleh keuntungan ekonomi sekaligus menunjukkan kemajuan industri dan kedigdayaan teknologi. Selain itu keberhasilan pengembangan *medium battle tank* Harimau juga digunakan pemerintah atau politisi untuk memperoleh *prestige* dan dukungan dari publik domestik.

Kata kunci: Pengembangan Alutsista, Pengembangan *medium battle tank* Harimau, *techno-nationalist impulse*

ABSTRACT

Name : Febry Triantama
Study Program : International Relations
Title: : Prestige as an Impetus for the Development of the
Indonesian-Turkish Harimau Medium Battle Tank
Counsellor : Edy Prasetyono, Ph.D

This study analyzes Indonesia's reason for developing Harimau medium battle tanks in cooperation with Turkey. Indonesia's decision to develop a Harimau medium battle tank has several anomalies. First, the anomaly is a mismatch of the dominant threat character faced by Indonesia with the character of the Harimau medium battle tank. Second, Harimau medium battle tank does not present an optimal fear effect considering the absence of technological advantages of the Harimau medium battle tank. Using the concept of technonationalist impulse and causal-process tracing research method, this study shows that the components in the concept are the reason Indonesia is developing Harimau medium battle tank. These components are the ambition to increase prestige and status as the main power country in the region and become an independent country (pursuit of power), ambition to gain economic benefits and gain prestige as a developed country and have the power of technology (pursuit of wealth and technological prowess) and the Government's ambition to increase the prestige of society at the domestic level for the sake of electoral (pursuit of domestic prestige). The analysis of this study shows that Indonesia's decision to develop Harimau medium battle tank is driven by Indonesia's ambitions to increase the prestige, to gain status as a major power country in Southeast Asia, to be free from the influence of weapons producing countries, and to gain economic benefits while demonstrating industrial and technological prowess. In addition, the successful development of Harimau medium battle tanks is also used by the Government or politicians to obtain prestige and support from the domestic public.

Keywords: Arms Development, Harimau Medium Battle Tank Development, Technonationalist Impulse

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv

PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	6
1.4. Tinjauan Kepustakaan.....	7
1.4.1 Perspektif Pertahanan.....	8
1.4.2. Perspektif Ekonomi Politik	9
1.4.3. Perspektif Politik Domestik dan Birokrasi	11
1.4.4. Sintesis	12
1.5. Kerangka Analisis: Konsep <i>Techno-nationalist Impulse</i>	13
1.6 Asumsi Penelitian.....	21
1.7 Metode Penelitian.....	22
1.8 Sistematika Penulisan.....	24
2. PENGEMBANGAN <i>MEDIUM BATTLE TANK</i> HARIMAU INDONESIA - TURKI	26
2.1 Lingkungan Strategis, Penilaian Ancaman dan Postur Pertahanan Indonesia	26
2.1.1 Lingkungan Strategis dan Penilaian Ancaman Indonesia	26
2.1.2 Postur Pertahanan Indonesia	28
2.1.3 Program Kekuatan Pokok Minimum.....	31

2.2 Visi Kemandirian Pertahanan dan Industri Pertahanan Indonesia	35
2.2.1 Visi Kemandirian Pertahanan Indonesia	35
2.2.2 Industri Pertahanan Indonesia	37
2.2.3 Pembentukan KKIP dan Kelahiran Undang-Undang Industri Pertahanan.....	40
2.2.4 Kerja sama Internasional Industri Pertahanan Indonesia	42
2.3 Kerja sama Pengembangan Medium Battle Tank Harimau	44
2.3.1 Kerja sama Industri Pertahanan Indonesia – Turki	44
2.3.2 Kerja sama Pengembangan Medium Battle Tank Harimau	48
3. PRESTIGE SEBAGAI PENDORONG PENGEMBANGAN MEDIUM BATTLE TANK HARIMAU	58
3.1 <i>Pursuit of Power</i> (Ambisi Indonesia Menjadi Negara Kekuatan Utama Kawasan dan Negara Mandiri).....	58
3.1.1 Memori Kolektif dan <i>Distrust</i> Terhadap Negara <i>Great Powers</i>	60
3.1.2 Lingkungan Strategis Eksternal Indonesia	66
3.1.3. Peningkatan Kapabilitas Militer Indonesia	75
3.1.4 Keberhasilan Industri Pertahanan Nasional	82
3.2 Ambisi Memperoleh Keuntungan Ekonomi dan Kedigdayaan Ekonomi - Teknologi	88
3.2.1 <i>Spin-off</i> Dari Pengembangan Medium Battle Tank Harimau.....	89
3.2.2 Ekspor Industri Pertahanan Indonesia dan Potensi Medium Battle Tank Harimau	91
3.2.3 Intervensi Pemerintah dan Ambisi Industri Pertahanan Berkelas Dunia	97
3.2.4 Produsen Tank Pertama di Asia Tenggara	105
3.3 <i>Pursuit of Domestic Prestige</i> (Ambisi Memperoleh Kewibawaan Domestik).....	109
3.3.1. Klaim Keberhasilan Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono	109
3.3.2. Janji Kampanye dan Klaim Keberhasilan Kepemimpinan Presiden Joko Widodo.....	110
3.3.3. Harapan Publik Terhadap Kemandirian Pertahanan	114
4. PENUTUP	116
4.1. Simpulan	116
4.2. Rekomendasi	124
4.2.1 Rekomendasi Kebijakan.....	124
4.2.2. Rekomendasi Akademis	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN	153

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Alutsista TNI Angkatan Udara 2020	30
Tabel 2.2 Alutsista TNI Angkatan Laut 2020	31
Tabel 2.3 Alutsista TNI Angkatan Darat 2020	31
Tabel 3.1 Ekspor Senjata Negara Asia Tenggara 2009 – 2019	95
Tabel 3.2 Intervensi Pemerintah Terhadap Industri Pertahanan Nasional Berdasarkan UU Industri Pertahanan	99
Tabel 3.3 Daftar Negara Produsen tank dan Model Pengembangannya	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Visualisasi Kerangka Analisis <i>Techno-nationalist Impulse</i>	19
Gambar 1.2 Model Analisis Pengembangan <i>medium battle tank</i> Harimau.....	20
Gambar 2.1 Rencana Induk Pengembangan Industri Pertahanan.....	37
Gambar 2.2 Permintaan Spesifikasi Teknis <i>Medium Battle Tank</i>	50
Gambar 2.3 <i>Preliminary Design Medium Battle Tank</i> Harimau	51
Gambar 2.4 <i>Medium Battle Tank</i> Harimau.....	56
Gambar 2.5 Tahap Pengembangan <i>Medium Battle Tank</i> Harimau	57
Gambar 2.6 Rangkuman Lini Masa Pengembangan <i>Medium Battle Tank</i> Harimau.....	58
Gambar 4.1 Kesimpulan Analisis Pengembangan <i>Medium Battle Tank</i> Harimau.....	123

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Anggaran Pertahanan Indonesia 2009 – 2020.....	34
Grafik 3.1 CASI Index Alutsista TNI AD 2012	65
Grafik 3.2 Anggaran Pertahanan China 2009 – 2018.....	67
Grafik 3.3 Nilai Ekspor Kendaraan Tempur dan Komponennya	94

DAFTAR SINGKATAN

ACW	: Artillerie Constructie Winkel
ADMM	: ASEAN Defense Ministerial Meeting / Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN
Alutsista	: Alat Utama Sistem Persenjataan
Alpanhankam	: Alatan Peralatan Pertahanan Keamanan
Bakamla	: Badan Keamanan Laut
BPIS	: Badan Pengelola Industri Strategis
BMS	: Battlefield Management System
CASI	: Concentration of Arms Supplier Indicator / Indikator Tingkat Konsentrasi Penyedia Senjata
CMS	: Combat Management System
CPT	: <i>Causal Process Tracing</i>
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DI	: Dirgantara Indonesia
GNB	: Gerakan Non Blok
HDGP	: High Drags General Purpose
ICBM	: Intercontinental Ballistic Missile
IDEF	: International Defence Industry Fair
IFV	: Infantry Fighting Vehicles
IPTN	: Industri Pesawat Terbang Nurtanio
Keppres	: Keputusan Presiden
KKIP	: Komite Kebijakan Industri Pertahanan
Konatal	: Komando Penataran Angkatan Laut
KMB	: Konferensi Meja Bundar
Kogabwilhan	: Komando Gabungan Wilayah Pertahanan
Kostrad	: Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat

KPM	: Kekuatan Pokok Minimum
Lapip	: Lembaga Persiapan Industri Penerbangan
Litbang	: Penelitian dan Pengembangan
LPEI	: Lembaga Pengelolaan Ekspor Impor
MBT	: Main Battle Tank / Tank Tempur Utama
ME	: Marine Establishment
MoU	: Memorandum of Understanding
NIA	: National Interest Account
Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Perum	: Perusahaan Umum
PKR	: Perusak Kawal Rudal
PP	: Peraturan Pemerintah
PSM	: Pabrik Senjata dan Mesiu
RCWS	: Remote Controll Weapon System
Renstra	: Rencana Strategis
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDR	: Strategic Defense Review
SESKOAD	: Sekolah Staf Komando Angkatan Darat
SIPRI	: Stockholm International Peace Research Institute
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TNI AD	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TNI AL	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TNI AU	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
ToT	: Trasnfer of Technology
UAV	: Unmaned Aerial Vehicles
UU	: Undang-Undang

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Power merupakan salah satu komponen penting dalam sistem internasional yang menurut paradigma neorealis bersifat anarki. Didalam sistem internasional yang anarki, setiap negara hanya dapat mempercayakan keamanan dan survivabilitasnya pada diri mereka sendiri. Kapasitas *power* yang dimiliki oleh suatu negara menjadi penentu keamanan dan survivabilitasnya. Oleh karena itu setiap negara didalam sistem internasional akan menjalankan satu pola perilaku, yakni *struggle for power*. John J Mearsheimer menyatakan bahwa perilaku *struggle for power* negara-negara akan terus terjadi. Menurut Mearsheimer hal ini disebabkan negara-negara merupakan unit yang berada dalam *uncertainty* dan memiliki sifat *maximizing power*. Negara akan terus menerus meningkatkan kepemilikan mereka atas *power* tersebut demi berada pada posisi yang dominan jika dibandingkan dengan Negara lain. Negara-negara akan berupaya untuk meningkatkan kapasitas *power* yang dimiliki (Mearsheimer, 2001).

Kapasitas *power* yang dimiliki oleh suatu negara dapat dilihat melalui berbagai indikator. Jika merujuk pada pernyataan Kenneth Waltz, kapasitas *power* suatu negara dapat terlihat melalui kekayaan sumber daya alam, populasi, luas wilayah, stabilitas politik serta kapabilitas militer (Waltz, 2001). Sebagai salah satu indikator kapasitas *power* suatu negara, kekuatan militer menjadi salah satu yang cukup mendapat perhatian. Setiap tahun berbagai negara memilih melakukan akuisisi sistem persenjataan baru untuk memperkuat militernya.

Namun upaya negara-negara meningkatkan kapasitas *power*-nya dengan melakukan akuisisi sistem persenjataan impor menurut beberapa ahli justru dapat membahayakan keamanan serta independensi negara. Hal ini dikarenakan negara yang terlalu bergantung kepada sistem persenjataan yang di produksi negara lain memiliki potensi terjebak didalam pengaruh negara produsen senjata (Bitzinger, 2017; Krause, 1991; Neuman, 2010). Negara-negara produsen senjata kerap kali memanfaatkan status mereka tersebut guna mencapai kepentingan nasional maupun motif tertentu demi keuntungan negara tersebut (Bitzinger,

2015b). Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa strategi seperti ancaman embargo, hingga larangan penggunaan senjata yang telah dibeli oleh suatu negara (Bitzinger, 2015b, 2017; Neuman, 2010; Rosh, 1990). Negara produsen senjata juga memanfaatkan status mereka guna menekan negara lain dalam isu demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Bitzinger, 2013; Neuman, 2010).

Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang menjadi korban dari embargo senjata. Embargo yang diterima Indonesia berasal dari Amerika Serikat serta Uni Eropa. Embargo yang dilakukan Amerika Serikat dan Uni Eropa dilandasi oleh anggapan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh Pemerintah Indonesia di Timur-timur. Indonesia dinilai telah melakukan tindakan *oppressive* kepada rakyat timur-timur yang ingin memisahkan diri dari Indonesia (SIPRI, 2012). Sanksi embargo yang diberikan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa mengakibatkan Indonesia tidak bisa memanfaatkan kekuatan yang dimiliki secara optimal. Ketika itu Indonesia tidak bisa menggelar pesawat tempur F-16 karena tidak bisa melakukan penggantian suku cadang karena adanya larangan menjual ke Indonesia (Anggi & Resty, 2016). Sebagai akibat dari embargo dan pembatasan-pembatasan yang diberlakukan, Indonesia juga tidak diperkenankan melakukan gelar alutsista yang dapat digunakan untuk berhadapan dengan masyarakat sipil di Timur-timur (Firmansyah, 2018).

Hadirnya potensi kerugian yang diakibatkan ketergantungan terhadap negara produsen senjata menyebabkan berbagai negara mencoba untuk mencapai kemandirian pertahanan (*autarky*). Negara-negara yang terdapat di kawasan Asia seperti Jepang, China, India dan Indonesia merupakan contoh negara yang memiliki visi mencapai kemandirian pertahanan (Bitzinger, 2017). Visi Jepang untuk mencapai kemandirian pertahanan bahkan telah ada sejak restorasi Meiji terjadi (Bitzinger, 2015a, 2017). Sedangkan bagi India, Visi kemandirian pertahanan sudah bermula pada periode awal kemerdekaan. Ketika itu Perdana Menteri India yang pertama, Jawaharlal Nehru menyatakan bahwa tidak ada pilihan lain bagi India yang merdeka dan memilih untuk terlibat dalam Gerakan Non Blok (GNB) selain mandiri dalam aspek pertahanan (Mohanty, 2004).

Indonesia sebagai negara yang pernah menjadi korban dari pemberlakuan embargo oleh Amerika Serikat serta Uni Eropa di masa lalu tidak ingin hal tersebut terulang. Terlebih

lagi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sedang berupaya untuk melakukan modernisasi alutsista Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui program kekuatan pokok minimum (KPM). Sebagaimana diketahui kekuatan TNI tidak dalam kesiapan operasional 100% (Widjanto et al., 2012). Alutsista yang dimiliki oleh TNI juga masih didominasi oleh Alutsista yang berusia lebih dari 20 tahun (Laksana, 2018). Urgensi untuk melakukan modernisasi persenjataan dan pemenuhan KPM juga dilandasi ancaman-ancaman yang harus dihayati. Agresifitas China di Laut China Selatan serta berbagai ancaman non-tradisional membutuhkan kesiapan operasional TNI pada posisi 100%.

Oleh karena sedang berupaya melakukan modernisasi alutsista serta dibarengi dengan pengalaman pahit menjadi korban embargo senjata, hal tersebut semakin menguatkan visi kemandirian pertahanan Indonesia. Visi Kemandirian Pertahanan Indonesia ini dapat terlihat dalam beberapa kesempatan. Sebagai contohnya adalah ketika Presiden Yudhyono menyatakan bahwa Indonesia harus mencapai kemandirian dalam segala bidang termasuk pertahanan. Presiden Yudhyono menyatakan bahwa upaya pemenuhan KPM tidak serta merta dengan membeli alutsista produk negara lain. Pemenuhan KPM TNI wajib menggunakan produk dalam negeri (Detik.com, 2009). Pembelian senjata yang berasal dari negara lain masih dimungkinkan sepanjang mengandung unsur *transfer of technology* (ToT). Visi ini juga semakin dipertegas melalui dikeluarkannya Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Pemerintah Republik Indonesia, 2012).

UU Industri Pertahanan idealnya dapat dikatakan menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan visi kemandirian pertahanan. Hal ini dikarenakan UU Industri Pertahanan sejatinya tidak hanya mewajibkan pengadaan alutsista produksi dalam negeri serta penerapan *offset* dan ToT. UU Industri Pertahanan juga mencoba menghadirkan ekosistem pendukung kemajuan industri pertahanan dalam negeri. Penciptaan ekosistem pendukung yang dimaksud adalah dengan pendirian Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). KKIP yang didirikan ini kemudian ditugaskan untuk menyusun sekaligus melakukan evaluasi *policy* terkait upaya membangun industri pertahanan nasional. KKIP juga diberikan tugas untuk merumuskan kerja sama industri pertahanan nasional dengan

mitra dalam dan luar negeri guna meningkatkan kapasitas industri pertahanan nasional (Pemerintah Republik Indonesia, 2012).

Menilik pada fakta sejarah, kerja sama antara industri pertahanan nasional dengan industri pertahanan asal negara lain sebenarnya bukan hanya disebabkan faktor kehadiran UU Industri Pertahanan maupun KKIP. Kerja sama serupa telah terjalin sejak rezim pemerintahan Orde Baru. Ketika itu Indonesia melalui Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) – sekarang menjadi PT. Dirgantara Indonesia (DI) – mampu memproduksi helikopter tempur ringan seperti NBO-105 serta NBell 412 (Bitzinger, 2013; Suhendra, 2016). Produksi dua helikopter tempur ringan tersebut terjadi melalui pemberian lisensi produksi kepada IPTN. Kerja sama industri pertahanan dalam bentuk pengembangan bersama juga terjadi antara IPTN dengan CASA – perusahaan asal Spanyol – hingga akhirnya menghasilkan pesawat CN-235 (Suryowati, 2014; Dirgantara Indonesia, n.d.).

Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini memang sedang memiliki beberapa program kerja sama industri pertahanan. Kerja sama industri pertahanan yang terjadi dalam 10 tahun terakhir bervariasi mulai dari ToT disertai pemberian lisensi produksi hingga pengembangan senjata. Adapun yang menjadi mitra kerja sama dalam beberapa tahun terakhir diantaranya adalah Korea Selatan, Belanda dan Turki. Indonesia bekerja sama dengan Korea Selatan dalam program kapal selam kelas Changbogo atau DSME209 serta pengembangan bersama jet tempur generasi 4.5 yang diberi nama Korea Fighter Xperiment / Indonesia Fighter Xperiment (KF-X/IF-X) (Al-fadhat & Effendi, 2019; Armandha et al., 2015). PT. PAL sebagai *lead integrator* industri pertahanan sektor laut juga bekerja sama dengan Damen Schelde Naval Shipbuilding, galangan kapal asal Belanda untuk membangun Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) Sigma 10514 (Muchtiwibowo et al., 2019).

Selain kerja sama dengan Korea Selatan dan Belanda, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Turki. Kerja sama industri pertahanan antara Indonesia dengan Turki telah dimulai dua tahun sebelum pengesahan UU Industri Pertahanan, yakni pada tahun 2010. Kesepakatan kerja sama industri pertahanan kedua negara ditandai dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) (Luerdi & Marisa, 2019). MoU yang disepakati pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-

Undang pada tahun 2014 (Luerdi & Marisa, 2019). Sejak ditandatanganinya MoU tersebut, kerjasama industri pertahanan antara Indonesia dengan Turki terjalin cukup erat (Amrullah, 2016).

Kerja sama antara Indonesia dan Turki dilakukan dalam beberapa program. Program pertama adalah kerja sama antara PT.LEN dan ASELSAN Turki untuk produksi bersama alat komunikasi untuk wilayah perbatasan (Amrullah, 2016; LEN, 2017). Kerja sama lainnya adalah kerja sama antara PT. Pindad dan FNSS Turki. Kerja sama ini adalah kerja sama pengembangan *medium battle tank* Harimau (Amrullah, 2016; Wulandari, 2017).

Sedangkan dalam konteks penelitian ini, kerjasama pengembangan *medium battle tank* dimulai sejak tahun 2014. Tepatnya ketika gelaran pameran pertahanan terbesar Indonesia, yakni Indo Defence Expo & Forum (Stefani, 2014; Tempo.co, 2014). Setelah menandatangani MoU pada tahun 2014 tersebut, PT. Pindad dan FNSS mampu memperkenalkan *prototype* dari *medium battle tank* yang dikembangkan secara bersama-sama tersebut. *Prototype* tersebut ditampulkan untuk pertama kalinya pada gelaran pameran industri pertahaan Turki yakni International Defence Industry Fair 2019. (Rahmat & Cranny-Evans, 2019). Tidak berlama-lama sejak pengenalam *prototype*, PT. Pindad selaku pengembang melaksanakan serangkaian uji coba yang kemudian membuahkan hasil menggembirakan. *Medium battle tank* karya anak bangsa tersebut dinyatakan lulus uji sertifikasi pada tahun 2018 oleh TNI (Siddiq, 2018).

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada fakta-fakta empirik yang dijabarkan dalam latar belakang maka terlihat bahwasanya Indonesia memang tengah memberi perhatian lebih pada industri pertahanan dalam negeri. Berbagai kerja sama yang dilakukan dengan berbagai negara diantaranya Korea Selatan, Belanda serta Turki menjadi indikator keseriusan pemerintah meningkatkan kapasitas industri pertahanan. Melalui peningkatan kapasitas industri pertahanan diharapkan Indonesia akan memperoleh dua hal. Pertama, sebagai pemenuhan kebutuhan TNI dalam rangka modernisasi persenjataan dan peningkatan kekuatan militer. Kedua, peningkatan kapasitas industri pertahanan juga diharapkan mampu mencapai kemandirian pertahanan.

Keputusan suatu negara meningkatkan kapasitas militer tidak terlepas dari persepsi ancaman negara tersebut. Berdasarkan dokumen resmi, yakni Buku Putih Pertahanan yang diterbitkan Kementerian Pertahanan, ancaman Indonesia berada pada dua aspek. Ancaman pertama adalah ancaman pada wilayah maritim yang bersumber dari permasalahan Laut China Selatan. Ancaman lainnya adalah ancaman yang bersifat non-tradisional. Ancaman yang bersifat non-tradisional yang dimaksud adalah ancaman kejahatan transnasional, terorisme hingga perubahan iklim (Kementerian Pertahanan, 2008, 2014, 2015). Berdasarkan ancaman non-tradisional yang dihadapi Indonesia, jenis Alutsista yang dikembangkan seharusnya berorientasi pada teknologi penginderaan dan *surveillance*, kemampuan logistik serta kapal perang dan jet tempur serta pesawat tanpa awak (Widjajanto et al., 2012). Oleh karena itu dapat dikatakan terdapat ketidaksesuaian antara persepsi ancaman dengan karakter *medium battle tank* Harimau.

Anomali lain dari keputusan Indonesia mengembangkan *Medium battle tank* Harimau juga terlihat dari efek gentar yang dihadirkan. Pengembangan industri pertahanan maupun alutsista oleh suatu negara harus mampu menghadirkan efek gentar. Efek gentar ini dapat dihadirkan melalui alutsista yang memiliki keunggulan teknologi (Widjajanto et al., 2012). Keunggulan teknologi ini tidak ditemukan dalam *medium battle tank* Harimau. Secara spesifikasi teknis *medium battle tank* Harimau tidak menghadirkan suatu teknologi dengan kemampuan khusus yang membedakannya dengan produk tank sejenis. Selain itu kemampuan tempur *medium battle tank* Harimau tidak bisa dikatakan lebih baik dibanding alutsista milik negara lain yang bahkan telah mengoperasikan *main battle tank*. Merujuk pada dua anomali tersebut maka peneliti akan mengangkat pertanyaan penelitian “**Mengapa Indonesia Melakukan Pengembangan *Medium battle tank* Harimau?**”

1.3. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penulisan tesis ini memiliki tujuan untuk menganalisis alasan Indonesia melakukan pengembangan *medium battle tank* Harimau yang bekerja sama dengan Turki. Selain itu, penulis melalui tesis ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait kemunculan tren negara-negara berkembang membangun industri pertahanan dalam negerinya. Adapun yang menjadi signifikansi penelitian ini penulis bagi menjadi tiga, yakni signifikansi teoretis,

empirik dan signifikansi untuk Indonesia. Melalui penelitian ini akan memperkaya kajian akademik mengenai kerja sama industri pertahanan yang dilakukan negara-negara berkembang. Mayoritas kajian mengenai kerja sama industri pertahanan dilakukan dengan menggunakan perspektif strategis dan ekonomi. Sedangkan penelitian ini akan melihat kerja sama industri pertahanan tidak hanya melalui perspektif strategis maupun ekonomi. Signifikansi empirik penelitian ini adalah memberikan pemahaman motivasi Indonesia maupun negara-negara berkembang lain mengembangkan alutsista maupun industri pertahanan yang tidak sesuai dengan persepsi ancaman maupun ketiadaan keunggulan komparatif teknologi. Sedangkan signifikansi penelitian ini bagi Indonesia adalah memberikan gambaran kepada Indonesia ketika akan mengembangkan persenjataan lainnya. Hal ini berkaitan dengan keinginan Pemerintah Indonesia melakukan investasi pertahanan demi tercapainya kemandirian pertahanan.

1.4. Tinjauan Kepustakaan

Mengingat trend pengembangan industri pertahanan yang sedang gencar dilakukan oleh Indonesia, maka telah terdapat cukup banyak penelitian terdahulu yang membahas hal tersebut. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya akan penulis kategorisasikan menjadi tiga kategori. Kategori tersebut adalah: (1) Perspektif Pertahanan, (2) Perspektif Ekonomi-Politik, (3) Perspektif Politik Domestik dan Birokrasi. Adapun yang dimaksud oleh penulis sebagai kategori perspektif pertahanan adalah kajian-kajian terdahulu yang menggambarkan bahwa pengembangan industri pertahanan didasarkan atas pertimbangan dan bertujuan strategis / pertahanan. Kategori perspektif ekonomi-politik yang dimaksud penulis adalah kumpulan kajian-kajian terdahulu yang menjelaskan aspek ekonomi-politik ketika Indonesia melakukan pengembangan industri pertahanan terutama melalui skema kerjasama internasional. Sedangkan kategori perspektif politik domestik dan birokrasi adalah kajian-kajian terdahulu yang mengemukakan kaitan antara pengembangan industri pertahanan dengan kondisi politik domestik dan birokrasi yang ada. Politik domestik dapat mempengaruhi pola pembelian senjata dan pengembangan alutsista maupun juga menjadi penghambat dalam proses kerjasama pengembangan alutsista.

1.4.1 Perspektif Pertahanan

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kajian-kajian terdahulu dalam kategori ini secara umum menggambarkan bahwa pengembangan industri pertahanan didasarkan atas pertimbangan dan bertujuan strategis / pertahanan. Pertimbangan dan tujuan strategis pengembangan industri pertahanan yang digambarkan oleh penelitian terdahulu dilakukan melalui tiga konsep yang berbeda. Konsep pertama yang digunakan adalah konsep diplomasi pertahanan (Ambarwati et al., 2019; Amrullah, 2016; Gindarsah, 2016; Manafe et al., 2020). Konsep kedua yang digunakan kajian-kajian terdahulu adalah konsep Inovasi militer (Dzikri, 2016; Luerdi & Marisa, 2019). Penelitian yang termasuk dalam kategori perspektif pertahanan juga dilakukan dengan menggunakan konsep kemandirian pertahanan (Al-fadhat & Effendi, 2019).

Berdasarkan kajian-kajian terdahulu mengenai pengembangan industri pertahanan dalam kategori pertama ini, penulis dapat menemukan alasan Indonesia melakukan pengembangan industri pertahanan. Pertama, Indonesia memandang bahwasanya pengembangan industri pertahanan yang bekerja sama dengan negara lain merupakan strategi diplomasi pertahanan yang ideal. Hal ini dikarenakan melalui kerja sama industri pertahanan ini Indonesia dapat memperoleh beberapa hal sekaligus. Kerja sama industri pertahanan sebagai salah satu bentuk diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa saling percaya (*confidence building measures*), meningkatkan kapabilitas pertahanan Indonesia serta meningkatkan kemampuan industri pertahanan nasional (Amrullah, 2016; Manafe et al., 2020).

Kedua, pengembangan industri pertahanan yang sedang gencar dilakukan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tidak terlepas dari konstelasi politik internasional di kawasan Asia Tenggara. Persaingan antara Amerika Serikat dan China di kawasan Asia Tenggara serta akselerasi modernisasi persenjataan di Asia Tenggara mengharuskan Indonesia menerapkan strategi Hedging. Pengembangan industri pertahanan melalui skema kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan berbagai negara merupakan instrument pendukung strategi *hedging*. Hal ini dimaksudkan agar Indonesia tidak terjebak dalam persaingan dua negara

tersebut serta agar tidak mengganggu proses modernisasi persenjataan guna mencapai KPM (Ambarwati et al., 2019; Gindarsah, 2016).

Ketiga, pengembangan industri pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia tidak terlepas dari upaya transformasi pertahanan atau *revolution in military affairs*. Dzikri (2016) berpandangan bahwa upaya transformasi pertahanan Indonesia salah satunya melalui akuisisi alutsista berteknologi tinggi melalui industri pertahanan dalam negeri. Namun dikarenakan kapasitas industri pertahanan dalam negeri masih memiliki keterbatasan maka cara lainnya adalah melalui program *transfer of technology* maupun *offset* bekerja sama dengan negara lain. Kerja sama yang melibatkan unsur sipil ini menurut Luerdi dan Marisa (2019) juga akan membantu proses transformasi pertahanan Indonesia. Namun lagi-lagi pelaksanaannya juga terkendala karena *transfer of technology* masih sangat minim serta permasalahan anggaran yang masih tidak mencukupi. Ketidakmampuan industri pertahanan dalam negeri menghadirkan alutsista berteknologi tinggi kemudian juga diakumulasikan pada hambatan organisasional, sehingga transformasi pertahanan Indonesia tidak berjalan (Dzikri, 2016; Luerdi & Marisa, 2019).

Keempat, pengembangan industri pertahanan nasional dilakukan Indonesia demi mencapai satu ambisi memperoleh kemandirian di bidang pertahanan. Al-Fadhat dan Effendi (2019) menyatakan bahwasanya Indonesia mengalami pergeseran tujuan dalam kesepakatan pembelian senjata. Jika sebelumnya kesepakatan yang dicapai didominasi memiliki tujuan untuk pembelian alat pertahanan semata, maka kini mulai diarahkan untuk menjamin keberlanjutan kemandirian. Hal ini didasari dengan diikutsertakannya kesepakatan *transfer of technology*.

1.4.2. Perspektif Ekonomi Politik

Senada dengan kategori pertama, kajian-kajian yang termasuk dalam kategori kedua – artikel yang menerangkan dalam perspektif ekonomi politik – juga menggunakan konsep yang berbeda. Konsep pertama yang dipergunakan adalah konsep *Defense Iron Triangle* (Armandha et al., 2015). Konsep kedua adalah konsep *offset*. Konsep offset ini kemudian

menjadi konsep yang dominan dalam pembahasan dalam kategori ini (Balakrishnan & Matthews, 2009; Bitzinger, 2011; Herrera & Matthews, 2014).

Melalui penelitian dalam kategori ekonomi-politik ini dapat ditemukan beberapa poin penting terkait kerja sama pengembangan industri pertahanan yang dilakukan Indonesia maupun negara-negara berkembang lain. Pertama, dalam kerja sama industri pertahanan Indonesia dengan Korea Selatan dalam pengembangan KF-X/IF-X ditemukan sebuah relasi strategis kompleks yang disebut dengan segitiga besi pertahanan. Segitiga besi pertahanan terjadi dikarenakan keberadaan negara maju seperti Amerika Serikat yang meskipun tidak terlibat secara langsung dalam kerja sama, memiliki pengaruh yang kuat dan menentukan. Korea Selatan dan Indonesia sangat bergantung pada izin pemerintah Amerika Serikat terhadap beberapa komponen teknologi yang ingin diadopsi dalam KF-X/IF-X. Oleh karena itu Amerika Serikat disebut berperan sebagai regulator, Korea Selatan sebagai agensi pemerintah dengan kepentingan terbesar dan Indonesia sebagai kontraktor, yang bergantung pada dinamika hubungan regulator bersama agensi pemerintah (Armandha et al., 2015).

Kedua, berakhirnya Perang Dingin dan terjadinya globalisasi memberikan dampak pada perdagangan senjata dan industri pertahanan. Akibat dari kedua kondisi tersebut industri pertahanan bertransformasi menjadi sebuah *buyer's market*. Industri pertahanan yang mayoritas berasal dari negara maju seperti Amerika Serikat dan negara eropa harus saling bersaing guna memperoleh kontrak pengadaan alutsista. Negara-negara pembeli alutsista mendapatkan bargaining powers yang meningkat. Herrera dan Matthews (2014) menyatakan bahwa bargaining powers yang meningkat ini mendorong intensitas kerja sama industri pertahanan dalam mekanisme *offset* (Herrera & Matthews, 2014). Negara-negara berkembang kerap kali mewajibkan skema *offset* agar industri pertahanan mereka mampu terlibat dalam *global supply chains* industri pertahanan dunia. Selain itu mekanisme *offset* ini juga diharapkan mampu membangun industri pertahanan dalam negeri agar mampu memicu industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi (Kogi Balakrishnan & Matthews, 2009; Bitzinger, 2011b).

1.4.3. Perspektif Politik Domestik dan Birokrasi

Selain dalam perspektif pertahanan dan ekonomi-politik, penelitian terdahulu yang membahas pengembangan maupun akuisisi senjata juga dilakukan dengan melihat kondisi politik domestik. Kajian atau penelitian terdahulu yang termasuk dalam kategori politik domestik dan birokrasi ini ditulis melalui perspektif *historical institutionalism*. Raymond (2017) menyatakan bahwa pola pembelian senjata di negara-negara Asia Tenggara yang pada dasarnya memiliki wilayah maritim yang luas bukan didominasi alutsista Angkatan Laut. Pengadaan alutsista didominasi oleh alutsista angkatan darat.

Dalam konteks Indonesia, kuatnya pengaruh TNI Angkatan Darat dapat terlihat dari elit-elit Angkatan Darat yang memegang posisi sebagai Panglima TNI maupun pejabat di Kementerian Pertahanan. Oleh karena hal tersebut lah wacana Poros Maritim Dunia yang secara langsung maupun tidak langsung turut menekankan peningkatan kapasitas TNI Angkatan Laut tidak sejalan dengan realita penggunaan anggaran TNI yang didalamnya termasuk pembelian alutsista. Anggaran yang dimiliki TNI disebutkan oleh Raymond, sebagian besar di alokasikan untuk TNI Angkatan Darat. Raymon bahkan menyatakan bahwa meskipun terdapat kenaikan alokasi TNI Angkatan Laut, sangat sulit melewati alokasi TNI Angkatan Darat (Raymond, 2017).

Selain dibahas menggunakan konsep *historical institusionalism*, kajian-kajian terdahulu yang termasuk dalam kategori ini juga ada yang melihat pengaruh kondisi politik domestik dan birokrasi dalam kerjasama industri pertahanan Indonesia. Salsabiela (2016) dalam artikelnya menjelaskan bahwasanya upaya Indonesia mencapai kemandirian pertahanan melalui kerjasam industri pertahanan dengan Korea Selatan dalam program KF-X/IF-X tidak terlepas dari unsur politik domestik dan birokrasi di Indonesia. Menurutnya kerjasama pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X menemui berbagai hambatan yang bersumber dari politik domestik dan birokrasi di Indonesia (Salsabiela, 2016).

Prasetyo, Armawi dan Halim (2017) dalam penelitiannya juga menyoroti birokrasi di dalam negeri mengevaluasi efektifitas kerja sama industri pertahanan. Dalam kajiannya dinyatakan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) sebagai unsur pemerintah yang

memiliki tanggungjawab terhadap pembangunan industri pertahanan kurang memiliki daya tawar yang kuat. Oleh karena itu kerja sama industri pertahanan antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam pembangunan kapal selam kelas Changbogo atau DMSE209 belum optimal. Kurang optimalnya kerja sama industri pertahanan tersebut didasarkan pada tingkat alih teknologi yang masih kurang dari 85% (Prasetyo et al., 2017).

1.4.4. Sintesis

Dari ketiga kategori umum kajian terdahulu mengenai kerja sama industri pertahanan maupun akuisisi persenjataan yang dilakukan Indonesia maupun negara-negara Asia Tenggara, secara umum penulis dapat mengidentifikasi kelebihan sekaligus kekurangannya. Kelebihan kajian terdahulu adalah memberikan informasi yang cukup baik terkait motivasi-motivasi Indonesia melakukan kerja sama industri pertahanan maupun akuisisi persenjataan dengan berbagai negara. Kekurangan yang dapat penulis identifikasi adalah kajian-kajian terdahulu belum banyak membahas motivasi Indonesia mengembangkan alutsista yang tidak sesuai dengan persepsi ancaman maupun menghadirkan *deterrence* dan keunggulan komparatif teknologi bagi Indonesia. Selain itu kajian-kajian terdahulu lebih banyak menggunakan studi kasus kerja sama pengembangan kapal selam DMSE 209 dan jet tempur KF-X/IF-X. Dua alutsista tersebut merupakan alutsista yang sesuai dengan persepsi ancaman serta akan menghadirkan daya gentar yang baik.

Berbeda dengan kajian-kajian terdahulu yang telah membahas kerja sama pengembangan industri pertahanan dilakukan atas dasar pertimbangan pertahanan dan ekonomi, penelitian ini akan membahas motivasi Indonesia mengembangkan *Medium battle tank* Harimau. Hal ini penting untuk dikaji karena terdapat fenomena yang berbanding terbalik secara teoretis maupun empirik. Indonesia seharusnya memfokuskan kerja sama pengembangan industri pertahanan dalam pengembangan alutsista yang sesuai dengan persepsi ancaman. Selain itu Indonesia juga seharusnya memilih melakukan pengembangan alutsista yang akan memberikan daya gentar maupun keunggulan teknologi.

Untuk melakukan analisis mengenai motivasi Indonesia melakukan pengembangan *Medium battle tank* Harimau melalui skema kerja sama industri pertahanan, peneliti akan

menggunakan konsep *techno-nationalist impulse*. Konsep *techno-nationalist impulse* merupakan konsep yang tidak terlepas dari pemikiran Robert B Reich pada tulisannya yang berjudul “*The rise of technonationalism*” (Reich, 1987) serta Richard Samuels pada bukunya yang berjudul “*Rich Nation, Strong Army: National Security and the Technological Transformation of Japan*”. Konsep ini kemudian dipergunakan oleh Richard Bitzinger dan Mikyong Kim dalam konteks industri pertahanan dan pengembangan senjata pada tahun 2005 (Bitzinger & Kim, 2005).

Konsep *techno-nationalist impulse* ini memiliki keunggulan dibandingkan konsep maupun teori lain dalam menjelaskan motivasi negara berkembang mengembangkan senjata secara mandiri. Konsep ini menjelaskan bahwasanya negara-negara berkembang atau negara yang tergolong dalam kelompok *second-tier arm producers* mengembangkan senjata didorong oleh variabel yang *hard-to-quantify*. Negara-negara tersebut tidak mendasari keputusannya mengembangkan senjata melalui pertimbangan keunggulan komparatif serta pertimbangan ekonomi lain (Bitzinger, 2015b; Bitzinger & Kim, 2005).

1.5. Kerangka Analisis: Konsep *Techno-nationalist Impulse*

Konsep *Techno-nationalist impulse* pada dasarnya merujuk pada konsep *techno-nationalism* yang dikemukakan pertama kali oleh Robert B Reich, seorang ekonom Amerika Serikat pada tahun 1987. Reich pada mulanya memperkenalkan *Techno-nationalism* sebagai suatu konsep ekonomi dan tidak berhubungan dengan militer atau pertahanan. Reich menyatakan bahwa penguasaan teknologi oleh suatu negara merupakan aspek yang menentukan kesejahteraan negara tersebut (Reich, 1987). David Edgerton kemudian menyampaikan argumen yang serupa, menurutnya upaya penguasaan teknologi secara mandiri oleh suatu negara didorong oleh motivasi untuk memperoleh status tertentu dalam konstelasi ekonomi internasional (Edgerton, 2007)

Sebagai bagian dari perkembangan teori-teori mengenai pengembangan industri pertahanan, perlu untuk memahami perkembangan teori-teori itu sendiri. Secara historis teori-teori yang membahas motivasi pengembangan senjata oleh suatu negara dapat dikatakan menitikberatkan pada dua aspek. Pertama, teori-teori yang menitikberatkan pada

motivasi yang berorientasi pada pertimbangan ekonomi (*pursuit of wealth*). Kedua, motivasi negara mengembangkan senjata adalah motivasi yang bersifat strategis yang bertujuan untuk meningkatkan *power* atau keuntungan strategis (*pursuit of power*).

Teori-teori yang termasuk dalam kategori pertama menitikberatkan pada motivasi untuk melakukan pengembangan senjata sendiri karena melihat keuntungan-keuntungan ekonomi yang bisa diperoleh. Emile Benoit menyatakan bahwa negara-negara memandang pengembangan senjata dapat menguntungkan perekonomian negara, karena dapat menjadi elemen substitusi impor (Benoit, 1978). Sedangkan tokoh-tokoh lain menyatakan pengembangan industri pertahanan dalam negeri dapat mendorong terjadinya industrialisasi dan menimbulkan pertumbuhan ekonomi (Bitzinger, 2003; Cheng & Chinworth, 1996; Willett, 1997).

Berseberangan dengan teori-teori yang menyatakan motivasi negara mengembangkan senjata sendiri dikarenakan alasan ekonomi, adalah pemikiran yang mempercayai motivasi strategis atau *power*. Stephanie Neuman menyatakan kemunculan trend negara mengembangkan senjata dimotivasi oleh keinginan untuk melepaskan diri dari pengaruh negara importir senjata. Neuman menyatakan bahwa ketika suatu negara memiliki ketergantungan kepada negara lain sebagai importir senjata, maka kapasitas militer negara tersebut akan dapat dikontrol oleh negara importir senjata (Neuman, 1988).

David Kinsella juga menyatakan hal yang serupa. Menurut Kinsella ketika suatu negara tidak mampu memproduksi senjatanya sendiri, maka negara tersebut akan jatuh pada pusaran pengaruh negara importir senjata. Kinsella menyatakan bahwa pengaruh yang dimiliki negara importir senjata akan sangat mampu mempengaruhi kebijakan luar negeri negara lain. Bahkan menurut Kinsella, persenjataan yang sudah lebih dulu dibeli oleh suatu negara dimungkinkan tidak dapat dipergunakan. Hal tersebut dikarenakan negara importir senjata tersebut memberlakukan larangan serta embargo (Kinsella, 1998).

Bitzinger menyatakan bahwa teori yang menyatakan motivasi negara mengembangkan senjata adalah pertimbangan strategis atau ekonomi tidak cukup menjelaskan persistensi negara *second-tier* – negara seperti Korea Selatan, Malaysia dan

Indonesia – mengembangkan senjata. Bitzinger dan Mikyoung Kim menyatakan setidaknya terdapat tiga alasan mengapa teori-teori terdahulu tidak cukup menjelaskan persistensi tersebut. Pertama, negara-negara *second-tier* sangat sulit melepaskan diri dari dependensi terhadap negara-negara *first-tier*. Negara-negara *second-tier* belum memiliki industri yang mampu mendukung produksi beberapa komponen vital pengembangan senjata. Negara-negara *second-tier* masih memiliki dependensi terhadap negara *first-tier* dalam proses *design* maupun pengembangan beberapa komponen senjata. Ketergantungan ini juga kemudian menyebabkan negara-negara *second-tier* sangat sulit mengungguli teknologi yang dimiliki senjata produksi negara-negara *first-tier* (Bitzinger & Kim, 2005).

Kedua, menurut Bitzinger dan Kim sebagai upaya untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan kurangnya kapasitas dalam beberapa komponen vital pengembangan senjata, negara-negara *second-tier* kerap menggunakan strategi *transfer-of-technology*. Namun strategi ini pada dasarnya juga tidak mampu menyelesaikan persoalan. Hal ini dikarenakan negara-negara *first-tier* tidak akan dengan mudah melakukan *transfer-of-technology* mengingat hal ini dapat menghadirkan potensi persaingan di masa yang akan datang. Kondisi ini tentunya tidak diinginkan negara *first-tier* (Bitzinger & Kim, 2005).

Ketiga, pengembangan industri pertahanan dan senjata merupakan sebuah investasi yang sangat mahal dan bersifat jangka panjang. Pemerintah suatu negara perlu melakukan investasi tidak hanya dalam bentuk akuisisi mesin atau teknologi produksi, melainkan juga sumber daya manusia. Selain itu, kondisi industri pertahanan negara-negara *second-tier* kerap kali tidak efisien. Hal ini semakin menjadikan mahal biaya pengembangan dan produksi senjata secara mandiri. Oleh karena itu menurut Bitzinger dan Kim, senjata-senjata dengan kemampuan serta teknologi lebih baik pada dasarnya dapat dibeli dengan harga yang lebih murah (Bitzinger & Kim, 2005). Oleh karena tiga hal tersebut, Bitzinger dan Kim menyatakan bahwa persistensi negara *second-tier* melakukan pengembangan senjata turut dipengaruhi oleh faktor *intangible* atau *hard-to-quantify*.

Faktor *intangible* yang dimaksudkan oleh Bitzinger dan Kim tersebut adalah ambisi meningkatkan status negara. Bitzinger kemudian menyebut ini sebagai *techno-nationalist impulse*. Hal ini tercipta dari akumulasi nasionalisme, status dan martabat bangsa. Namun

meskipun menitikberatkan pada ambisi meningkatkan status, *Techno-nationalist impulse* ini tidak menafikkan pertimbangan strategis atau peningkatan kapasitas power (*pursuit of power*) maupun keuntungan ekonomi (*pursuit of wealth*) (Cheung, 2017; Hughes, 2011; Kurç & Neuman, 2017; Tyroler-Cooper & Peet, 2011). *Pursuit of power* dalam konteks *techno-nationalism impulse* tidak berhenti pada peningkatan kapasitas power saja, melainkan turut meningkatkan *prestige* atau status negara dalam politik internasional (Bağcı & Kurç, 2017; Bitzinger, 2015b; Bitzinger & Kim, 2005). *Prestige* yang dimaksud adalah menyandang status sebagai negara yang mandiri (*independent states*) dan *regional great powers*.

Menurut Bitzinger ketika suatu negara memiliki ambisi untuk menjadi *great powers* di kawasan serta menjadi negara yang mandiri maka pengembangan industri pertahanan akan menjadi salah satu strategi yang dipilih. Hal ini dikarenakan kemandirian dalam aspek pertahanan termasuk dalam konteks industri pertahanan adalah salah satu prasyarat mejadi negara *great powers*. Negara tidak bisa hanya melakukan strategi *military builds-up* dengan mengakuisisi senjata yang diproduksi negara lain demi mencapai status *great power*. Ketika suatu negara telah memiliki kekuatan militer yang mumpuni, namun memiliki ketergantungan terhadap negara lain dalam aspek persenjataan maka kredibilitas *power* negara tersebut akan dipertanyakan (Bitzinger, 2015b; Bitzinger & Kim, 2005).

Ambisi menjadi negara *great power* serta mandiri ini juga diakibatkan dari sejarah masa lalu (memori kolektif) negara tersebut. Memori kolektif negara yang akan semakin menguatkan ambisi tersebut adalah menjadi korban perang maupun korban dari tindakan koersif negara *great power*. Memori tersebut kemudian memunculkan *distrust* terhadap negara lain terutamanya negara *great powers*. Negara yang memiliki *distrust* ini kemudian akan semakin persisten mengembangkan senjata melalui industri pertahanan nasionalnya. Upaya pengembangan senjata ini dipilih karena diyakini akan terkait dengan pendapat yang menyatakan ketergantungan mengakibatkan suatu negara terjebak dalam pengaruh negara importir senjata (Bitzinger, 2003; Krause, 1991; Neuman, 2010). Tai Ming Cheung juga kemudian menyatakan negara dalam menerapkan *techno-nationalist impulse* juga tidak terlepas dari kondisi lingkungan strategis di kawasan (Cheung, 2017).

Bitzinger dan Kim juga kemudian menyatakan bahwa, meskipun pengembangan senjata atau industri pertahanan membutuhkan investasi yang besar, bagi negara *second-tier* investasi yang dilakukan tidak sia-sia. Dalam melakukan pengembangan industri pertahanan setiap negara memiliki harapan atau tujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Melainkan juga mampu berperan sebagai negara eksportir senjata. Peranan tersebut tidak hanya akan memfasilitasi potensi keuntungan ekonomi, melainkan juga menunjukkan kedigdayaan ekonomi dan teknologi negara (*Economy dan Technology Prowess*) (Bitzinger & Kim, 2005).

Selain itu meskipun industri pertahanan dalam negeri sering kali mengalami kerugian, negara-negara cenderung akan memberikan insentif. Insentif yang dimaksud bisa berupa pemotongan pajak, penanaman modal negara, bantuan pemasaran (Bitzinger, 2011a, 2015b). Pemberian insentif oleh pemerintah terhadap industri pertahanan dimaksudkan agar industri pertahanan dalam negeri akan tetap eksis dan negara tersebut akan dipandang sebagai negara yang maju dan modern.

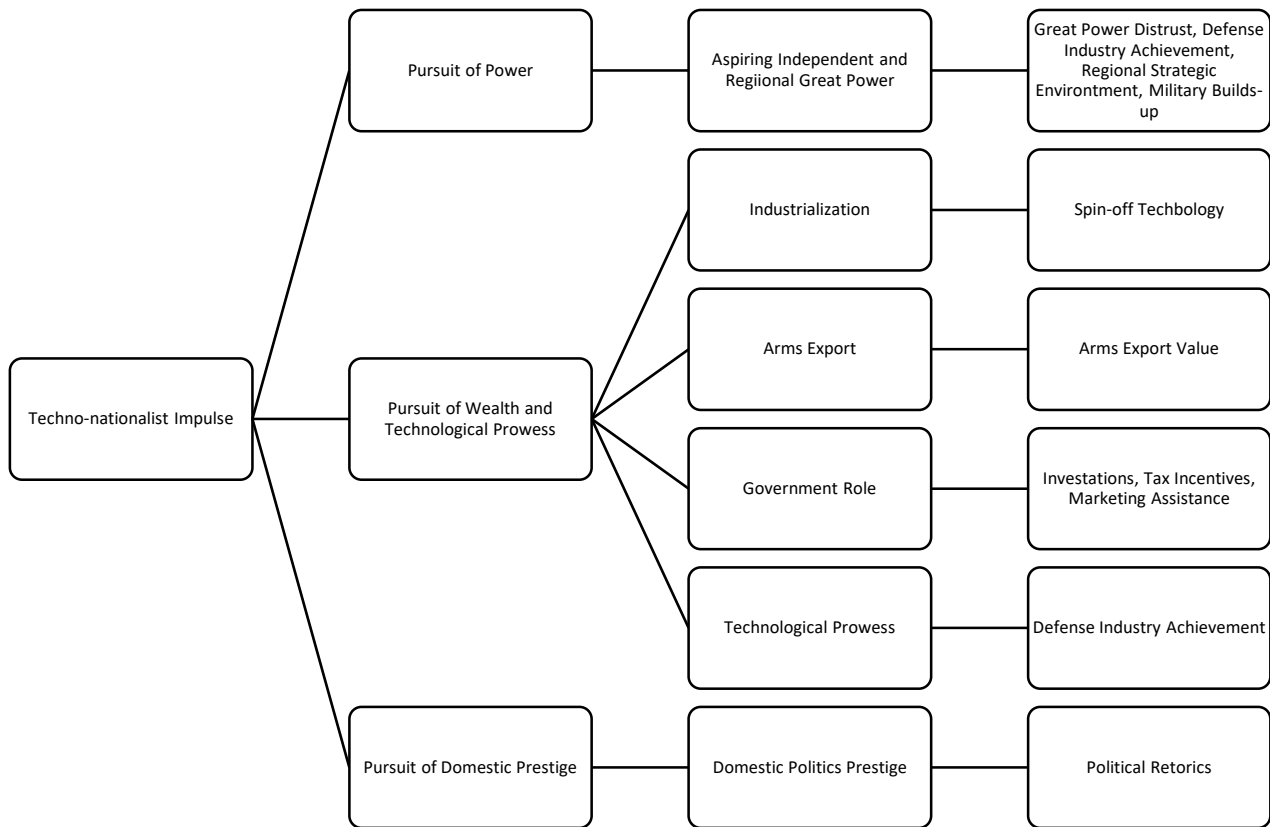
Bagci dan Kurc kemudian mengembangkan lagi konsep yang dikembangkan oleh Bitzinger dan Kim tersebut. Bagci dan Kurc berargumen bahwasanya *pursuit of prestige* yang menurut Bitzinger dan Kim menjadi motivasi negara mengembangkan senjata tidak hanya pada konteks relasi dalam politik internasional. Pengembangan senjata oleh industri pertahanan negara juga berperan untuk kepentingan politik dalam negeri. Keberhasilan memproduksi senjata melalui industri pertahanan negeri menciptakan *image* negara yang kuat dan berwibawa. *Image* ini yang kemudian sering dipergunakan politisi-politisi di negara tersebut dalam retorika politiknya (Bağcı & Kurç, 2017).

Selain itu menurut Bagci dan Kurc progress atau pencapaian pengembangan industri pertahanan yang telah dilakukan sebelumnya juga mempengaruhi persistensi negara. Keberhasilan negara mengembangkan atau memproduksi beberapa jenis senjata akan mendorong negara mengembangkan jenis senjata lainnya. Hal ini dikarenakan pemimpin atau pengambil kebijakan negara tersebut merasa memiliki kemampuan mewujudkan visi kemandirian pertahanan di masa yang akan datang. Logika serupa juga berlaku ketika negara

melihat pencapaian negara melakukan ekspor senjata hasil pengembangannya (Bağcı & Kurç, 2017).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan mengenai konsep *techno-nationalist impulse*, maka dapat diketahui bahwa selain nasionalisme, kemampuan negara mengembangkan dan memproduksi teknologi persenjataan secara mandiri dimaksudkan untuk memaksimalkan *power*, meraih status tertentu, dan memperluas keuntungan ekonomi yang diperoleh. Selain itu diketahui terdapat tiga variabel yang masing-masing memiliki indikator dan sub-indikator berbeda. Variabel pertimbangan strategis dan peningkatan kapasitas kekuatan (*pursuit of power*) memiliki indikator ambisi menjadi negara yang mandiri dan kuat (*aspiring independent and great power states*) yang kemudian memiliki empat sub-indikator yakni rasa tidak percaya terhadap negara *great power* (*great power distrust*) dan pencapaian-pencapaian industri pertahanan nasional (*defense industry achievement*), kondisi lingkungan strategis kawasan (*regional strategic environment*) dan peningkatan kekuatan militer (*military builds-up*).

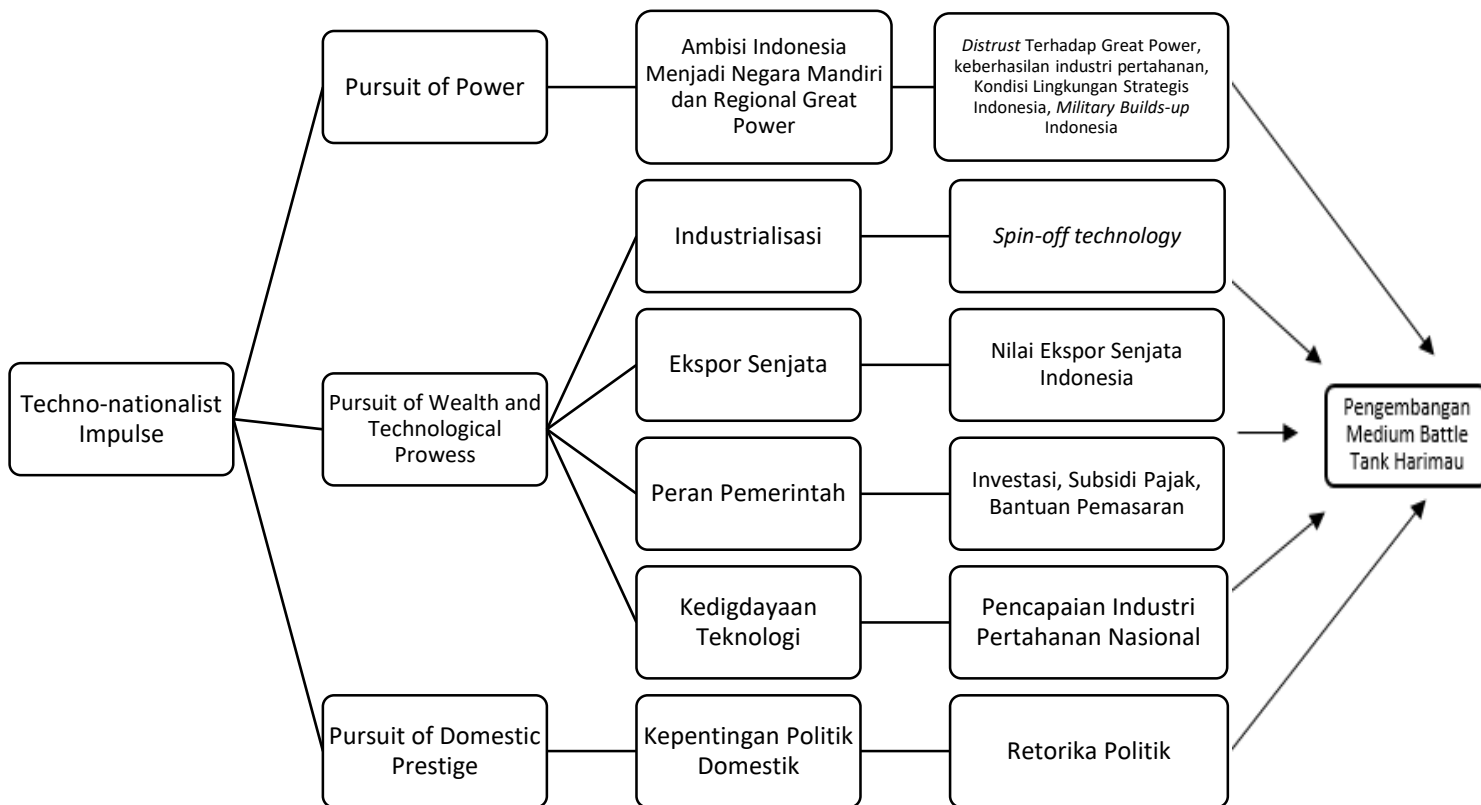
Variabel keuntungan dan kedigdayaan ekonomi serta teknologi (*pursuit of economy and technology prowess*) memiliki tiga indikator, yakni industrialisasi (*industrialization*), ekspor senjata (*arms export*) dan peranan pemerintah terhadap industri pertahanan nasional (*Government Role*). Indikator industrialisasi memiliki sub-indikator *spin-off technology*. Indikator *arms export* memiliki sub-indikator nilai ekspor senjata (*arms export value*). Sedangkan indikator *government role* memiliki sub-indikator investasi yang dilakukan pemerintah di industri pertahanan nasional (*investations*), pemberian insentif pajak (*tax incentives*) dan bantuan dalam proses pemasaran produk pertahanan (*marketing assistance*). Variabel keinginan memperoleh kebanggaan dalam politik domestik (*pursuit of domestic prestige*) memiliki indikator *domestic politics prestige* yang kemudian memiliki sub-indikator retorika politik (*political retorics*). Berikut adalah bagan kerangka analisis:



Gambar 1.1: Visualisasi Kerangka Analisis *Techno-nationalist impulse*

Sumber: Telah Diolah Kembali Berdasarkan Bağcı & Kurç, 2017; Bitzinger, 2015b; Bitzinger & Kim 2005

Kerangka analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar analisis motivasi Indonesia melakukan *medium battle tank* Harimau berdasarkan variabel-variabel yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Agar lebih mudah untuk memahaminya, berikut model analisis penelitian ini:



Gambar 1.2: Model Analisis Pengembangan *Medium battle tank* Harimau

Sumber: Telah Diolah Kembali Berdasarkan Bağcı & Kurç, 2017; Bitzinger, 2015b; Bitzinger & Kim 2005

Gambar model analisis diatas menunjukkan bahwasanya motivasi Indonesia melakukan pengembangan *medium battle tank* Harimau didasarkan pada *techo-nationalist impulse*. Terdapat tiga variabel yang menjadi dasar dalam menggambarkan peranan *techno-nationalist impulse* dalam pengembangan *Medium battle tank* Harimau. Pertama, dalam variabel *pursuit of power* penelitian ini akan dilihat dalam satu indikator yakni ambisi Indonesia menjadi negara yang mandiri serta menjadi negara *great power* di kawasan. Indikator ini akan dianalisis melalui empat sub-indikator yakni: Pertama, apakah Indonesia memiliki *distrust* terhadap negara-negara *great power*? Bagaimana kondisi lingkungan strategis Indonesia? Apakah Indonesia melakukan *military builds-up* dan apakah pengembangan *medium battle tank* Harimau terkait dengan *military builds-up* tersebut?

Variabel kedua, *pursuit of wealth and technological prowess* akan melihat bagaimana upaya Indonesia mewujudkan kedigdayaan ekonomi dan teknologinya. Variabel ini akan dilihat melalui tiga indikator, yaitu: industrialisasi, ekspor alutsista Indonesia serta peran pemerintah dalam memastikan keberlangsungan industri pertahanan nasional. Indikator industrialisasi akan dianalisis dengan melihat apakah melalui pengembangan *medium-battle tank Harimau* Pemerintah Indonesia menghadapi terjadinya *spin-off* teknologi? Indikator kedua akan dianalisis melalui sub-indikator bagaimana nilai ekspor Indonesia melalui industri pertahanan? Indikator ketiga akan dianalisis melalui pertanyaan apakah Pemerintah Indonesia mengeluarkan dan mengimplementasikan kebijakan insentif untuk memastikan keberlangsungan industri pertahanan nasional? Indikator keempat akan dianalisis dengan menggunakan sub-indikator bagaimana pencapaian industri pertahanan nasional khususnya dalam keberhasilan memproduksi medium battle tank Harimau dibandingkan dengan industri pertahanan di Asia Tenggara?

Variabel ketiga, *pursuit of domestic prestige* akan menganalisis kondisi politik dalam negeri yang mempengaruhi kebijakan pengembangan industri pertahanan. Variabel ini akan dianalisis melalui pertanyaan apakah retorika-retorika politik mencerminkan adanya keinginan atau ambisi membangun industri pertahanan terutama *medium battle tank Harimau*?

1.6 Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian ini adalah negara berkembang atau *second tier arms producer* dalam melakukan pengembangan senjata secara mandiri tidak hanya didasari pertimbangan strategis maupun keunggulan komparatif. Oleh karena itu Indonesia memilih untuk mengembangkan *medium battle tank Harimau* meskipun tidak memiliki keunggulan komparatif. Keputusan Indonesia mengembangkan *Medium battle tank Harimau* didasarkan pada pertimbangan *techno-nationalist impulse*. Berdasarkan konsep *techno-nationalist impulse* motivasi dan persistensi Indonesia dapat dilihat melalui tiga hal, yakni *pursuit of power*, *pursuit of wealth and technological prowess*, serta *pursuit of domestic prestige*.

Indonesia sebagai sebuah negara sedang berupaya untuk meningkatkan kapasitas *power* serta status. Peningkatan kapasitas *power* serta status ini kemudian terlihat dari ambisi untuk menjadi negara yang mandiri serta menjadi negara *great powers* di kawasan. Selain itu Indonesia juga mengharapkan tidak hanya memperoleh keuntungan ekonomi dari industri pertahanan nasionalnya. Melainkan juga menunjukkan kedigdayaan ekonomi serta teknologi Indonesia dibanding negara di kawasan Asia Tenggara. Selain pertimbangan yang berorientasi pada status dan *prestige* Indonesia dalam percaturan politik internasional, pengembangan *Medium battle tank* Harimau juga tidak terlepas dari kondisi persaingan politik dalam negeri Indonesia. Pengembangan *Medium battle tank* Harimau akan menghadirkan *prestige* serta legitimasi tersendiri bagi Pemerintah maupun elit politik Indonesia. Oleh karena berbagai pertimbangan maupun kondisi tersebut maka Indonesia memilih untuk mengembangkan *Medium battle tank* Harimau.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Merujuk pada penjelasan Cristopher Lamont, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan pada koleksi data dan analisis strategi menggunakan data non-numerikal (Lamont, 2015). Melalui penelitian kualitatif diharapkan dapat memberikan pemahaman dan rasionalisasi terkait dengan suatu fenomena yang terjadi dalam lingkup politik internasional. Dalam konteks kajian hubungan internasional, pendekatan studi kasus menjadi sangat jamak digunakan. Hal ini dikarenakan penelitian dalam kajian hubungan internasional berupaya menjelaskan alasan mengenai satu fenomena yang spesifik (Lamont, 2015).

Pendekatan studi kasus sendiri dalam penelitian kualitatif didefinisikan sebagai *qualitative small-n research* (Blatter & Haverland, 2012). Menurut Blatter dan Haverland pendekatan studi kasus memiliki salah satu fitur utama, yakni untuk menunjukan relasi antara pengamatan empiris yang konkrit dengan konsep-konsep teoretis yang abstrak (Blatter & Haverland, 2012). Penelitian Ini menggunakan studi kasus pengembangan *Medium battle tank* Harimau pada tahun 2014 - 2018. Pengamatan empiris direlasikan dengan indikator yang terdapat dalam variabel konsep *techno-nationalist impulse* untuk menganalisis

fenomena tersebut. Selanjutnya dalam metode penelitian dibutuhkan teknik pengumpulan data dan teknik analisis.

Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan riset berbasis wawancara (*interview*) dan riset berbasis internet (*internet-based research*). Pada penelitian ini penulis berkeinginan melakukan interview terhadap stakeholders terkait dalam kerja sama pengembangan *Medium battle tank* Harimau. *Stakeholders* tersebut adalah pejabat di Kementerian Pertahanan, PT. Pindad, DPR RI Komisi I serta TNI. Selanjutnya Penulis juga berkeinginan untuk melakukan interview dengan para ahli dibidang industri pertahanan. Dalam melakukan *interview-interview* tersebut peneliti akan menggunakan format wawancara semi-terstruktur. Menurut Lamont, format wawancara semi-terstruktur merupakan format yang jamak dilakukan ketika melakukan *interview* terhadap elit (Lamont, 2015).

Selanjutnya adalah riset berbasis internet (*internet-based research*), cara memanfaatkan teknologi internet sebagai wadah mendapatkan informasi. Misalkan bisa melalui website resmi pemerintahan, kantor berita *online*, jurnal *online*, dan lainnya. Pada era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi serta komunikasi, teknik pengumpulan data riset berbasis internet (*internet-based research*) banyak dipilih oleh peneliti. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai informasi yang akurat dan pernyataan-pernyataan resmi negara yang bisa dijadikan sumber referensi.

Dalam melakukan penelitian selain diperlukan menentukan pendekatan penelitian serta teknik pengumpulan data masih terdapat satu hal lagi yang sangat vital. Satu hal yang juga sangat vital adalah teknis analisis data. Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah *Causal Process Tracing* (CPT). Menurut Blatter dan Haverland CPT merupakan pendekatan analitik yang memiliki dua elemen atau basis, yakni pemikiran konfiguratif dan konfigurasi kausal. CPT memiliki tujuan utama yang salah satunya adalah untuk mengetahui kondisi atau prasyarat apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa tertentu. Penulis memilih teknik analisis data CPT dikarenakan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui alasan atau motivasi Indonesia mengembangkan *Medium battle tank* Harimau (Blatter & Haverland, 2012).

Blatter dan Haverland kemudian menjelaskan bahwasanya CPT memiliki 2 macam teknik yang basis analisisnya menggunakan teori. Kedua macam teknik CPT tersebut adalah *causal combination* dan *causal mechanism*. Dalam konteks penelitian ini penulis akan menggunakan *causal combination*. *Causal combination* menurut Blatter dan Haverland adalah model sebab-akibat yang dikombinasikan dari berbagai konfigurasi kausal lainnya. *Causal combination* kemudian juga bisa dipergunakan bersamaan dengan apa yang disebut dengan *causal conjunction* dan *additif configuration*. *Causal conjunction* merupakan variasi konfigurasi kausal di mana beberapa kondisi kausal bekerja pada waktu yang bersamaan (dalam cara aditif atau interaktif). Sedangkan *additif configuration* adalah teknik analisis yang memungkinkan semua faktor kausal tidak harus ada dalam menghasilkan peristiwa tertentu (*substitutable*) (Blatter & Haverland, 2012).

1.8 Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam empat bab. Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisis, asumsi penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab kedua menjelaskan objek penelitian yakni pengembangan *Medium battle tank* Harimau oleh Indonesia bekerja sama dengan Turki. Bab ini akan memulai pembahasan mengenai gambaran umum terkait dinamika lingkungan strategis, penilaian ancaman dan postur pertahanan Indonesia. Setelah itu pembahasan pada bab kedua akan berlanjut pada visi kemandirian pertahanan Indonesia sekaligus mendeskripsikan sejarah, perkembangan dan dinamika industri pertahanan Indonesia serta kerjasama-kerjasama internasional yang dilakukan. Sebagai pembahasan terakhir pada bab kedua, penulis akan membahas mengenai pengembangan *Medium battle tank* Harimau yang dilakukan oleh Indonesia bekerja sama dengan Turki.

Bab ketiga pada tesis ini akan menganalisis motivasi Indonesia mengembangkan *Medium battle tank* Harimau menggunakan kerangka analisis konsep *techno-nationalist impulse*. Analisis tersebut akan dibagi menjadi tiga sub-bab sesuai dengan variabel konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pada sub-bab pertama, *pursuit of power* Indonesia akan dilihat melalui analisis terhadap ambisi Indonesia menjadi negara mandiri atau independen

serta ambisi menjadi negara *great power* di kawasan. Sedangkan pada sub-bab kedua, *pursuit of wealth and technological prowess* dianalisis melalui tiga indikator. Indikator tersebut adalah *spin-off* industrialisasi yang dihadirkan pengembangan *Medium battle tank* Harimau, nilai ekspor alutsista oleh industri pertahanan Indonesia serta insentif yang diberikan terhadap industri pertahanan dalam negeri. Pada sub-bab terakhir, variabel *pursuit of domestic prestige* akan dianalisis dengan melalui retorika-retorika politik yang disampaikan terkait pengembangan *Medium battle tank* Harimau dan industri pertahanan dalam negeri.

Bab empat merupakan bagian penutup yang berisikan simpulan dan rekomendasi. Bagian simpulan akan menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan temuan yang didapatkan dari analisis pada bab sebelumnya. Bagian rekomendasi akan berisikan rekomendasi teoretis untuk kajian selanjutnya yang akan menggunakan konsep *techno-nationalist impulse*.

BAB 2

PENGEMBANGAN *MEDIUM BATTLE TANK* HARIMAU INDONESIA - TURKI

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai pengembangan *medium battle tank* Harimau Indonesia berkerja sama dengan Turki. Untuk memahami secara lebih komprehensif mengenai pengembangan *medium battle tank* Harimau, maka pada sub-bab pertama penulis akan menjabarkan mengenai dinamika lingkungan strategis, penilaian ancaman serta postur pertahanan Indonesia. Selanjutnya pada sub-bab kedua, penulis akan menjelaskan mengenai visi kemandirian pertahanan dan dinamika industri pertahanan Indonesia. Pada sub-bab ketiga penulis akan membahas mengenai kerja sama internasional industri pertahanan Indonesia. Sedangkan pada sub-bab terakhir, penulis akan fokus membahas objek penelitian tesis ini, yakni pengembangan *medium battle tank* Harimau oleh Indonesia yang bekerja sama dengan Turki.

2.1 Lingkungan Strategis, Penilaian Ancaman dan Postur Pertahanan Indonesia

2.1.1 Lingkungan Strategis dan Penilaian Ancaman Indonesia

Kondisi lingkungan strategis internasional akan membawa dampak terhadap kondisi di dalam negeri Indonesia. Dampak kondisi lingkungan strategis internasional terhadap kondisi keamanan nasional dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata koin. Pada satu sisi dampak yang ditimbulkan positif namun pada sisi lain juga mampu memberi dampak negatif (Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, 2008). Dinamika atau perubahan kondisi lingkungan strategis internasional dapat merubah maupun meningkatkan potensi ancaman keamanan negara. Era globalisasi seperti saat ini menyebabkan kondisi lingkungan strategis internasional menjadi semakin kompleks.

Semakin kompleksnya kondisi lingkungan strategis internasional di era globalisasi ini ditandai dengan kemunculan sumber ancaman baru. Berdasarkan Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008, ancaman yang dihadapi negara pada saat ini telah menjelma menjadi ancaman yang bersifat multidimensional, fisik maupun nonfisik serta berasal dari dalam maupun luar negeri. Kompleksitas dan kehadiran ancaman yang multidimensional tersebut

menghadirkan kondisi ketidakpastian dalam derajat yang tinggi (Kementerian Pertahanan Indonesia, 2008). Ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional sebagaimana disebutkan sebelumnya ditandai dengan kemunculan sumber-sumber ancaman baru.

Sumber-sumber ancaman baru yang timbul pada era globalisasi ini diantaranya adalah perubahan iklim atau keamanan lingkungan, bencana alam, keamanan energi, pandemi serta kemunculan kejahatan transnasional seperti terorisme. Ancaman-ancaman tersebut juga menjadi bentuk ancaman yang dimuat dalam tiga edisi buku putih pertahanan Indonesia (Kementerian Pertahanan Indonesia, 2008, 2014, 2015). Namun, kemunculan sumber ancaman baru ini tidak serta merta meniadakan sumber ancaman tradisional seperti konflik antar negara, perlombaan senjata hingga isu perbatasan. Indonesia sebagai negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara maupun Asia Pasifik hingga saat ini tetap berhadapan dengan sumber-sumber ancaman tradisional tersebut (Kementerian Pertahanan Indonesia, 2008, 2014, 2015).

Sumber ancaman tradisional yang dihadapi Indonesia saat ini diantaranya adalah potensi konflik di Asia Pasifik. China yang pada saat ini menjelma menjadi salah satu kekuatan utama dunia menjadi semakin asertif di Laut China Selatan (Ott, 2011; Trisni et al., 2016). Semakin asertifnya China dalam isu Laut China Selatan terlihat dari dibangunnya pulau buatan di wilayah yang menjadi sengketa. Selain itu kehadiran Amerika Serikat sejak kebijakan “*Pivot to Asia*” turut meningkatkan tensi di Laut China Selatan. Meskipun Indonesia dan China hingga saat ini menyatakan tidak memiliki sengketa kedaulatan tetap perlu menyikapi kebangkitan China dengan berhati-hati dan bijaksana. Hal tersebut dikarenakan terdapat sebagian wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang masuk kedalam *nine-dash line*¹ China (Trisni et al., 2016).

Selain dengan kebangkitan ekonomi dan militer China yang mendorong eskalasi konflik di Laut China Selatan, Indonesia juga dihadapkan pada peningkatan volume akuisisi persenjataan negara-negara tetangga di ASEAN. Berdasarkan data yang dirilis oleh SIPRI, pada rentang tahun 2014 -2018, 5 dari 10 negara ASEAN merupakan bagian dari 40

¹ Sembilan garis putus-putus imajiner di wilayah Laut China Selatan yang menurut China merupakan wilayah *traditional fishing zone* nelayan asal China

pengimpor senjata terbesar dunia. Vietnam menjadi negara Asia Tenggara pengimpor senjata terbesar dengan menduduki posisi 10 kemudian Indonesia (12), Singapura (22), Thailand (27), dan Myanmar (36) (P. D. Wezeman et al., 2019). Secara keseluruhan bahkan nilai belanja alutsista negara-negara Asia Tenggara pada rentang tahun 2009 – 2018 mengalami peningkatan hingga 33.1% (S. T. Wezeman, 2019).

Beragamnya ancaman yang dihadapi Indonesia mendapatkan respon dari Kementerian Pertahanan Indonesia. Kementerian Pertahanan Indonesia melakukan penilaian ancaman yang dihadapi dengan melakukan analisis berdasarkan potensi terjadinya suatu ancaman serta prioritas dari masing-masing ancaman (Kementerian Pertahanan Indonesia, 2015). Berdasarkan hasil analisis ancaman tersebut maka ancaman Kementerian Pertahanan mengkategorikannya sebagai ancaman nyata dan belum nyata. Ancaman nyata terdiri dari ancaman terorisme, separatisme, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, pencurian kekayaan alam, epidemic dan pandemi, spionase dan serangan siber serta kejahatan transnasional. Sedangkan ancaman belum nyata adalah konflik terbuka / perang konvensional (Kementerian Pertahanan Indonesia, 2015).

2.1.2 Postur Pertahanan Indonesia

Sebagai negara yang berada pada kondisi lingkungan strategis yang dinamis, maka sudah sewajarnya Indonesia memiliki postur pertahanan yang kuat. Terlebih lagi jika menilik pada fakta sejarah, Indonesia menjadi kekuatan militer yang disegani karena ditopang postur pertahanan yang kuat. Kejayaan militer Indonesia tersebut terjadi ketika era Presiden Soekarno berkuasa di dekade 1960. Ketika itu Indonesia yang baru merdeka kurang dari 20 puluh tahun telah mengoperasikan berbagai teknologi persenjataan atau Alutsista canggih dan dengan daya tangkal tinggi. Sebagai contohnya adalah pengoperasian kapal tempur yang masuk dalam jenis kapal penjelajah, yang diberi nama KRI Irian. Disaat yang bersamaan Indonesia juga merupakan negara Asia Tenggara mengoperasikan kapal selam. Ketika itu Indonesia mengoperasikan 12 kapal selam kelas Whiskey maupun pesawat pembom TU-16KS yang dibeli dari Uni Soviet (Santosa, 2017; Tempo.co, 2017b).

Namun kondisi postur pertahanan Indonesia saat ini bertolak belakang dengan kondisi postur pertahanan Indonesia pada dekade 1960. Postur pertahanan Indonesia pada saat ini dapat dikatakan berada pada kondisi yang jauh dari ideal. Hal ini dikarenakan Alutsista yang dimiliki atau dioperasikan oleh TNI merupakan alutsista yang sudah cukup tua. Berdasarkan data yang dirilis oleh CSIS pada tahun 2014, 52 persen dari keseluruhan Alutsista yang dioperasikan TNI berada pada usia lebih dari 30 tahun. Bahkan terdapat 28% Alutsista TNI yang berusia lebih dari 40 tahun. Sedangkan Alutsista TNI yang berada pada usia antara 1 – 10 tahun hanya sekitar 19% (Tempo.co, 2015). Sudah uzurnya usia Alutsista yang dioperasikan TNI berdampak pada aspek ketertinggalan teknologi.

Ketertinggalan teknologi maupun kapabilitas alutsista Indonesia ini dapat ditemukan di seluruh matra TNI. TNI Angkatan Udara hingga tahun 2017 tercatat masih mengoperasikan pesawat tempur jenis F-5 E/F. Pesawat tempur F-5 E/F milik TNI Angkatan Udara ini tentunya tertinggal secara teknologi maupun kemampuan dengan pesawat tempur milik Singapura dan Australia yang lebih modern yakni F-16 Blok 52 maupun F/A-18F. Sedangkan pada tubuh TNI Angkatan Laut masih mengandalkan kapal perang bekas kelas Van Speijk yang sudah diproduksi 5 dekade lalu. (Santosa, n.d.). TNI AD sebagai matra dengan jumlah pasukan terbesar juga masih menggunakan alutsista uzur seperti tank kelas ringan AMX-13 yang juga dioperasikan sejak 5 dekade yang lalu (Matanasi, 2018).

Tidak idealnya postur pertahanan Indonesia pada saat ini tidak hanya terlihat dari usia Alutsista yang dioperasikan TNI. Indikator lainnya adalah angka kesiapan operasional Alutsista TNI. Secara keseluruhan menurut Kementerian Pertahanan pada tahun 2005 angka kesiapan operasional TNI Angkatan Darat hanya 35%, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara bahkan hanya sebesar 30% dari keseluruhan Alutsistanya yang berada pada kondisi siap operasional (Syafputri, 2011). Menteri Pertahanan Rerpublik Indonesia, Prof. Juwono Sudarsono pada tahun 2005 turut menyatakan khusus armada pesawat tempur TNI AU, hanya 40% yang berada pada kondisi siap tempur (Supriyanto, 2005).

Dalam tubuh TNI Angkatan Darat, pada tahun 2012 hanya 57.91% pucuk senjata yang siap operasi. Selain itu, dalam kecabangan Kavaleri, dari total 1086 unit kendaraan tempur yang dimiliki TNI AD, hanya 248 unit yang dalam kondisi baik dan siap operasi.

Dengan kata lain hanya 24.48% kendaraan tempur TNI AD yang berada pada kondisi siap operasional. Kondisi yang tidak jauh berbeda tampak pada jenis alutsista lain. Tercatat hanya 75.98% artileri medan yang siap operasional, 11.62% meriam pertahanan udara yang siap operasional, dan hanya 19.59% rudal pertahanan udara yang siap operasional. Kecabangan Penerbang Angkatan Darat (Penerbad) hanya memiliki 64 unit pesawat dalam kondisi siap operasional (21.51%). Sedangkan pada kecabangan Zeni, hanya 1.61% Alsus nubika yang berada pada kondisi siap operasional (Sekolah Staf Komando Angkatan Darat, 2012).

Jika melihat pada Alutsista yang dimiliki oleh tiap-tiap matra TNI, maka tidak idealnya postur pertahanan Indonesia akan semakin terlihat. TNI Angkatan Udara saat ini mengoperasikan armada yang tergolong sebagai pesawat tempur sebanyak 7 squadron. Selain 7 squadron pesawat tempur, postur TNI Angkatan Udara lainnya adalah 5 squadron pesawat angkut, 4 squadron helikopter, 2 squadron pesawat latih dan masing-masing 1 squadron pesawat patrol maritim, *Unmanned Aerial Vehicles* (UAV) dan pesawat tanker (IISS, 2020). Tabel 2.1 dibawah ini adalah daftar Alutsista yang dioperasikan TNI Angkatan Udara.

Tabel 2.1 Alutsista TNI Angkatan Udara 2020

Kategori	Jumlah Squadron	Jenis
Pesawat Tempur	7	F-16 A/B/C/D, Su-27SK/SKM, Su-30MK/MK2, Hawk Mk109/209, T50i, EMB-314 Super Tucano
Pesawat Angkut	5	B737-200, C-130H, L-100-30, F-27 400M, F-28 1000/3000, NC-212, CM-235M-110, CN295M
Helikopter	4	H225M, AS332L Super Puma, SA330J/L Puma, SA330SM Puma, H-120 Colibri
Pesawat Latih	2	Grob 120TP, KT-1B
Pesawat Patroli Maritim	1	B-737-200, CN-235M-220 MPA
Pesawat Tanker	1	KC-130B
UAV	1	Aerostar

Sumber: Olahan sendiri (berdasarkan: IISS, 2020)

TNI Angkatan Laut pada tahun 2020 menurut *military balance* memiliki kekuatan yang diantaranya terdiri dari 4 kapal selam. 2 unit kapal selam milik TNI Angkatan Laut merupakan kapal selam jenis U-209/1300 produksi tahun 1981, sedangkan 2 unit lainnya adalah kapal selam 209/1400 yang diproduksi oleh PT. Pal bekerja sama dengan DSME Korea Selatan. Selain itu TNI Angkatan Laut juga diperkuat oleh 11 kapal *frigate*, 20 kapal

korvet (IISS, 2020). Tabel 2.2 dibawah ini adalah daftar alutsista yang dioperasikan TNI AL pada tahun 2020.

Tabel 2.2 Alutsista TNI Angkatan Laut 2020

Kategori	Jumlah Unit
<i>Frigate</i>	11
Korvet	20
Kapal Selam	4
Kapal Patroli	120
Pesawat Patroli Maritim	28
Pesawat Angkut	33
Kapal Pendukung	130
Helikopter	45

Sumber: Olahan sendiri (berdasarkan: IISS, 2020)

TNI Angkatan Darat pada tahun 2020 menurut *military balance* memiliki kekuatan yang diantaranya terdiri dari 103 tank tempur utama (MBT), 350 tank ringan, 142 kendaraan tempur intai, 64 *Infantry Fighting Vechiles* (IFV), 834 kendaraan angkut personel lapis baja (APC). Selain itu TNI Angkatan Darat juga diperkuat oleh lebih dari 1.200 artileri, pesawat terbang dan helikopter berbagai jenis (IISS, 2020). Tabel 2.3 dibawah ini adalah daftar alutsista yang dioperasikan TNI Angkatan Darat pada tahun 2020.

Tabel 2.3 Alutsista TNI Angkatan Darat 2020

Kategori	Jumlah Unit
Tank Tempur Utama	103
Tank Tempur Ringan	350
Recce	142
IFV	64
APC	834
AUV	39
Artileri Medan	1198
Pesawat (<i>Fixed Wing</i>)	9
Helikopter	92
Artileri Pertahanan Udara	506
Kendaraan Tempur Amfibi	17

Sumber: Olahan sendiri (berdasarkan: IISS, 2020)

2.1.3 Program Kekuatan Pokok Minimum

Berkaca pada postur pertahanan nasional yang belum pada posisi ideal, Pemerintah Indonesia dalam masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginisiasi program pembangunan postur pertahanan. Program pembangunan postur pertahanan ini kemudian

dikenal dengan sebutan Kekuatan Pokok Minimum (KPM). Istilah KPM sendiri untuk pertama kalinya dikonseptualisasikan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid pertama, yakni Prof. Dr. Juwono Sudarsono pada tahun 2005 (Dzikri, 2016). Konsep KPM ini kemudian resmi diadopsi kedalam rencana pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan melalui *Strategic Defense Review* (SDR) tahun 2009. Posisi KPM sebagai bagian dari proses pembangunan nasional semakin diperkuat semenjak dikeluarkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 (Kementerian Pertahanan RI, 2012).

Sesuai dengan namanya, KPM sebagai bagian dari pembangunan nasionalnya khususnya dalam aspek pertahanan dan keamanan diarahkan untuk mencapai kondisi postur pertahanan minimal. KPM tidak dimaksudkan untuk mencapai kondisi postur pertahanan Indonesia yang ideal. Oleh karena itu KPM dapat dikatakan sebagai langkah awal dari proses pembangunan postur pertahanan Indonesia. Melalui program KPM ini pembangunan postur pertahanan Indonesia tidak diarahkan dalam aspek perlombaan persenjataan maupun strategi pembangunan kekuatan untuk memenangkan perang total. KPM sebagai upaya pembangunan postur pertahanan lebih menekankan pada pembentukan kekuatan pokok yang memberikan daya tangkal. Oleh karena itu melalui KPM postur pertahanan Indonesia diharapkan dapat mengatasi ancaman aktual sebagai prioritas utama serta ancaman potensial (Kementerian Pertahanan RI, 2012).

KPM sebagai upaya pembangunan postur pertahanan minimum dalam prosesnya akan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah perencanaan pembangunan kekuatan yang didasarkan pada kemampuan negara atau kemandirian (*Capability Based Planning*), perencanaan berdasarkan prediksi ancaman yang dihadapi (*Threat Based Planning*), dengan tetap mempertimbangkan kapasitas ekonomi serta kehadiran efek penggantar dalam perwujudan *confidence building measures* (CBMs) (Kementerian Pertahanan RI, 2012).

Merujuk pada Peraturan Menteri Pertahanan No. 19 Tahun 2012 tentang kebijakan penyelarasan KPM, maka implementasi KPM akan terbagi kedalam tiga rencana strategis (Renstra). Renstra pertama dijalankan pada rentang tahun 2010 hingga 2014 dan kemudian

dilanjutkan Renstra kedua hingga tahun 2019. Renstra ketiga sebagai renstra terakhir akan dimulai pada tahun 2019 hingga 2024 (Collin, 2015; Kementerian Pertahanan RI, 2012). Selain terbagi kedalam tiga renstra, dalam pelaksanaannya KPM akan diimplementasikan melalui empat strategi yakni: rematerialisasi (pemenuhan DSPP Personel dan materiil satuan TNI menuju 100%), revitalisasi (peningkatan strata satuan dan materiil sesuai dengan perkembangan ancaman), relokasi (pengalihan kekuatan ke wilayah *flash point*) dan pengadaan (pembangunan satuan baru serta akuisisi alutsista) (Kementerian Pertahanan RI, 2012).

Sesuai dengan empat strategi implementasi KPM maka dapat dipahami bahwasanya melalui program KPM ini Pemerintah Indonesia akan melakukan modernisasi persenjataan TNI. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, sistem persenjataan atau alutsista TNI pada saat KPM diinisiasikan tidak dalam kondisi yang ideal. Mayoritas alutsista TNI merupakan alutsista yang sudah uzur dengan usia pakai lebih dari 25 tahun (Dzikri, 2016; Laksmana, 2018; Widjajanto et al., 2012). Modernisasi alutsista TNI melalui program KPM dilakukan dalam ketiga matra TNI dengan target yang berbeda sesuai dengan kebutuhan.

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan modernisasi alutsista TNI Angkatan Laut (TNI AL) ditujukan untuk mewujudkan TNI AL yang berstatus *green water navy* serta membentuk Sistem Armada Terpadu pada tahun 2024 (Collin, 2015; Dzikri, 2016; Widjajanto et al., 2012). Alutsista-alutsista yang direncanakan untuk diakuisisi oleh TNI AL bervariasi yang terdiri dari armada kapal selam, armada kapal tempur kelas *frigate*, kapal patrol hingga pesawat serta helikopter. Dalam kategori kekuatan tempur pemukur hingga tahun 2024 TNI AL ditargetkan diantaranya memiliki 12 armada kapal selam dan 56 kapal tempur kelas *frigate*. Dalam kategori kekuatan patrol ditargetkan memiliki 66 kapal patroli. TNI AL juga ditargetkan memiliki 98 kapal atau armada dalam kategori kekuatan pendukung, diantaranya adalah 18 kapal penyapu ranjau, 45 kapal *Landing Platform Dock* serta 6 kapal tanker (Collin, 2015; Supandi, 2015).

Dalam konteks TNI Angkatan Udara (TNI AU), melalui program KPM diharapkan akan memiliki 10 skuadron pesawat tempur. Selain melakukan akuisisi pesawat tempur untuk memperkuat skuadron tempur, TNI AU juga akan melakukan modernisasi pesawat latih,

pesawat angkut, pesawat terbang tanpa awak, sistem radar hingga sistem pertahanan udara jarak pendek (Kementerian Pertahanan Indonesia, 2015; Widjajanto et al., 2012). TNI Angkatan Darat (TNI AD) tentunya juga tidak luput dari implementasi KPM. TNI AD melalui program KPM akan melakukan akuisisi terhadap berbagai jenis alutsista utama darat. Tank tempur utama (MBT), APC, kendaraan *recce* dan *medium battle tank* (Kementerian Pertahanan Indonesia, 2015; Widjajanto et al., 2012).

Sebagai upaya membangun postur pertahanan melalui KPM Pemerintah Indonesia menyadari perlunya dana atau anggaran yang cukup. Oleh karena itu sejak tahun 2009 – 2020 anggaran pertahanan Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Jika pada tahun 2009 anggaran pertahanan Indonesia adalah sebesar 33.7 Triliun Rupiah maka pada tahun 2020 anggaran pertahanan Indonesia mencapai 127 Triliun Rupiah. Meskipun anggaran tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk belanja alutsista, peningkatan nilai anggaran tersebut turut meningkatkan alokasi anggaran untuk belanja alutsista. Grafik 2.1 dibawah ini akan menunjukkan tren peningkatan anggaran pertahanan Indonesia periode 2009 – 2020.



Grafik 2.1: Anggaran Pertahanan Indonesia 2009 - 2020

Sumber: Olahan sendiri (berdasarkan: SIPRI, 2020)

Dalam upaya mewujudkan target program KPM tidak serta merta dilakukan dengan melakukan akuisisi terhadap alutsista produksi negara lain. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pertahanan No. 19 Tahun 2012, pemenuhan kebutuhan Alutsista wajib

mengutamakan produk industri pertahanan nasional. Industri pertahanan nasional sendiri merupakan bagian dari pilar pertahanan negara bersama dengan profesionalisme TNI serta kemampuan ekonomi nasional. Pemberdayaan industri pertahanan nasional dimaksudkan juga untuk mewujudkan kemandirian pertahanan.

2.2 Visi Kemandirian Pertahanan dan Industri Pertahanan Indonesia

2.2.1 Visi Kemandirian Pertahanan Indonesia

Kemandirian pertahanan pada dasarnya merupakan hal yang sangat sulit dicapai. Kesulitan realisasi kemandirian pertahanan ini tidak hanya dirasakan oleh negara-negara berkembang, melainkan juga negara maju. Demi mewujudkan kemandirian pertahanan yang utuh tidak hanya membutuhkan sumber daya ekonomi yang besar, melainkan juga sumber daya manusia berkualitas hingga kemampuan infrastruktur dan penguasaan teknologi oleh negara tersebut (Boutin, 2009). Namun meskipun begitu berbagai negara di dunia memiliki keinginan atau visi mencapai kemandirian pertahanan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki visi kemandirian pertahanan tersebut.

Indonesia pada dasarnya telah memiliki sejarah yang cukup panjang terkait visi kemandirian pertahanan dan urgensi pengembangan industri pertahanan nasional, bahkan sejak era Orde Lama. Pada era Orde Lama visi kemandirian pertahanan dapat terlihat dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 19 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1958. Kedua produk hukum negara tersebut menjadi landasan bagi dilakukannya proses nasionalisasi industri pertahanan yang sebelumnya dimiliki asing di Indonesia (Karim, 2014).

Upaya pembinaan industri pertahanan nasional sebagai upaya mencapai visi kemandirian pertahanan tentunya tidak berhenti ketika nasionalisasi terjadi. Pemerintah Indonesia pada era Orde Baru kemudian memutuskan untuk membentuk suatu badan yang bertugas untuk mengkonsolidasikan dan mengelola industri pertahanan nasional. Badan yang dibentuk tersebut dinamakan dengan Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS). BPIS didirikan melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 59 tahun 1989 (Karim, 2014; KKIP, n.d.). Melalui kehadiran BPIS ini lah kemudian industri pertahanan nasional mampu

berkonsolidasi dan mencapai perkembangan cukup signifikan. Oleh karena itu ketika dekade 1980 ini industri pertahanan nasional dianggap berada pada masa kejayaannya (KKIP, n.d.).

Visi kemandirian pertahanan yang berupaya diwujudkan Pemerintah Indonesia pada era Orde Baru juga tidak bisa terlepas dari kehadiran dan kepemimpinan B. J. Habibie. B.J. Habibie pernah menangani tiga industri pertahanan nasional, yakni PT. Pindad, PAL dan PT. DI. B.J. Habibie ketika itu menggaungkan betapa pentingnya Indonesia menguasai teknologi yang termasuk didalamnya teknologi persenjataan. Bagi Habibie kemampuan bangsa Indonesia menguasai teknologi juga menjadi cara membangun ekonomi negara (Karim, 2014; Widjajanto et al., 2012). Bahkan B.J. Habibie ketika itu menegaskan targetnya bahwa pada tahun 2015 Indonesia pada level tertentu akan mampu memproduksi secara mandiri (RSIS Indonesia Programme, 2013).

Visi kemandirian pertahanan Indonesia melalui pembinaan dan pengembangan industri pertahanan nasional semakin terlihat didalam rencana induk pengembangan industri pertahanan. Sesuai dengan rencana induk tersebut maka diketahui bahwasanya pengembangan industri pertahanan nasional akan dilaksanakan dalam tiga fase serta berdampingan dengan program KPM. Pada fase pertama, pengembangan industri pertahanan nasional didominasi pada aspek fundamental. Fase pertama ini akan dilaksanakan penetapan program, penyiapan regulasi terkait industri pertahanan nasional, stabilisasi dan optimalisasi industri pertahanan hingga penyiapan alutsista masa depan. Penyiapan alutsista masa depan ini diarahkan untuk mendukung program KPM (Karim, 2014; KKIP, 2014).

Pada fase kedua yang terjadi pada periode 2015-2019, pengembangan industri pertahanan nasional masih diarahkan untuk memenuhi KPM. Namun pada fase ini industri pertahanan nasional juga sudah mulai mempersiapkan diri untuk mampu mendukung postur pertahanan ideal. Pada fase kedua ini industri pertahanan nasional akan didorong untuk meningkatkan kerja sama internasional demi memperoleh kemampuan memproduksi alutsista baru. Pada fase ketiga, yakni pada rentang tahun 2020-2024 industri pertahanan nasional diharapkan sudah mampu mencapai level kemandirian industri. Industri pertahanan nasional didorong untuk mampu memproduksi alutsista berteknologi tinggi melalui kerja

sama internasional. Selain itu industri pertahanan nasional juga mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan (Karim, 2014; KKIP, 2014).



Gambar 2.1: Rencana Induk Pengembangan Industri Pertahanan
Sumber: (KKIP, 2014)

2.2.2 Industri Pertahanan Indonesia

Istilah industri pertahanan sesungguhnya merupakan istilah yang tidak terlalu populer atau berakar kuat di Indonesia. Istilah industri pertahanan baru mulai dikenal dan digunakan semenjak disahkannya UU No, 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan. Sebelumnya istilah yang sering digunakan adalah Industri Strategis Pertahanan (Widjajanto et al., 2012). Istilah industri pertahanan memiliki definisi industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia, 2012).

Industri pertahanan nasional yang dikenal saat ini banyak yang berakar dari industri pertahanan atau industri strategis yang didirikan Pemerintahan kolonial Belanda. Sesuai

dengan kesepakatan yang dicapai dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), Pemerintah Belanda harus menyerahkan asset-asetnya secara bertahap (Karim, 2014). Industri pertahanan nasional yang dikenal saat ini yakni PT. Pindad, PT. Dirgantara Indonesia (DI) dan PT. PAL adalah transformasi dari industri strategis Pemerintahan kolonial Belanda (Karim, 2014; Widjajanto et al., 2012).

PT. PAL sebagai industri pertahanan nasional pada sektor maritim merupakan transformasi dari *Marine Establishment* (ME). ME yang secara resmi didirikan pada tahun 1912 bersumber dari gagasan Gubernur Jenderal Van der Capellen pada tahun 1822. ME kemudian di nasionalisasi pada tahun 1949 dan diberi nama Penataran Angkatan Laut (PAL) (Karim, 2014; Widjajanto et al., 2012). PAL kemudian pada tahun 1962 dijadikan bagian dari industri berat TNI AL dan kemudian pada tahun 1963 berganti nama menjadi Komando Penataran Angkatan Laut (Konatal). Konatal ini kemudian berubah nama menjadi Perusahaan Umum (Perum) PAL pada tahun 1978 dan kemudian menjadi PT. PAL pada tahun 1980 (Karim, 2014).

Alur yang sama juga terjadi pada PT. DI dan PT. Pindad. Keduanya merupakan transformasi dari industri strategis Pemerintahan kolonial Belanda. PT. DI bermula dari didirikannya Bagian Uji Terbang pada tahun 1914. Kemudian pada tahun 1961 Pemerintah Indonesia meresmikan pendirian Lembaga Persiapan Industri Penerbangan (Lapip). Setelah mengalami beberapa kali perubahan nama – termasuk menjadi PT. IPTN – barulah pada tahun 2000 Pemerintahan Abdurrahman Wahid meresmikan nama PT. DI (Karim, 2014). Sedangkan bagi PT. Pindad, sejarah bermula pada tahun 1808 dengan dibentuknya *Artillerie Constructie Winkel* (ACW) serta nasionalisasinya yang diberi nama Pabrik Senjata dan Mesiu (PSM) pada 1950 (Karim, 2014; Widjajanto et al., 2012). Industri pertahanan nasional yang saat ini beroperasi di Indonesia tidak hanya terdiri dari tiga industri tersebut. Saat ini terdapat total terdapat 141 industri pertahanan baik milik negara maupun swasta (Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan RI, 2021). Dalam perjalanannya industri-industri pertahanan nasional dihadapkan pada dinamika positif maupun negatif.

Dinamika positif yang dimaksud dialami oleh industri pertahanan nasional adalah keberhasilan memproduksi beberapa jenis Alutsista. Keberhasilan industri pertahanan

nasional memproduksi beberapa jenis Alutsista ini terjadi semenjak rezim Orde Baru. Sosok B.J. Habibie menjadi salah satu tokoh yang sangat berperan mendorong industri pertahanan nasional mampu memproduksi berbagai jenis Alutsista (Karim, 2014; Widjajanto et al., 2012). Habibie merupakan sosok yang berada dibalik keberhasilan PT. PAL memproduksi kapal patroli cepat 57M (FPB-57) maupun keberhasilan IPTN memproduksi N250 (Karim, 2014; Muradi, 2016).

Perkembangan industri pertahanan nasional melalui kemampuan memproduksi beberapa jenis Alutsista maupun Alpanhankam bukan berarti industri pertahanan nasional tidak pernah menemui permasalahan. Industri pertahanan nasional yang sedang berkembang pada dekade 1990 menjadi salah satu sektor industri yang sangat terdampak krisis keuangan tahun 1998. Hal ini terkait dengan persyaratan yang diajukan International Monetary Fund (IMF) sebelum menyetujui pemberian bantuan kepada Indonesia untuk menghadapi krisis (Karim, 2014; Widjajanto et al., 2012). Perkembangan-perkembangan industri pertahanan nasional pada era Orde Baru dispekulasikan berasal dari pendanaan menggunakan dana *non-budgeter*, ketika IMF bersedia memberikan paket bantuan kepada Indonesia maka pendanaan melalui dana *non-budgeter* harus dihentikan. Penghentian pendanaan tersebut mengakibatkan industri pertahanan nasional limbung dan terpaksa menghentikan program penelitian dan pengembangan (litbang) maupun produksi. Sebagai contohnya adalah pesawat N250 serta N2130 yang dikembangkan IPTN (Widjajanto et al., 2012). Selain itu PT. Dua Satu Tiga Puluh (DTSP) yang didirikan untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui penjualan 2 juta lembar saham untuk kemudian digunakan mendanai pengembangan N2130 juga harus dilikuidasi pada tahun 1998 (Karim, 2014; Widjajanto et al., 2012).

Terhentinya pendanaan terhadap proyek-proyek strategis industri pertahanan nasional tidak hanya mengakibatkan terhentinya proses litbang dan produksi. Permasalahan lain yang ditimbulkan adalah terjadinya *brain drain* di dalam industri pertahanan nasional. *Brain drain* ini terjadi setelah banyak pegawai di industri-industri pertahanan nasional yang di PHK dan memilih bekerja di luar negeri. Sebagai contohnya adalah harus dilakukannya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 16.000 karyawan IPTN (Kompas.com, 2015). Karyawan-karyawan yang dipecat tersebut sebagian besar adalah mereka yang terlibat dalam

proses pengembangan N250 serta N2130. Setelah mengalami PHK tersebut cukup banyak yang kemudian bekerja di perusahaan-perusahaan internasional seperti Boeing dan Airbus (Detik.com, 2014c; Kompas.com, 2015; Sindonews.com, 2017). IPTN yang kemudian berganti nama menjadi PT. DI pun sempat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pada tahun 2007 walaupun akhirnya keputusan tersebut dibatalkan (Detik.com, 2014c).

2.2.3 Pembentukan KKIP dan Kelahiran Undang-Undang Industri Pertahanan

Kondisi industri pertahanan nasional yang mengalami masa-masa sulit di penghujung rezim Orde Baru hingga medio akhir dekade 2000 kembali diupayakan untuk bangkit. Upaya membangkitkan industri pertahanan nasional ini terlihat dari perhatian Pemerintah terhadap industri pertahanan nasional kembali menguat. Setidaknya terdapat dua hal yang mengindikasikan perhatian serta komitmen pemerintah terhadap industri pertahanan nasional, yakni pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dan kelahiran UU No. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

KKIP dibentuk berdasarkan peraturan presiden (Perpres) No. 42 tahun 2010. Melalui Perpres tersebut KKIP merupakan badan yang diberi tugas untuk mengkoordinasikan perumusan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan strategis nasional industri pertahanan. Kebijakan strategis industri pertahanan yang dimaksud tersebut adalah kebijakan yang meliputi kegiatan litbang, pendanaan, strategi pemasaran, pembinaan, pemberdayaan, peningkatan kualitas SDM hingga kerja sama internasional industri pertahanan (Peraturan Presiden No. 42, 2010). Kehadiran KKIP yang diketuai oleh Presiden serta Menteri Pertahanan sebagai ketua harian juga bertujuan untuk melakukan revitalisasi industri pertahanan agar mampu memenuhi kebutuhan nasional dan melakukan ekspor.

Komitmen pemerintah terhadap industri pertahanan nasional semakin terlihat setelah dirumuskannya UU Industri Pertahanan. UU Industri Pertahanan yang disahkan pada tahun 2012 ini menegaskan komitmen Pemerintah agar industri pertahanan nasional terus berkembang dengan menciptakan ekosistem yang mendukung. Selain itu UU Industri Pertahanan juga memperkuat peranan KKIP. Perkembangan industri pertahanan nasional

ditujukan untuk mewujudkan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan Alutsista yang efisien, modern dan berteknologi tinggi (Widjajanto et al., 2012). Melalui UU Industri Pertahanan ini terlihat bahwasanya industri pertahanan nasional menjadi prioritas dalam proses akuisisi Alutsista maupun Alpanhankam. Secara eksplisit UU Industri Pertahanan mewajibkan penggunaan Alutsista dan Alpanhankam hasil produksi dalam negeri. Tidak hanya itu, pemeliharaan dan perbaikan Alutsista dan Alpanhankam juga diwajibkan dilakukan oleh industri pertahanan nasional (Pemerintah Republik Indonesia, 2012).

Namun adanya kewajiban membeli produk Alutsista atau Alpanhankam produk industri pertahanan nasional bukan berarti Pemerintah menutup pintu akuisisi produk industri pertahanan luar negeri. UU Industri Pertahanan tetap membuka ruang impor Alutsista maupun Alpanhankam asalkan memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut diantaranya adalah jika produk tersebut belum bisa diproduksi industri pertahanan nasional, kewajiban alih teknologi, kewajiban melibatkan industri pertahanan nasional, imbal dagang atau offset minimal 85%. Selain memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut pembelian produk industri pertahanan produk luar negeri harus diusulkan kepada KKIP terlebih dahulu (Pemerintah Republik Indonesia, 2012).

Upaya menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan industri pertahanan nasional tidak hanya terlihat dari kewajiban menggunakan produk industri pertahanan nasional. UU Industri Pertahanan juga secara eksplisit menunjukkan peluang diberikannya insentif fiskal kepada industri pertahanan nasional. Selain itu pemerintah juga dimungkinkan melakukan penyertaan modal yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas produksi industri pertahanan milik negara. Selain itu, pemerintah juga akan ikut membantu pemasaran produk Alutsista maupun Alpanhankam yang diproduksi industri pertahanan nasional. Bantuan pemasaran keluar negeri ini dilakukan secara berkesinambungan dan berjangka panjang. Pemerintah juga dimungkinkan memberikan kaminan kepada perbankan yang mendukung pembiayaan industri pertahanan nasional (Pemerintah Republik Indonesia, 2012).

Pemerintah melalui UU Industri Pertahanan juga telah menyiapkan strategi peningkatan kapasitas industri pertahanan nasional lain. Strategi tersebut adalah melalui jalinan kerja sama industri pertahanan. Kerja sama industri pertahanan yang dimaksud adalah

industri pertahanan dalam negeri maupun luar negeri. Kerja sama industri pertahanan dilakukan melalui beberapa cara seperti pendidikan, pelatihan, alih teknologi hingga litbang dan pemasaran. Khusus kerja sama industri pertahanan dengan mitra luar negeri juga diarahkan untuk percepatan peningkatan penguasaan teknologi serta *burden sharing* dalam pembiayaan pengembangan Alutsista maupun Alpanhankam. Kerja sama yang dilakukan dengan mitra dari luar negeri dilakukan setelah mendapat persetujuan dari KKIP (Pemerintah Republik Indonesia, 2012).

2.2.4 Kerja sama Internasional Industri Pertahanan Indonesia

Kerja sama industri pertahanan merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh negara-negara di dunia. Kerja sama industri pertahanan pernah dilakukan oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat maupun negara Uni Eropa. Sebagai contohnya Amerika Serikat tercatat melakukan kerja sama dengan berbagai negara di dunia dalam proyek pengembangan jet tempur generasi ke-5 yang dikenal dengan F-35 Joint Strike Fighters atau negara-negara Eropa dalam proyek Eurofighter Typhoon (Hartley, 2011; Ringsmose, 2012). Selain negara-negara maju, negara-negara berkembang atau negara yang sedang membangun kapasitas industri pertahanan dalam negeri seperti Indonesia juga kerap melakukan kerja sama industri pertahanan.

Kerja sama industri pertahanan yang dilakukan Indonesia dengan negara lain tercatat telah dimulai semenjak dekade 1970. Ketika itu industri pertahanan nasional Indonesia didorong untuk mampu memproduksi alutsista melalui skema kerja sama dengan industri pertahanan asing yang sudah berpengalaman. Kerja sama-kerja sama yang dijalin ketika itu dilaksanakan melalui berbagai skema seperti pemberian lisensi, produksi bersama (*joint production*) hingga pengembangan bersama (Karim, 2014; Muradi, 2016). Sebagai contohnya adalah ketika IPTN mampu memproduksi helikopter tempur ringan seperti NBO-105 serta NBell 412 melalui skema lisensi (Bitzinger, 2013; Karim, 2014). Kerja sama industri pertahanan dalam bentuk pengembangan bersama juga terjadi antara IPTN dengan CASA hingga menghasilkan pesawat CN-235 (Dirgantara Indonesia, n.d.-a; Karim, 2014; Suryowati, 2014). PT. PAL pada rentang tahun tersebut juga telah mampu memproduksi kapal patroli cepat. Ketika itu PT. PAL melalui skema pembelian lisensi dari Friedrich

Luerssen Wieft (FLW) mampu memproduksi kapal patrol cepat 57M (FPB 57) serta lisensi produksi kapal patrol cepat 28M (FPB 28) dari *Belgium Shipbuilding Company* (Karim, 2014).

Setelah Indonesia dihantam krisis ekonomi pada tahun 1998 yang sering dianggap sebagai salah satu momen kelam industri pertahanan nasional, mekanisme kerja sama internasional masih sering dilakukan. Indonesia hingga saat ini tercatat melakukan kerjasama industri pertahanan dengan berbagai negara di dunia. Negara-negara mitra kerja sama industri pertahanan yang dijalankan Indonesia diantaranya adalah Korea Selatan, China, Belanda hingga Turki.

Kerja sama industri pertahanan antara Indonesia dengan Korea Selatan sebagai contohnya terjalin dalam tiga program. Pertama, kerja sama antara PT. PAL dengan *Daewoo International Company* dalam melakukan produksi terhadap kapal jenis *Landing Platform Dock* (Muradi, 2016). Kedua, kerja sama yang terjalin antara PT. PAL dengan Daewoo melalui kerja sama *transfer of technology* kapal selam U-209/1400 atau yang dikenal dengan kapal selam kelas nagapasa (Al-fadhat & Effendi, 2019; Sandi, 2020). Melalui kesepakatan *transfer of technology* tersebut ahli-ahli PT. PAL ikut terlibat dalam proses produksi. Bahkan pada pembuatan kapal selam pesanan Indonesia yang ke-3, proses pembuatannya akan dilakukan oleh PT. PAL di Surabaya (Al-fadhat & Effendi, 2019). Selain melalui program pembuatan kapal selam, kerja sama antara Indonesia dengan Korea Selatan juga terjalin dalam program pengembangan bersama jet tempur KF-X/IF-X. Kesepakatan kerja sama pengembangan bersama ini ditandatangani pada tahun 2010. Berdasarkan kesepakatan awal, dalam program pengembangan jet tempur KF-X/IF-X ini Indonesia akan menanggung 20% dari total biaya (Al-fadhat & Effendi, 2019; Armandha et al., 2015). Namun pada saat ini sedang terjadi proses renegotiasi antara Pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan terkait biaya yang harus Indonesia keluarkan.

Selain Korea Selatan, Indonesia juga menjalin kerja sama industri pertahanan dengan Belanda. Kerja sama yang terjalin antara Indonesia dengan Belanda ini dilaksanakan setidaknya dalam dua program *transfer of technology* dan *joint production*. Pertama adalah kesepakatan melakukan *joint production* kapal korvet Sigma yang ditandatangani pada tahun

2003. Kerja sama ini kemudian dikenal dengan program korvet nasional. Namun sayangnya karena keterbatasan anggaran maupun sumber daya manusia, program joint production ini tidak terlaksana. Seluruh kapal diproduksi oleh Damen Schelde Naval Shipbuilding (Muradi, 2016).

Kerja sama industri pertahanan kedua antara Indonesia dengan Belanda adalah program *joint production* kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) Sigma 10514. Kerja sama ini kembali terjalin antara PT. Pal dengan Damen Schelde Naval Shipbuilding. Melalui kerja sama ini PT. Pal akan terlibat langsung dalam pengerjaan modul-modul kapal PKR Sigma 10514 ini. Pada kapal PKR Sigma 10514 pertama, dari keseluruhan 6 modul, PT. Pal akan bertugas mengerjakan modul 3 dan 5. Sedangkan pada kapal PKR Sigma 10514 kedua, PT. Pal akan mengerjakan modul 1,2,3,4 dan 6 (Kementerian Pertahanan Indonesia, 2016). Indonesia juga memiliki kesepakatan kerja sama industri pertahanan dengan negara lain seperti China dan Belgia. Kerja sama industri pertahanan antara Indonesia dengan China terjalin dalam proses *transfer of technology* rudal C-705 (Ambarwati et al., 2019).

2.3 Kerja sama Pengembangan Medium Battle Tank Harimau

2.3.1 Kerja sama Industri Pertahanan Indonesia – Turki

Hubungan bilateral yang telah terjalin sejak lama dan baik antara Indonesia dan Turki dalam perkembangannya turut menyentuh aspek industri pertahanan. Kerja sama antara kedua negara dalam aspek industri pertahanan ditandai dengan penandatanganan dokumen kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Turki. Dokumen kesepakatan kerja sama industri pertahanan ini merupakan salah satu hasil dari kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Turki pada tahun 2010. Pada kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama delegasi Menteri ke Turki pada bulan Juni 2010 tersebut secara keseluruhan terdapat lima MoU, dua kesepakatan serta 1 program yang ditandatangani (Detik.com, 2010).

Penandatanganan kesepakatan kerja sama bidang industri pertahanan ini ditandatangani langsung oleh Menteri Pertahanan Indonesia serta Menteri Pertahanan Turki. Penandatanganan dokumen kesepakatan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden SBY

dan Presiden Abdullah Gul. Terdapat beberapa poin penting yang terdapat didalam kesepakatan kerja sama industri pertahanan Indonesia dan Turki. Poin tersebut diantaranya adalah:

1. penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan bagi ruang lingkup teknis hal penelitian bersama, pengembangan, produksi dan proyek modernisasi, bantuan timbal balik dalam bidang produksi dan pengadaan produk industri dan jasa pertahanan, penjualan produk akhir, pertukaran informasi ilmiah dan teknis, partisipasi dalam pameran industri pertahanan dan simposium, serta penjualan atau pembelian yang saling menguntungkan
2. Pembentukan Komite Bersama dalam kerja sama industri pertahanan.
3. Kewajiban untuk saling melindungi hak kekayaan intelektual, informasi, dokumen, dan bahan-bahan yang bersifat rahasia.
4. Komitmen Para Pihak untuk mengedepankan kepentingan, keamanan, dan integritas masing-masing negara.
5. Penyelesaian sengketa dilakukan secara damai melalui negosiasi Para Pihak dalam Komite Bersama serta tidak membawa setiap sengketa yang timbul ke pengadilan internasional dan apabila diperlukan akan diselesaikan melalui saluran diplomatik. (UU No. 19 tahun 2014 Tentang Pengesahan Persetujuan Kerja sama Industri Pertahanan Indonesia - Turki, 2014)

Sebagai tindaklanjut dan bukti komitmen kedua negara, berbagai bentuk tindaklanjut kesepakatan kerja sama industri pertahanan telah dilakukan. Sebagai contohnya adalah Presiden Abdullah Gul yang melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada tanggal 4-6 April 2011. Dalam kunjungannya ke Indonesia tersebut disepakati protokol turunan kerja sama industri pertahanan (Amrullah, 2016; DPR RI, 2011). Selain itu Kesepakatan kerja sama industri pertahanan antara Indonesia dengan Turki yang ditandatangani tahun 2010 ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

DPR RI khususnya komisi I memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja ke Turki tidak lama setelah kedatangan Presiden Abdullah Gul ke Indonesia. Delegasi komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja selama enam hari ke Turki, yakni sejak 17 – 22 April 2011.

Dalam kunjungannya delegasi komisi I DPR RI melakukan pertemuan dengan Presiden Abdullah Gul, Wakil Menteri Pertahanan Turki. Kunjungan kerja komisi I DPR RI ke Turki ini dapat dikatakan memfokuskan perhatiannya kepada industri pertahanan Turki. Hal ini dikarenakan delegasi komisi I DPR RI juga melakukan kunjungan dan pertemuan dengan industri pertahanan Turki seperti Turkish Aerospace Industry (T.A.I), Aselsan, Roketsan, MKEK dan FNSS (DPR RI, 2011).

Dalam kunjungan kerja delegasi komisi I DPR RI ke Turki tersebut diperoleh beberapa informasi terkait kerja sama industri pertahanan kedua negara. Informasi-informasi tersebut sekaligus menunjukkan sinyal komitmen kedua negara dalam melakukan kerja sama industri pertahanan. Wakil Menteri Pertahanan Turki menyatakan bahwa ia akan segera menginstruksikan industri-industri pertahanan Turki untuk datang ke Indonesia dan bertemu dengan industri pertahanan nasional Indonesia. Selain itu Wakil Menteri Pertahanan Turki juga mengundang delegasi industri pertahanan nasional Indonesia datang ke Turki untuk membahas pelaksanaan kerja sama industri pertahanan (DPR RI, 2011).

Selain melakukan kunjungan kerja delegasi komisi I ke Turki pada tahun 2011, DPR RI juga telah melakukan tindak lanjut lain terkait kesepakatan kerja sama industri pertahanan. Tindak lanjut yang dilakukan DPR tersebut adalah dengan meratifikasi kesepakatan tersebut. Pada tahun 2014 DPR Republik Indonesia mensahkan UU. No. 19 Tahun 2014 tentang pengesahan persetujuan kerja sama industri pertahanan Indonesia – Turki (UU No. 19 tahun 2014 Tentang Pengesahan Persetujuan Kerja sama Industri Pertahanan Indonesia - Turki, 2014). Ratifikasi ini memperkuat kekuatan hukum kerja sama industri pertahanan Indonesia dengan Turki.

Selain ditindaklanjuti oleh DPR RI, kesepakatan kerja sama industri pertahanan Indonesia dengan Turki juga telah ditindaklanjuti oleh industri pertahanan kedua negara. Beberapa kesepakatan kerja sama telah dicapai oleh industri pertahanan Indonesia dan Turki. PT. Len, PT. DI dan PT. Pindad merupakan tiga industri pertahanan nasional Indonesia yang telah memiliki perjanjian kerja sama dengan industri pertahanan Turki (Luerdi & Marisa, 2019).

PT. Len bekerja sama dengan industri pertahanan Turki yang bernama Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticare A.Ş (Aselsan). Bahkan kedua industri pertahanan tersebut sudah dua kali melakukan kerja sama. Kerja sama pertama antara PT. Len dengan Aselsan disepakati pada tahun 2013. Melalui kesepakatan tersebut PT. Len dan Aselsan akan bekerjasama melalui skema produksi bersama (*joint production*) alat komunikasi radio perbatasan. Program kerja sama ini telah selesai pada tahun 2014. Selesaiannya program kerja sama tersebut ditandai dengan telah dioperasionalkannya 40 radio militer yang disebar di 36 lokasi di perbatasan Indonesia – Malaysia (Amrullah, 2016; PT. Len, 2017).

Setelah keberhasilan program kerja sama sebelumnya, PT. Len dan Aselsan Turki kembali menyepakati kerja sama lainnya. Kerja sama kedua antar dua industri pertahanan tersebut disepakati pada tahun 2017. Kerja sama yang disepakati pada tahun 2017 ini ditandatangani langsung oleh Direktur Utama PT. Len serta President sekaligus CEO Aselsan dan disaksikan oleh Menteri Perdagangan Indonesia. Dalam kerja sama kali ini PT. Len dan Aselsan akan kembali melakukan produksi bersama (*joint production*) peralatan komunikasi untuk HF dan V/UHF teknologi *Software Defined Radio* (SDR). Peralatan komunikasi akan diproduksi dalam varian yang berbeda seperti tipe *manpack*, *vehicular* serta *Fix station* (Luerdi & Marisa, 2019; PT. Len, 2017).

PT. DI sebagai industri pertahanan nasional yang berfokus pada kedingrintaraan juga memiliki kerjasama industri pertahanan dengan industri pertahanan Turki. PT. DI telah menandatangani MoU kerja sama dengan T.A.I pada tahun 2017 tepatnya pada gelaran IDEF 2017 Fair di Istanbul. Berdasarkan MoU tersebut PT. DI dan T.A.I akan melakukan kerjasama dalam beberapa hal. Pertama, peningkatan serta pengembangan avionik dan sayap pesawat CN-235. Kedua, kerja sama dalam proses pengembangan, sertifikasi hingga produksi dan pemasaran N245 serta N219. Ketiga, pengembangan pesawat udara nir awak (PUNA) dengan tipe *Medium Altitude Long Endurance* (MALE) (Budianto, 2018; Luerdi & Marisa, 2019; Nupus, 2018).

Sedangkan bagi PT. Pindad, kerja sama dengan industri pertahanan asal Turki dilakukan dalam dua program yang berbeda. Program pertama adalah kerja sama yang dijalin antara PT. Pindad dengan *Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu* (MKEK). Kerja sama ini

terjalin sejak ditandatanganinya MoU pada tahun 2017 di Abu Dhabi. Penandatanganan MoU ini disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan Indonesia. Melalui kerja sama tersebut PT. Pindad dan MKEK akan bekerja sama dalam memproduksi amunisi serta senjata laras panjang (Kementerian Pertahanan Indonesia, 2017; Luerdi & Marisa, 2019). Sedangkan program kerja sama PT. Pindad dengan industri pertahanan Turki lainnya adalah kerja sama dengan FNSS dalam pengembangan medium battle tank Harimau.

2.3.2 Kerja sama Pengembangan Medium Battle Tank Harimau

Salah satu bentuk kerja sama industri pertahanan antara Indonesia dan Turki adalah pengembangan medium *battle tank* Harimau. Program kerja sama pengembangan medium battle tank ini merupakan satu dari tujuh prioritas pengembangan industri pertahanan Indonesia (Kementerian Pertahanan Indonesia, 2015; PT. Pindad, 2017). Selain medium tank, program prioritas kemandirian pertahanan lainnya adalah Roket, Rudal, Radar, Kapal Selam, Industri Propelan dan Pesawat Tempur (Kementerian Pertahanan Indonesia, 2015)

Kerja sama Pengembangan Medium *battle tank* antara Indonesia dan Turki dimulai sejak penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara PT. Pindad dan FNSS. Dua industri pertahanan yang modalnya dimiliki oleh masing-masing negara memang menjadi pihak yang ditugaskan melakukan pengembangan *medium battle tank* oleh negaranya Masing-masing. PT. Pindad dan FNSS kemudian menandatangani MoU pengembangan bersama *medium battle tank* pada gelaran Indo Defence Expo & Forum 2014 (Stefani, 2014; Tempo.co, 2014). Namun meskipun MoU diantara PT. Pindad dan FNSS baru ditandatangani pada tahun 2014, embrio kerjasama pengembangan *tank* antara Indonesia dan Turki sudah sempat disepakati pada tahun 2013.

Dalam gelaran International Defense Industry Fair (IDEF) ke-11 yang diselenggarakan tahun 2013 di Istanbul, Turki delegasi Indonesia dan Turki telah menyepakati kerjasama pengembangan *tank*. Ketika itu Delegasi Pemerintah Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan yakni Pos Hutabarat. Pada kesempatan tersebut Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan menandatangani kesepakatan kerjasama pengembangan *tank* dan alat komunikasi. Namun kesepakatan yang terjadi di IDEF ke-11 ini belum spesifik menentukan kelas *tank* yang akan

dikembangkan. Ketika itu masih terdapat dua opsi kelas *tank* yang akan dikembangkan, yakni tank kelas ringan (*light tank*) dan tank kelas medium (*medium tank*) (Hakim, 2013; Y. M. P. Putra, 2013).

Setelah penandatanganan kesepakatan antara kedua negara tersebut sempat terucap lini masa pengembangan *tank* kerjasama Indonesia dan Turki. Pernyataan terkait *timeline* pengembangan *tank* terucap oleh Duta Besar Turki untuk Indonesia Zakeriya Akçam dan Asisten KKIP bidang kerjasama yang kemudian menjadi Direktur Utama Pindad, yakni Silmy Karim. Berdasarkan pernyataan kedua pihak tersebut diketahui bahwasanya *grand design* dari *tank* tersebut ditargetkan selesai pada akhir tahun 2013. Kemudian purwarupa atau *prototype tank* ditargetkan akan selesai pada tahun 2014 untuk diperkenalkan pada publik (Hakim, 2013; Viva, 2013). Namun pada kenyataannya tindak lanjut dari kerjasama tersebut tidak berjalan sebagaimana yang ditargetkan. Penandatanganan MoU lanjutan antara Indonesia dan Turki sebagaimana disebutkan sebelumnya baru terjadi pada tahun 2014.

Setelah menandatangani MoU lanjutan tersebut, TNI AD pada bulan Desember 2014 menyerahkan spesifikasi teknis *medium battle tank* yang akan dikembangkan. Spesifikasi teknis ini tertera dalam dokumen No. B/3184/XII/2014. Spesifikasi teknis yang diminta TNI AD dalam dokumen tersebut diantaranya adalah bobot *medium tank* yang berada pada rentang 20 – 40 ton, dapat dioperasikan oleh 3 orang hingga memiliki biaya perawatan yang rendah dan suku cadang yang mudah ditemukan. Permintaan spesifikasi teknis dari TNI AD ini kemudian yang menjadi dasar proses pengembangan oleh PT. Pindad dan FNSS. Sinkronisasi dengan kebutuhan yang diinginkan TNI AD ini penting dilakukan mengingat salah satu tujuan dari pengembangan *medium battle tank* adalah untuk modernisasi alutsista TNI AD dalam kerangka KPM. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, hanya 24.48% kendaraan tempur TNI AD yang siap operasional pada tahun 2012. Gambar 2.2 di bawah merupakan spesifikasi teknis umum yang diminta oleh TNI AD.

GENERAL

- ☐ Gross weight : 20 – 40 ton
- ☐ Length : ≤ 700 cm
- ☐ Width : ≤ 400 cm
- ☐ Height : ≤ 250 cm
- ☐ Ground Clearance : ≥ 40 cm
- ☐ Approach angle : $\geq 45^\circ$
- ☐ Departure angle : $\geq 40^\circ$
- ☐ Crew number : 3 (commander, gunner & driver)
- ☐ Driver position : Centre
- ☐ Powerpack position : Rear
- ☐ Ground pressure : ≤ 0.9 kg/cm²
- ☐ All components must comply with MIL-STD
- ☐ Equipped with air conditioning system for the crew compartment
- ☐ Easy to operate and maintain
- ☐ Low cost in maintenance with easily sourced spare parts
- ☐ Equipped with operational manual, maintenance manual and list of equipments

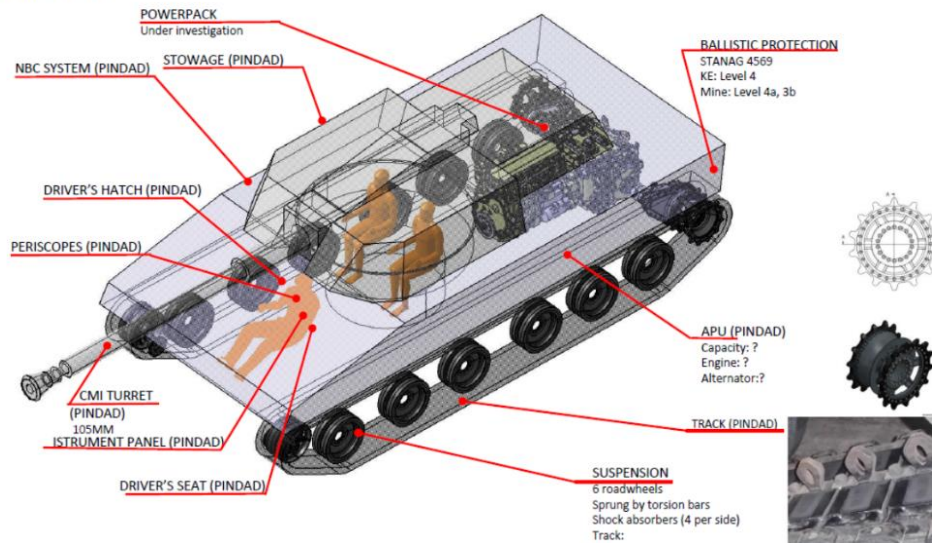
Gambar 2.2 Permintaan Spesifikasi Teknis *Medium Battle Tank*

Sumber: Presentasi Direktur Teknik dan Pengembangan PT. Pindad, 2021

Sebagaimana program pengembangan Alutsista lain maka diperlukan investasi yang cukup besar. Dalam aspek pendanaan, program pengembangan bersama *medium battle tank* Harimau ini disebutkan membutuhkan biaya kurang lebih sebesar 30 juta dollar Amerika Serikat atau 330 milyar Rupiah. Dana tersebut digunakan untuk proses pembuatan desain (Ventura, 2016). Selain itu dana tersebut juga dipergunakan untuk memproduksi dua unit prototype. Pendanaan tersebut akan dilakukan melalui mekanisme *joint venture*. Indonesia dan Turki akan sama-sama dibebankan biaya yang dibutuhkan dalam proses pengembangan (Amrullah, 2016).

Selain tercermin dengan pembagian biaya pengembangan bersama, proses kerjasama juga tercermin dengan dilibatkannya ahli-ahli PT. Pindad dalam proses pengembangan. Setidaknya terdapat 43 ahli PT. Pindad yang menjalani *on-the-job training* (OJT) di Turki. 43 ahli PT. Pindad yang menjalani OJT di Turki terbagi dalam dua gelombang. Gelombang I adalah OJT yang dilakukan saat proses pembuatan desain pada tahun 2015 yakni sebanyak 24 orang. Sedangkan gelombang kedua dilakukan pada pembuatan *prototype* I di tahun 2016 dengan jumlah 19 orang (Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan RI, 2018). Gambar 2.3 di bawah adalah desai awal (*preliminary design*) *medium battle tank* Harimau.

PRELIMINARY DESIGN



Gambar 2.3 Preliminary Design Medium Battle Tank Harimau

Sumber: Presentasi Direktur Teknik dan Pengembangan PT. Pindad, 2021

Dalam prosesnya, dalam melakukan penelitian dan pengembangan *medium battle tank* Harimau, PT. Pindad dan FNSS akan membaginya menjadi tiga tahapan. Sebagaimana program penelitian dan pengembangan pada umumnya, langkah atau tahap pertama yang akan dilalui adalah pembuatan desain (PT. Pindad, 2016). Proses pembuatan desain ini dilakukan bersama antara PT. Pindad dan FNSS. Hasil dari kerja sama pembuatan desain ini kemudian diperlihatkan pada gelaran *Indo Defence Expo dan Forum 2016* (PT. Pindad, 2016)

Keberhasilan menghasilkan desain *medium battle tank* tersebut sekaligus menandakan berakhirnya tahap pertama dalam proses pengembangan *medium battle tank*. Oleh karena itu, pengembangan *medium battle tank* memasuki tahapan kedua dalam prosesnya, yakni tahap pembuatan purwarupa atau *prototype*. Tahap ini kemudian menghasilkan satu unit *prototype* yang diperkenalkan satu tahun setelah pengenalan desain, yakni tahun 2017. Purwarupa pertama yang berhasil dibuat ini diperkenalkan pada gelaran *International Defense Industry Fair ke-13* pada tahun 2017 (Yildirim, 2017). Perkenalan atau *launching* untuk pertama kalinya *prototype medium battle tank* Harimau dalam perhelatan IDEF ke-13 tersebut dihadiri oleh beberapa *stakeholders* terkait, baik dari Indonesia maupun Turki. Pihak Indonesia diwakili oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik

Indonesia untuk Turki, Wardana serta Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Dr. Sutrimo Sumarlan. Sedangkan pihak Turki diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan Prof. Ismail Demir dan Direktur Utama FNSS, Nail Kurt (Defence Turkey, 2017).

Dirjen Potensi Pertahanan, Dr. Sutrimo Sumarlan pada kesempatan tersebut turut menyampikan pidatonya:

Atas nama pemerintah Indonesia, melalui kementerian pertahanan kami mengapresiasi keberhasilan pembuatan *prototipe* tank kelas medium ini, saya rasa ini adalah sebuah kesuksesan dan kisah yang luar biasa dari kerjasama antara industri pertahanan antara kedua negara, Turki dan Indonesia. Kerjasama tank kelas medium ini dimulai pada tahun 2015 dan kami berharap dapat selesai tahun ini, yakni tahun 2017. Turki dan Indonesia, FNSS dan PT Pindad, akan bekerjasama untuk membuat profil teknologi baru khususnya untuk Medium Tank. Kedua negara, Indonesia dan Turki, berharap tank ini tidak hanya untuk dua negara, kita bisa menjualnya ke negara lain selain untuk memenuhi kebutuhan kekuatan pertahanan Indonesia dan juga ke depan kita bisa menciptakan pasar untuk Indonesia, dan mungkin untuk Timur Tengah, Asia Tengah dan sebagian Eropa. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama pemerintah Indonesia kepada pemerintah Turki, atas kerjasama yang erat dengan Indonesia untuk mensukseskan tank kelas medium. Setelah keberhasilan *prototipe* tank kelas medium, baik PT Pindad dan FNSS akan terus bekerjasama untuk menyelesaikannya hingga selesai dan kami akan membuat pemasaran bersama, di Asia, dan mungkin juga Amerika Latin. Kami berharap ke depan kedua negara dapat melanjutkan kerjasamanya, tidak hanya dengan medium tank tetapi juga dengan produk lain seperti rudal, pasarnya sangat terbuka. Ini adalah kesempatan besar bagi perusahaan di Turki dan Indonesia untuk bergabung bersama (Defence Turkey, 2017).

Setelah diperkenalkan untuk pertama kalinya di Turki, *Prototype medium battle tank* Harimau ini kemudian dibawa ke Indonesia untuk kemudian hadir dalam perayaan hari TNI ke-72 di tahun 2017. *Prototype medium battle tank* Harimau ketika itu ikut dalam defile

Alutsista TNI (Pindad, 2017). Hal ini merupakan bagian dari kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Wakil Menteri Pertahanan Turki Prof. Ismail Demir dalam sambutannya saat perkenalan *prototype* di IDEF ke-13 (Defence Turkey, 2017).

Prototype medium battle tank Harimau yang telah tiba di tanah air kemudian melalui proses uji coba. Serangkaian ujicoba ini turut menandakan medium tank Harimau telah memasuki tahap ketiga dalam rencana pengembangan. Rangkaian uji coba yang dilaksanakan oleh *medium battle tank* Harimau ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan serta memperoleh sertifikat tipe. Dalam proses ujicoba medium battle tank Harimau dihadapkan pada beberapa test seperti ketahanan dari ledakan ranjau (*mine blast*), uji daya gempur (*firing test*), dan test mobilitas dan performa (PT. Pindad, 2018).

Rangkaian ujicoba tersebut dilaksanakan dalam waktu yang berbeda-beda sejal bulan Juli 2018 hingga akhir Agustus 2018. Uji coba pertama yang dilakukan oleh PT. Pindad adalah uji ketahanan dari ledakan ranjau (*mine blast*) yang dilaksanakan pada 12 dan 14 Juli 2018. Adapun hasil uji coba tersebut disebut PT. Pindad memuaskan. Uji coba kedua yang dilaksanakan terhadap *prototype* medium battle tank Harimau adalah uji mobilitas dan performa. Uji coba ini dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 16 Agustus 2018 (PT. Pindad, 2018).

Dalam aspek mobilitas, *medium battle tank* Harimau dapat dikatakan memiliki kemampuan mobilitas yang cukup baik. Merujuk pada spesifikasi yang disampaikan pihak pengembang, *medium battle tank* Harimau memiliki kecepatan hingga 70 km/jam (FNSS, 2018). Klaim kemampuan ini kemudian terbukti saat proses uji coba dilaksanakan. Selain itu *medium battle tank* Harimau juga terbukti memiliki kemampuan mobilitas mumpuni di medan ekstrem (Ikhsanudin, 2018; Kompas.com, 2018).

Uji coba yang dilakukan di Indonesia juga menghasilkan informasi mengenai kemampuan mobilitas *medium battle tank* Harimau lainnya. *Medium battle tank* Harimau diketahui mampu menaklukkan medan dengan kemiringan 30° maupun menanjak dengan sudut mencapai 60° (FNSS, 2018). Kemampuan mobilitas yang dimiliki *medium battle tank*

Harimau ini disebut lebih baik dibandingkan MBT Leopard 2 milik TNI AD dan sesuai dengan kondisi geografis Indonesia (Fikri, 2018a; Mutakin, 2017).

Setelah melalui rangkaian ujicoba sebelumnya, maka pada tanggal 25 – 27 Agustus 2018, *prototype medium battle tank* Harimau menjalani ujicoba lanjutan yakni uji daya gempur atau *firing test*. Uji daya gempur ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa baik kemampuan *medium battle tank* Harimau melalui *turret* 105mm melakukan fungsi penembakan. Uji daya gempur ini kemudian dilaksanakan dalam dua bentuk, yakni dalam kondisi statis maupun dinamis. Kondisi statis yang dimaksud adalah ketika *tank* dalam kondisi diam, sedangkan dinamis adalah ketika *tank* dalam keadaan bergerak. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengetahui kemampuan *medium battle tank* Harimau mengunci target saat dalam keadaan bergerak serta kemampuan menembak baik dalam kondisi diam maupun dalam pergerakan posisi (PT. Pindad, 2018).

Adapun sesungguhnya penamaan *medium battle tank* hasil pengembangan PT. Pindad dan FNSS baru dilakukan setelah rangkaian uji coba selesai dilakukan. Peresmian nama *medium battle tank* Harimau dilaksanakan pada perhelatan Indonesia Defence 2018 Expo & Forum pada bulan November 2018. Ketika itu Presiden Joko Widodo yang langsung meresmikan nama *medium battle tank* Harimau (Antara News, 2018; Gatra, 2018).

Sebagai salah satu produk *medium battle tank* terbaru yang dikembangkan, maka bukan merupakan hal yang aneh jika *medium battle tank* Harimau telah disematkan beberapa teknologi baru atau mutakhir. Merujuk pada dokumen yang dirilis PT. Pindad dan FNSS terkait spesifikasi *medium battle tank* Harimau dapat diketahui bahwasanya produk *medium battle tank* teranyar tersebut dibekali kemampuan proteksi ledakan level STANAG 4 yang dapat ditingkatkan hingga STANAG 5 (FNSS, 2018). Kemampuan STANAG 4 ini menandakan *tank* bertahan dari peluru kaliber 14.5x114mm yang ditembakkan dari jarak 200 meter dan kecepatan 911 meter/detik (Armor Specs, 2020). Selain itu melalui proses uji coba menggunakan ranjau dengan hulu ledak seberat 10kg diketahui *medium battle tank* Harimau mampu memberikan perlindungan terhadap personel yang ada didalam. Selain klaim kemampuan pertahanan diri tersebut *medium battle tank* Harimau juga diklaim tidak hancur

jika menerima serangan artileri kaliber 155mm sekalipun pada jarak tertentu (Armor Specs, 2020; Ramadhan, 2018).

Selain dibekali kemampuan proteksi STANAG level 4 yang bisa ditingkatkan menjadi STANAG level 5, *medium battle tank* Harimau juga dipersiapkan untuk dapat menggunakan *active protecting systems* (APS) PULAT (FNSS, 2019). Keberadaan APS PULAT ini memungkinkan *medium battle tank* Harimau menghancurkan serangan yang mendekat (FNSS, 2019). Instalasi APS PULAT di *medium battle tank* Harimau dilakukan agar *medium battle tank* Harimau mampu beroperasi secara optimal dalam peperangan kota.

Selain kemampuan perlindungan diri dari *medium battle tank* Harimau yang cukup baik, teknologi baru yang juga siap disematkan di *medium battle tank* Harimau adalah turret CMI 3105. *Turret* ini merupakan varian teranyar yang di desain untuk memiliki bobot ringan. Selain itu, sebagai varian teranyar *turret* ini tentunya juga memiliki kemampuan dan teknologi yang lebih baik dibanding varian sebelumnya, salah satunya akurasi tinggi dalam menembak hingga 10 km (FNSS, 2018). Untuk memaksimalkan kemampuan bertempur terutama dalam aspek daya hancur, ketika diharuskan melakukan pengisian ulang meriam, *medium battle tank* Harimau tidak lagi dilakukan secara manual. Selain itu, *medium battle tank* Harimau juga dibekali kemampuan menembak target secara otomatis setelah target dimasukkan kedalam sistem (Siddiq, 2018)

Sebagai implikasi dari lulusnya *medium battle tank* dalam proses sertifikasi maka Pusat Kelaikan Kementerian Pertahanan. Sertifikat tipe *medium battle tank* Harimau resmi diberikan Kepala Pusat Kelaikan (Kapuslaik) Kementerian Pertahanan kepada Direktur Teknik dan Pengembangan PT. Pindad, Dr. Ir. Ade Bagdja, MME pada tahun 2019. Pemberian sertifikat tipe dengan nomor IMLA/TC/RANPUR/010/2019 ini juga didasarkan pada aturan kelaikan darat yang dikeluarkan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan (PT. Pindad, 2019a). Oleh karena telah dimilikinya sertifikat tipe tersebut maka *medium battle tank* Harimau siap untuk di produksi massal untuk memenuhi kebutuhan TNI maupun ekspor (Siddiq, 2018). TNI AD sendiri disebut membutuhkan 400 – 500 *medium battle tank* Harimau ini untuk memperkuat postur pertahanan dalam kerangka KPM

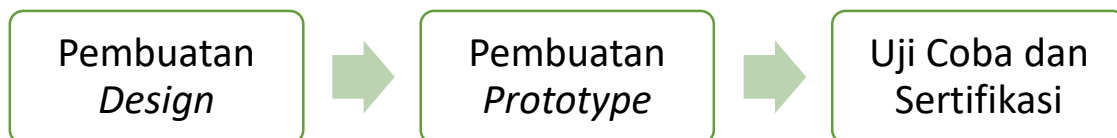
(Permana, 2019; Simbolon, 2017). Gambar 2.4 di bawah ini merupakan wujud *medium battle tank* Harimau.



Gambar 2.4 Medium Battle Tank Harimau

Sumber: Pindad, nd

Kerja sama yang terjalin antara PT. Pindad dan FNSS dalam pengembangan *medium battle tank* Harimau pada awalnya hanya pada proses pengembangan. Oleh karena itu berdasarkan rencana dan kesepakatan awal kerja sama antara PT. Pindad dan FNSS selesai ketika medium battle tank Harimau menjalani proses ujocoba terakhir. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Abraham Mose selaku Direktur Utama PT. Pindad pada tahun 2018 (Fikri, 2018b; Susanti, 2018). Namun dalam pekembangannya kerja sama ini tidak hanya dalam bentuk pengembangan desain dan *prototype* saja.

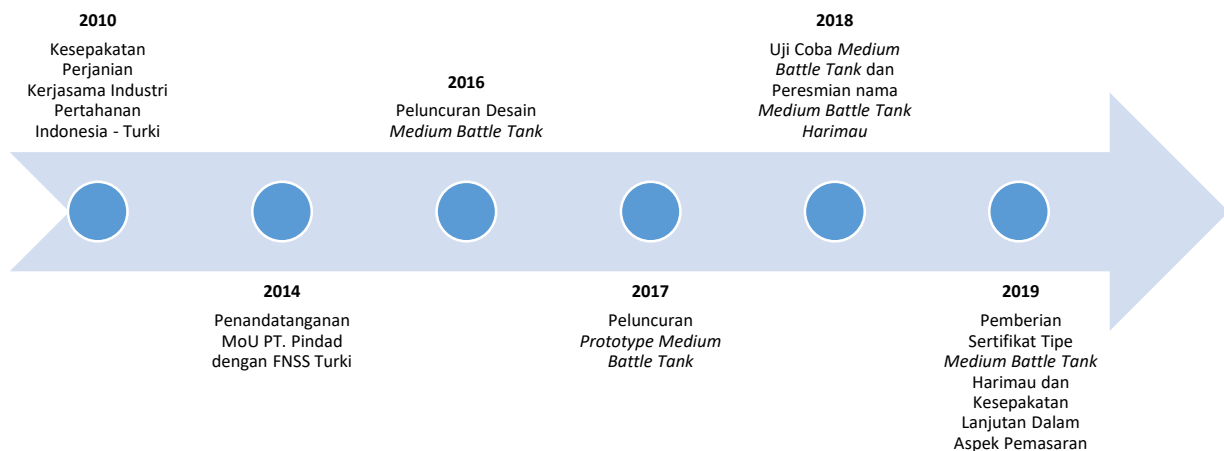


Gambar 2.5: Tahap Pengembangan Medium Battle Tank Harimau

Sumber: Olahan sendiri

Kerja sama antara PT. Pindad dan FNSS ini mengalami perkembangan dengan dicapainya kesepakatan dalam aspek pemasaran. Berdasarkan pernyataan Direktur Bisnis Produk Pertahanan PT. Pindad telah terjalin kesepakatan antar kedua perusahaan. Melalui kesepakatan tersebut PT. Pindad dan FNSS memiliki hak untuk memasarkan *medium battle tank* Harimau dengan target pasar yang berbeda. PT. Pindad akan memasarkan *medium battle tank* Harimau dengan target pasar negara-negara di Asia, sedangkan FNSS memiliki target pasar negara-negara eropa (Aini, 2019). Kesepakatan ini dapat dipandang baik bagi kedua perusahaan sehingga tidak saling bersaing dan berpotensi mendapat keuntungan ekonomi yang optimal.

Selain perkembangan kesepakatan terkait pemasaran, kerja sama antara PT. Pindad dan FNSS mengalami perkembangan lain. Pada tahun 2020, PT. Pindad dan FNSS disebut telah menjalin kesepakatan baru terkait pengembangan varian *medium battle tank* Harimau. Berdasarkan pernyataan *Vice President* Inovasi PT. Pindad, kedua perusahaan akan mengembangkan *medium battle tank* Harimau varian angkut personel serta varian amfibi. Melalui kerja sama lanjutan ini PT. Pindad dan FNSS juga akan mencoba melakukan instalasi *Remote Controll Weapon System* (RCWS) 30mm (Permana, 2020).



Gambar 2.6: Rangkuman Lini Masa Pengembangan *Medium Battle Tank* Harimau

Sumber: Olahan sendiri

BAB 3

PRESTIGE SEBAGAI PENDORONG PENGEMBANGAN *MEDIUM BATTLE TANK* HARIMAU

Bab ini ditulis untuk melakukan analisis alasan Indonesia melakukan pengembangan *medium battle tank* Harimau yang bekerjasama dengan Turki. Analisis tersebut akan dilakukan dengan menggunakan konsep *techno-nationalist impulse*, yang kemudian akan dijabarkan dalam 3 variabel. Variabel pertama adalah *Pursuit of Power* yang dalam konteks penelitian ini adalah ambisi Indonesia menjadi negara kekuatan utama kawasan dan negara mandiri. Kedua, *pursuit of wealth and technological prowess* atau ambisi Indonesia memperoleh keuntungan ekonomi dan menunjukkan kedigdayaan teknologi. Serta variabel yang terakhir adalah *pursuit of domestic prestige* atau ambisi Pemerintah memperoleh status atau *prestige* tertentu dari keberhasilan pengembangan *medium battle tank* Harimau di level domestik.

3.1 *Pursuit of Power* (Ambisi Indonesia Menjadi Negara Kekuatan Utama Kawasan dan Negara Mandiri)

Sesuai dengan kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini, maka analisa terkait alasan Indonesia melakukan pengembangan *medium battle tank* Harimau akan dimulai untuk melihat ambisi Indonesia menjadi kekuatan utama kawasan dan negara yang mandiri. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Bitzinger dan Kim (2005) serta Bitzinger (2015), *techno-nationalist impulse* yang kerap menjadi alasan negara melakukan pengembangan alutsista melalui industri pertahanan nasional tidak bisa dilepaskan dari keinginan negara mengakumulasi *power* demi mencapai status atau *prestige* tertentu dalam sistem internasional (Bitzinger, 2015b; Bitzinger & Kim, 2005). Negara memandang keberhasilan industri pertahanan nasional mengembangkan alutsista akan mendorong posisi negara di dalam sistem internasional. Posisi negara akan terdorong dengan memperoleh predikat sebagai kekuatan utama yang disegani serta tidak berada pada bayang-bayang pengaruh negara lain.

Sub-bab ini akan melihat apakah dalam keputusannya mengembangkan *medium battle tank* Harimau Indonesia didorong oleh ambisinya menjadi negara kekuatan utama dan

disegani di kawasan maupun berambisi menjadi negara yang mandiri. Oleh karena itu, analisis pada sub-bab ini akan dilihat melalui 4 indikator yang akan dibagi kedalam 4 bagian. Bagian pertama pada sub-bab ini akan melihat indikator pertama, yakni memori kolektif bangsa Indonesia dan pandangan Indonesia terhadap negara-negara *great power*. Keduakondisi lingkungan strategis eksternal Indonesia. Ketiga, proses peningkatan kapabilitas militer Indonesia melalui program Kekuatan Pokok Minimum. Bagian terakhir akan melihat keberhasilan industri pertahanan nasional sebelum pengembangan *medium battle tank* Harimau.

3.1.1 Memori Kolektif dan *Distrust* Terhadap Negara *Great Powers*

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, menurut Bitzinger dan Kim (2005), keinginan atau ambisi negara menjadi negara *great power* di kawasan serta mandiri dipengaruhi oleh memori kolektif bangsa tersebut. Bangsa atau negara yang memiliki *distrust* terhadap negara *great powers* akan cenderung lebih berambisi mencapai status negara mandiri dan *great power* (Bitzinger & Kim, 2005). Distrust terhadap negara *great powers* sendiri muncul karena dalam sejarahnya, negara tersebut menjadi korban atau pihak yang dirugikan dari perilaku atau kebijakan negara *great powers*. Perilaku atau kebijakan yang dimaksud adalah menjadi negara yang dijajah serta menjadi target embargo senjata maupun bentuk diplomasi koersif lain (Bitzinger, 2003; Kinsella, 1998).

Merujuk pada argumentasi teoretis tersebut, maka memori kolektif bangsa Indonesia akan dibahas guna melihat adanya *distrust* terhadap negara *great powers*. Memori kolektif sebagai korban dari perilaku atau kebijakan negara-negara *great powers* tersebut menyebabkan persistensi Indonesia mengembangkan *medium battle tank* Harimau. Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki sejarah panjang sebagai negara terjajah. Berdasarkan fakta sejarah, wilayah yang saat ini dikenal sebagai Indonesia telah dijajah oleh 6 negara. Keenam negara tersebut adalah Portugis, Perancis, Inggris, Spanyol, Belanda dan Jepang.

Selama melalui masa penjajahan tersebut, berbagai penderitaan harus dirasakan bangsa Indonesia. Sebagai contohnya praktek kerja rodi dan kerja paksa yang diterapkan oleh

penjajah. Selain itu bangsa Indonesia yang sudah merdeka pada awal-awal kemerdekaannya juga masih terus dihantui oleh kehadiran negara lain yang mencoba menduduki kembali wilayah Indonesia. Hal ini terlihat dari dilancarkannya agresi militer oleh Belanda sebanyak dua kali, yakni pada tahun 1947 dan 1948. Selain melalui operasi agresi militer, bangsa Indonesia juga harus menerima wilayah kedaulatannya berkurang melalui perjanjian Linggarjati maupun Renville.

Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kedaulatan dan kemerdekaan seutuhnya masih terus berlanjut hingga dekade 1960. Hal ini dikarenakan Belanda tidak kunjung menyerahkan wilayah Irian Barat kepada Indonesia. Upaya merebut Irian Jaya dari Belanda dilakukan Indonesia melalui meja perundingan maupun pengerahan pasukan. Perjuangan Indonesia akhirnya mencapai keberhasilan setelah dilakukannya referendum atau yang juga dikenal dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Irian yang merupakan hasil perjanjian New York.

Tidak hanya memori kolektif sebagai bangsa terjajah, Indonesia juga memiliki pengalaman pahit sebagai korban dari diplomasi diplomasi koersif negara-negara kuat. Diplomasi koersif sendiri menurut Alexander George (1991) adalah strategi suatu negara yang disertai dengan ancaman maupun hukuman guna merubah kebijakan negara lain sesuai keinginannya (George, 1991). Dalam konteks Indonesia, tercatat beberapa negara pernah menerapkan diplomasi koersif. Negara-negara tersebut adalah Amerika Serikat, Inggris (Inkiriwang, 2020; SIPRI, 2012). Selain negara, Indonesia juga tercatat pernah menjadi target diplomasi koersif entitas internasional selain negara, yakni Uni Eropa (SIPRI, 2012).

Amerika Serikat tercatat menerapkan diplomasi koersif kepada Indonesia dengan cara menjatuhkan embargo senjata serta penghentian program *International Military Education and Training* (IMET) untuk Tentara Nasional Indonesia (Rachmat, 2014; Wenas Inkiriwang, 2020). Embargo senjata serta penghentian program IMET oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia dikarenakan munculnya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh oknum TNI di Timor-Timur yang dikenal dengan peristiwa Santa Cruz (Wenas Inkiriwang, 2020).

Diplomasi koersif Amerika Serikat terhadap Indonesia yang terkait dengan pembelian alutsista bahkan masih terjadi belum lama ini. Keputusan Indonesia untuk membeli jet tempur generasi ke-5 dari Russia yakni Sukhoi 35 (Su-35) hingga saat ini menemui hambatan. Hambatan proses akuisisi Su-35 ini disebut tidak terlepas dari ancaman Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi melalui instrument *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* (CAATSA) (CNN Indonesia, 2020b; Sandi, 2021).

Kekhawatiran Pemerintah Indonesia untuk merealisasikan rencana akuisisi Su-35 karena adanya ancaman sanksi CAATSA juga diutarakan oleh Pengamat Militer, Connie Rahakundini Bakrie:

Masalah Sukhoi Su-35 ada beberapa masalah di Rusia sendiri. Ada sanksi perdagangan internasional oleh AS atas produk militer Rusia dan itu dilakukan sejak 2016, namanya CAATSA. **Sanksi yang (bisa) berimbas serius bagi Indonesia**, CAATSA lahir dari ide Amerika menyikat Rusia dari persenjataan dunia. **Mungkin ini jadi pandangan Pak Prabowo, Kemenhan atau Mabes TNI untuk tidak meneruskan pembelian Sukhoi** (Sandi, 2021).

Serupa dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, salah satu negara penyuplai senjata terbesar Indonesia lainnya yakni Inggris juga pernah menjatuhkan embargo senjata kepada Indonesia. Inggris bahkan juga disebut sebagai pihak yang menginisiasi embargo senjata oleh Uni Eropa terhadap Indonesia. Melalui embargo senjata oleh Inggris dan Uni Eropa, maka Uni Eropa melarang proses penjualan atau pengiriman senjata kepada Indonesia yang berpotensi digunakan untuk tindakan represif terhadap masyarakat. Dampak embargo senjata yang dijatuhkan Amerika Serikat dan Uni Eropa merugikan dan meyulitkan Indonesia. Berbagai jenis alutsista yang dimiliki oleh TNI tidak dapat digunakan karena ketiadaan suku cadang. Bahkan pesawat tempur Hawk 109/209 asal Inggris sempat terganggu proses pengirimannya ke Indonesia.

Berbagai pengalaman dan memori kolektif bangsa Indonesia yang kerap menjadi pihak yang dirugikan dari perilaku dan kebijakan negara *great powers*. Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan, secara eksplisit menyatakan bahwsanya Indonesia selama ini selalu menjadi korban dan sejak lahir selalu ingin dihancurkan oleh negara lain. Ia bahkan

menambahkan bahwasanya hingga saat ini dan di masa yang akan datang Indonesia akan terus diganggu oleh negara lain (Liputan6.com, 2019).

Sebagai upaya untuk menghadapi ancaman gangguan dari negara lain, Indonesia dianggap harus bertransformasi menjadi negara yang kuat dan disegani. Kemandirian pertahanan kemudian dipandang sebagai suatu kebutuhan agar Indonesia tidak lagi menjadi korban kepentingan negara lain serta mampu memastikan keamanan diri serta memberi kontribusi positif terhadap ekonomi (Sjamsuoddin, 2021). Hal ini dapat dikonfirmasi melalui pendekatan legal maupun melalui pernyataan berbagai *stakeholders*.

Jika menggunakan pendekatan legal, terdapat beberapa dokumen legal yang bisa dan harus dirujuk. Pertama, Peraturan Presiden (Perpres) nomor 7 tahun 2008 tentang kebijakan umum pertahanan negara. Pada Perpres No, 7 Tahun 2008 dinyatakan bahwasanya salah satu permasalahan aktual dalam penyelenggaraan pertahanan negara adalah rendahnya kondisi dan jumlah alutsista, yang terkait pula dengan rendahnya pemanfaatan industri pertahanan nasional dan embargo oleh negara lain (Presiden Republik Indonesia, 2008). Dokumen legal kedua yang memunculkan memori kolektif sebagai korban dari embargo adalah UU Industri Pertahanan tahun 2012. UU Industri Pertahanan pasal 43 ayat 5 poin d, menyatakan bahwasanya ketika terpaksa melakukan impor alpanhankam, maka pihak produsen wajib memberikan jaminan tidak adanya potensi embargo, kondisionalitas politik dan hambatan dalam penggunaan alpanhankam yang dibeli (Pemerintah Republik Indonesia, 2012).

Selain dua dokumen legal yang dihasilkan saat era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut, kekhawatiran kembali menjadi korban embargo serta urgensi kemandirian pertahanan juga terlihat dalam pernyataan yang disampaikan Presiden SBY. Sebagai contohnya adalah ketika Presiden SBY membuka *workshop* revitalisasi industri pertahanan. Ketika itu Presiden SBY menyatakan bahwa pemerintahannya bertekad membangun kemampuan pertahanan Indonesia agar tidak dilecehkan oleh negara lain (Henricus, 2009). Pada momen rapat kabinet terbatas bulan November 2011, Presiden SBY mengeluarkan statement yang menggambarkan adanya kekhawatiran menjadi korban embargo jika Indonesia tidak membangun kemampuan industri pertahanan nasional (Berita Satu, 2011).

Tidak hanya pada era kepemimpinan Presiden SBY, memori sebagai korban embargo negara produsen senjata dan urgensi mencapai kemandirian juga dapat ditemukan pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Pada pidato sambutannya di Indonesia Defence Expo 2018 yang sekaligus menghadirkan medium battle tank Harimau untuk pertama kalinya setelah terlibat dalam defile ulang tahun TNI tahun 2017, Wapres JK menyatakan pengalaman pahit embargo senjata menjadi pelajaran dan menunjukkan pentingnya kemandirian pertahanan: **“Industri pertahanan ditujukan untuk kemandirian. Kita punya pengalaman pada 1990-an di embargo karena masalah Timor (Timur). Sulit sekali mendapatkan alutsista (alat utama sistem pertahanan) karena embargo itu”** (Media Indonesia, 2018).

Mantan Ketua Tim Pelaksana (Katimlak) KKIP Laksamana (Purn) Sumardjono ketika menjabat juga menyatakan betapa pentingnya kemandirian pertahanan demi meningkatkan kekuatan bangsa Indonesia. Menurutnya jika Indonesia mencapai kemandirian pertahanan akan mendapatkan efek gentar yang absolut karena dapat memproduksi alutsista sendiri dan tanpa diketahui negara lain (Kementerian Pertahanan Indonesia, 2018a). Selain itu, Laksamana (Purn) Sumardjono juga menyatakan kemandirian pertahanan akan membuat Indonesia terbebas dari pengaruh negara produsen senjata:

Jadi kalau kita tidak menuju kearah penguasaan teknologi itu kita akan terus **menggantungkan diri kepada negara lain yang menguasai teknologi**. Belanja barangnya juga kepada negara lain, maka **kekuatan kita akan selalu ditentukan oleh negara – negara tersebut”** (Kementerian Pertahanan Indonesia, 2018a)

Wakil Menteri Pertahanan, Muhammad Herindra dalam rangkaian Rapat Kerja BUMN Industri Pertahanan tahun 2021, menyampaikan pernyataan yang semakin membuktikan adanya keterkaitan memori kolektif di masa lalu dengan pengembangan industri pertahanan nasional: **“Kita pernah mengalami suatu masa di mana kita tidak punya apa-apa, terkena embargo, bagaimana lemahnya pertahanan kita. Untung tidak ada perang (saat itu). Tapi kita tidak boleh seperti itu, harus kuat, harus mandiri** (Kementerian BUMN, 2021)”

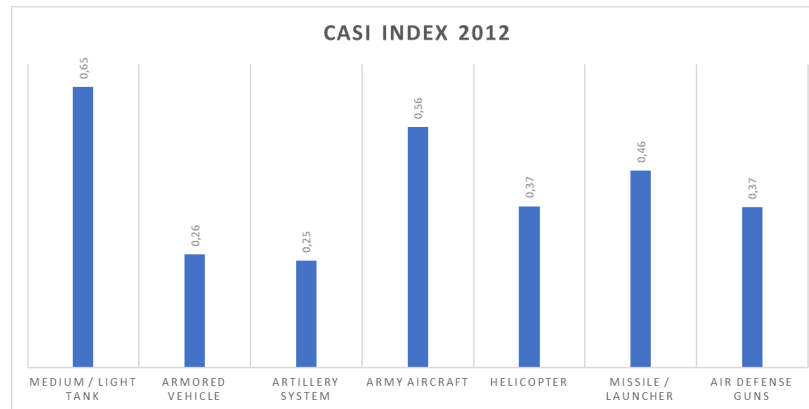
Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas mengenai Kebijakan Pengadaan Alutsista pada tahun 2019 menekankan pentingnya Indonesia menjadi negara yang kuat di kawasan serta disegani. Presiden Joko Widodo juga menekankan pemenuhan kebutuhan alutsista disandarkan pada produksi industri pertahanan dalam negeri:

Negara **harus mampu menjadi sebuah kekuatan regional yang baik dan disegani** di kawasan Asia Timur. Karena itu kita perlu penguatan pertahanan kita dengan alutsista yang modern, yang **bersandar pada kemampuan industri alat pertahanan di dalam negeri**. Roadmap-nya harus jelas dalam pengembangan industri alat pertahanan di dalam negeri mulai dari hulu sampai hilir dengan melibatkan baik BUMN maupun swasta sehingga **kita bisa mengurangi ketergantungan pada impor alutsista dari luar negeri**” (Kementerian Sekretariat Negara Indonesia, 2019).

Merujuk pada fakta empiris maka terkonfirmasi adanya *distrust* terhadap negara *great powers* dan produsen senjata serta keinginan Indonesia menjadi kekuatan utama di kawasan serta mandiri. Sesuai dengan argumentasi teoretis maka *distrust* tersebut akan memicu persistensi Indonesia mengembangkan alutsista oleh industri pertahanan nasional. Pengembangan *medium battle tank* Harimau merupakan keputusan yang rasional dan tepat dalam upaya mewujudkan Indonesia yang disegani dan lepas dari bayang-bayang pengaruh negara produsen senjata. Argumentasi ini dapat dijustifikasi oleh dua hal, yakni: (1) Indeks konsentrasi penyedia senjata (CASI Index) TNI AD dan (2) kesinambungan dengan program pengembangan alutsista sebelumnya.

Justifikasi pertama mengapa pengembangan *medium battle tank* Harimau menjadi pilihan yang tepat demi mewujudkan ambisi Indonesia menjadi negara yang kuat dan disegani serta mandiri terlihat melalui CASI Index TNI AD. CASI Index sendiri merupakan indikator yang menunjukkan seberapa tinggi tingkat konsentrasi atau ketergantungan terhadap negara penyedia senjata. Semakin tinggi nilai CASI Index maka menandakan semakin tinggi pula tingkat ketergantungan terhadap satu negara penyedia senjata. Tilik data CASI Index TNI AD menjadi penting mengingat hingga saat ini, postur pertahanan Indonesia didominasi oleh TNI AD (IISS, 2021). Jika merujuk pada kategorisasi yang disusun dalam Widjajanto et al. (2012), CASI Index *medium – light tank* sebesar 0,65 masuk dalam kategori tinggi (Widjajanto et al., 2012). Bahkan jika dibandingkan dengan enam kategori alutsista

lainnya, tingkat ketergantungan Indonesia paling tinggi di kategori *medium-light tank*. Grafik 3.1 di bawah ini menampilkan CASI Index alutsista TNI AD tahun 2012.



Grafik 3.1 CASI Index Alutsista TNI AD 2012

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan (IISS, 2012)

Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si selaku Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2018 – 2020 turut mengkonfirmasi memori masa lalu sebagai korban embargo menjadi salah satu alasan pengembangan *medium battle tank* Harimau. Menurut Prof. Bondan, pengembangan dilakukan terkait dengan logika kedaulatan negara. Hal ini dikarenakan Indonesia sudah pernah merasakan betapa terganggunya pertahanan dan kedaulatan negara ketika memiliki ketergantungan karena rawan embargo (Wawancara dengan Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si, 14 Juni 2021).

Justifikasi kedua muncul jika menilik kesinambungan pengembangan *medium battle tank* Harimau dengan program pengembangan alutsista oleh PT. Pindad sebelumnya. PT. Pindad sebagai Industri Pertahanan milik negara yang juga bertugas untuk melakukan pengembangan *medium battle tank* Harimau sudah memiliki pengalaman pengembangan alutsista yang memiliki kemiripan dengan *medium battle tank* Harimau. Pengalaman tersebut diantaranya adalah pengalaman mengembangkan Panser Anoa dan merakit tank ringan (Detik.com, 2014a). Pengalaman ini memberikan dampak positif bagi ahli-ahli PT. Pindad dalam melakukan pengembangan *medium battle tank* Harimau. Selain itu hal tersebut juga sesuai dengan argumentasi Bitzinger (2015) bahwa dalam pengembangan alutsista oleh

Industri Pertahanan nasional di Asia Tenggara dipengaruhi oleh faktor *doability*. Penjabaran lebih lanjut terkait hal ini akan disampaikan dalam pembahasan 3.1.4. di sub-bab ini.

Berdasarkan temuan empirik yang telah disebutkan sebelumnya, terlihat keinginan dari Indonesia untuk menempatkan diri sebagai negara kuat dan disegani di kawasan serta memperoleh kemandirian. Indonesia tidak lagi ingin berada dalam pengaruh negara-negara pengekspor senjata. Keputusan melakukan pengembangan *medium battle tank* Harimau merupakan keputusan yang dapat dikatakan sebagai keputusan yang tepat agar Indonesia mampu mencapai ambisi atau keinginan tersebut.

3.1.2 Lingkungan Strategis Eksternal Indonesia

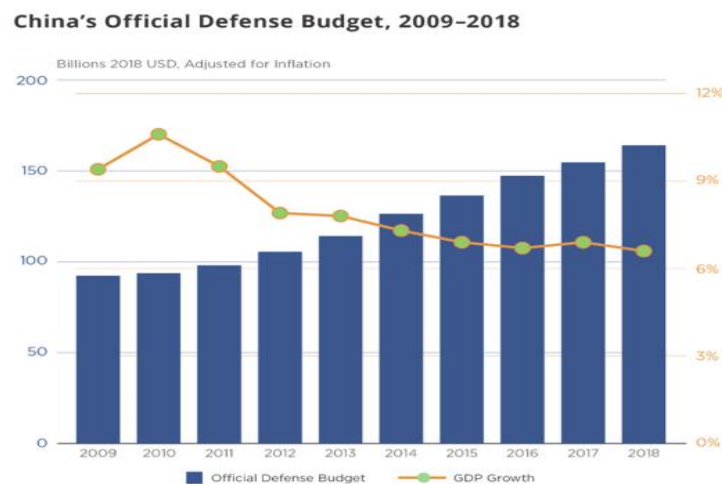
Pengembangan industri pertahanan atau alutsista secara mandiri oleh negara-negara menurut beberapa ahli tidak bisa dilepaskan dari ambisi negara mengakumulasi *power*. Motivasi akumulasi *power* ini menurut Bitzinger dan Kim (2005) serta Cheung (2017) juga menjadi bagian dari *techno-nationalist impulse* yang mendominasi pola pengembangan industri pertahanan di Asia. Dalam konsep *techno-nationalist impulse* negara melakukan akumulasi *power* dengan tujuan memperoleh status sebagai negara kuat dan disegani (Bitzinger & Kim, 2005; Cheung, 2017).

Akumulasi *power* ini kemudian dipengaruhi oleh kondisi dan dinamika lingkungan strategis negara. Ketika suatu negara dihadapkan pada ancaman yang tinggi, maka menurut Cheung (2017), negara akan menerapkan apa yang disebut sebagai *military techno-nationalism* (Cheung, 2017). Senada, Bitzinger dan Kim (2005) menyatakan selain dihadapkan pada ancaman, negara yang tidak memiliki aliansi formal maupun negara yang meragukan komitmen negara aliansinya akan cenderung mengembangkan industri pertahanan nasionalnya (Bitzinger & Kim, 2005).

Merujuk pada argumentasi teoretik yang disebutkan sebelumnya, maka pengembangan *medium battle tank* Harimau tidak bisa dilepaskan dari kondisi dan dinamika lingkungan strategis yang dihadapi oleh Indonesia. Sebagaimana diketahui Indonesia berada pada kawasan Asia Tenggara yang dalam beberapa tahun terakhir mendapat perhatian dari dunia internasional (International Strategic Analysis, 2016; Kesavapany, 2009). Perhatian

dunia internasional terhadap kawasan terdekat Indonesia ini tidak lain karena dinamika politik dan keamanan yang terjadi. Dinamika politik dan keamanan ini muncul di Asia Tenggara karena kehadiran China sebagai *rising power* di wilayah yang berdekatan dengan Asia Tenggara (Weimar, 2013). Terlebih lagi menurut Novotny (2010) mayoritas elit-elit politik luar negeri Indonesia memandang China sebagai sumber ancaman (Novotny, 2010). Hal senada juga disampaikan Syailendra (2017) yang menyatakan bahwa militer Indonesia memandang China sebagai sumber ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan (Syailendra, 2017).

Industrialisasi dan kebangkitan ekonomi China sejak beberapa tahun terakhir hingga saat ini dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia diikuti dengan peningkatan kapabilitas militer. Kekuatan militer China saat ini telah menjelma menjadi salah satu kekuatan yang disegani di Asia maupun dunia. Secara keseluruhan angkatan bersenjata China terdiri dari 2,693,000 personel yang didalamnya terdapat 510.000 personel cadangan. Sebagai salah satu negara dengan kemampuan militer terkuat di dunia China memiliki anggaran pertahanan yang sangat besar. Semenjak tahun 2002 China merupakan negara dengan anggaran pertahanan terbesar kedua di dunia dan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang konsisten (SIPRI, 2019). Grafik 3.2 dibawah ini akan menunjukkan grafik peningkatan anggaran pertahanan militer China sejak tahun 2009 – 2018.



Grafik 3.2 Anggaran Pertahanan China (2009 – 2018)

Sumber: (US Department of Defense, 2019)

Kemampuan angkatan darat China pada saat ini merupakan salah satu angkatan darat terkuat di kawasan. Hal ini disebabkan oleh jumlah pasukan yang siap dikerahkan serta kepemilikan alutsista yang jauh mengungguli negara-negara lain di kawasan. Pada saat ini China mengoperasikan 5.650 *main battle tank*, lebih dari 9.204 artileri yang terdiri dari berbagai kelas serta lebih dari 270 helikopter serbu (IISS, 2021). Selain alutsista yang dimiliki, jumlah personel angkatan darat China juga sangat besar, jumlah pasukan angkatan darat China mencapai 965.000 pasukan (IISS, 2021).

Selain angkatan darat, kekuatan angkatan laut China saat ini juga telah menjelma menjadi yang terkuat di kawasan. Hal ini telah diakui langsung oleh pihak Departemen Pertahanan Amerika Serikat (US Department of Defense, 2019). Pengakuan ini tentunya didasarkan pada jumlah dan kemampuan armada angkatan laut yang dimiliki China. Saat ini China memiliki total 31 kapal penghancur, 46 kapal penjelajah serta 55 kapal korvet. Selain itu China juga memiliki 2 kapal induk. Sedangkan dalam kekuatan bawah laut, China memiliki total 59 kapal selam yang terdiri 53 kapal selam diesel elektrik dan 6 kapal selam nuklir dengan kemampuan meluncurkan rudal balistik (IISS, 2021).

China juga turut memiliki angkatan udara yang sangat disegani di kawasan atau bahkan dunia. China hingga tahun 2021 ini diketahui mengoperasikan ribuan pesawat tempur berbagai jenis. China tercatat memiliki 1.500 jet tempur dalam berbagai tipe. Selain itu China juga memiliki 1.100 jet tempur latih yang juga bisa dipersenjatai. Selain itu, China juga memiliki 176 pesawat pembom. Kemampuan angkatan udara China bertempur juga semakin kuat berkat keberadaan 150 pesawat penunjang operasi – pesawat tanker udara, pesawat *airborne early warning and control* (AEWC), dll – (IISS, 2021; US Department of Defense, 2019)

Kedigdayaan militer China juga dapat terlihat melalui kemampuan rudal yang dimiliki. Rudal yang dimiliki oleh China terdiri dari berbagai jenis serta memiliki daya jangkauan yang berbeda. China pada saat ini memiliki 90 peluncur serta rudal *Intercontinental Ballistic Missile* (ICBM) dengan daya jangkauan lebih dari 5.000 km (US Department of Defense, 2019). China juga memiliki 80 peluncur *Intermediate Range Ballistic Missile* (IRBM) yang memiliki daya jangkauan antara 3.000 – 5.000 km (US Department of Defense, 2019). Untuk rudal balistik dengan daya jangkauan antara 1.000 – 3.000 km (MRBM) China

memiliki 150 peluncur dan rudal sebanyak 150 - 450 unit. Sedangkan bagi rudal balistik jarak pendek (SRBM) China memiliki 250 peluncur dan 750 – 1500 unit rudal (US Department of Defense, 2019). Selain rudal-rudal balistik tersebut, China juga memiliki 90 peluncur *Ground Launched Cruise Missile* dan 270 – 540 unit rudal yang memiliki daya jangkauan lebih dari 1.500 km (US Department of Defense, 2019).

Kekuatan militer China yang besar membawa dampak terhadap dinamika kawasan Asia Tenggara. Sebagaimana disebutkan oleh Yahuda (2013) dan Grossman (2019), peningkatan kekuatan militer mendorong China semakin asertif terutama dalam konteks Laut China Selatan (Grossman, 2019; Yahuda, 2013). Semakin asertifnya China dapat dilihat melalui keputusan Pemerintah China yang berani membangun pulau-pulau buatan di wilayah Laut China Selatan (Manning & Cronin, 2020). Setelah berhasil melakukan pembangunan pulau buatan, China melakukan militerisasi terhadap pulau-pulau tersebut (Chen & Glaser, 2015; Romaniuk & Burgers, 2019).

Militerisasi pulau-pulau buatan di Laut China Selatan ini tentunya memiliki nilai strategis yang besar bagi China. Pulau-pulau buatan ini memiliki setidaknya dua nilai strategis bagi China. Pertama, pulau-pulau tersebut difungsikan sebagai Pangkalan Aju (Soursa, 2020). Pangkalan Aju dalam bentuk pulau-pulau buatan ini akan memangkas jarak yang harus ditempuh kapal-kapal militer maupun paramiliter China untuk mengisi ulang logistik. Tidak hanya memudahkan proses pengisian ulang logistik, Pangkalan Aju di Laut China Selatan ini juga akan meningkatkan waktu berlayar atau operasi dari kapal militer maupun paramiliter China (Soursa, 2020). Dalam kata lain, China akan mampu meningkatkan kehadirannya di Laut China Selatan.

Nilai strategis kedua bagi China melalui militerisasi pulau-pulau buatan maupun alami di Laut China Selatan adalah akan mampu meningkatkan daya tawar China dalam konflik Laut China Selatan. Sebagaimana disebutkan oleh Pasandideh (2021), militerisasi pulau-pulau tersebut tidak akan menjadikan China secara total mendominasi Laut China Selatan, akan tetapi China akan mampu meningkatkan posisinya dalam klaim Laut China Selatan (Pasandideh, 2021). Pada tahun 2020 yang lalu China bahkan mendirikan dua distrik administratif baru di Laut China Selatan, yang salah satunya berpusat di pulau buatan. Kebijakan China ini dipandang upaya untuk melakukan *fait accompli* terhadap klaimnya di

Laut China Selatan. Kebijakan ini juga disebut serupa dengan apa yang dilakukan Russia di Crimea (Manning & Cronin, 2020).

Tindakan asertif China terkait klaim sepihak Laut China Selatan dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya dengan melakukan militerisasi pulau-pulau buatan. China dalam beberapa tahun terakhir semakin berani melakukan tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi konflik di Laut China Selatan. Bahkan, Indonesia sebagai negara yang selama ini kerap disebut tidak memiliki perselisihan dengan China terkait Laut China Selatan turut menjadi korban asertifitas China. Kapal penjaga pantai China dalam beberapa kesempatan diketahui masuk kedalam ZEE Indonesia tanpa izin dan melakukan pengawalan terhadap kapal nelayan asal China yang melakukan aktifitas penangkapan ikan secara illegal. Bahkan pada bulan September 2020 yang lalu kapal penjaga pantai China dengan nomor lambung 5204 yang diketahui menerobos ZEE Indonesia menolak pergi dari ZEE Indonesia meskipun telah diminta oleh kapal Badan Keamanan Laut Indonesia (Bakamla) (CNBC Indonesia, 2020).

Potensi ancaman yang dihadirkan China terhadap keamanan dan kedaulatan Indonesia semakin meningkat seiring dengan (UU) Penjaga Pantai yang baru disahkan oleh Pemerintah China pada bulan Januari 2021 yang lalu. Melalui UU tersebut, kapal penjaga pantai China diperbolehkan menembak kapal asing yang dianggap mengancam wilayah perairan dibawah yurisdiksi China (CSIS, 2021; Kawashima, 2021). UU ini dikhawatirkan oleh berbagai pihak akan semakin meningkatkan tensi di Laut China Selatan karena definisi dari wilayah perairan dibawah yurisdiksi China yang tidak jelas.

Selain berpotensi membahayakan kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara, peningkatan asertifitas China dalam konteks Laut China Selatan turut membawa dampak lain yang harus diwaspadai Indonesia. Status China sebagai *rising power* juga berpotensi menciptakan konflik dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan status quo. Meskipun saat ini perang terbuka belum terjadi antara China dengan Amerika Serikat, ketegangan hubungan kedua negara semakin menguat. Peningkatan ketegangan antara Amerika Serikat dan China dapat terlihat dalam beberapa kasus. Pertama, terjadinya perang dagang antara kedua negara yang dimulai ketika Pemerintah Amerika Serikat di era Presiden Trump meningkatkan bea impor terhadap produk mesin cuci, panel surya hingga baja asal China (Tai et al., 2019).

Kebijakan ini disebabkan oleh defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap China yang semakin besar. Selain itu berkaca dengan perkembangan ekonomi dan industri China yang sangat pesat, Amerika Serikat memandang China dapat mengganggu posisinya sebagai status quo yang mendominasi ekonomi dunia (Moosa et al., 2020; Tai et al., 2019).

Tidak berbeda dengan ketegangan atau persaingan pada aspek ekonomi melalui perang dagang, dalam aspek militer atau strategis ketegangan kedua negara juga meningkat. Bahkan pada dokumen *National Security Strategy* Amerika Serikat tahun 2017 menempatkan China sebagai negara revisionis yang mencoba menggantikan posisi dan peranan Amerika Serikat di Asia Pasifik (United States Government, 2017). Berselang satu tahun kemudian atau pada tahun 2018, dokumen *National Defense Strategy* Amerika Serikat kembali menyatakan bahwasanya China berusaha memperoleh status sebagai negara hegemon di Asia Pasifik dalam waktu dekat dan berupaya menggantikan posisi Amerika Serikat di dunia dalam waktu yang akan datang (United States Government, 2018). Dua dokumen tersebut memperlihatkan rasa terganggunya Amerika Serikat terhadap kebangkitan militer China.

Jika merujuk pada teori-teori hubungan internasional seperti *power transition theory* maupun konsep *Thucydides trap*, kehadiran *rising power* dalam sistem internasional yang mencoba merubah *status quo* dapat berakibat terjadinya perang dengan negara hegemon (Allison, 2015; Gilpin, 1981; Modelski, 1987; Moore, 2017). Selain itu, Lam Peng Er (2016) dalam artikelnya menyatakan potensi terjadinya perang antar China dan Amerika Serikat juga dipengaruhi oleh konflik antara China dengan negara-negara aliansi Amerika Serikat di Asia Timur seperti Jepang dan Filipina (Er, 2016).

Peningkatan tensi atau terjadinya eskalasi ketegangan di Laut China Selatan sebagaimana disebutkan sebelumnya, telah menjadi perhatian *stakeholders* terkait di Indonesia. Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya (Laksdya) Aan Kurnia dalam wawancara dengan South China Morning Post menyatakan bahwa peluang terjadinya konflik di Laut China Selatan semakin besar. Selain itu Laksdya Aan Kurnia juga menyatakan bahwa konflik yang terjadi di Laut China Selatan berpotensi menjalar hingga ke wilayah kedaulatan Indonesia (Yuniar, 2021).

Selain diutarakan Kepala Bakamla Laksdya Aan Kurnia, keterancaman Indonesia terkait semakin asertifnya China juga dapat terefleksi dalam artikel di Buletin Virajati yang

diterbitkan Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (SESKOAD) TNI. Dalam bulletin Virajati Edisi III, Tim Kajian SESKOAD Bidang Studi Kawasan menyatakan secara eksplisit bahwasanya China telah menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kedaulatan Indonesia. Terdapat beberapa argumentasi penting yang dipaparkan Tim Kajian SESKOAD tersebut. Pertama, ancaman militer China terhadap wilayah kedaulatan NKRI di Kep Natuna dan sekitarnya sudah sangat *imminent* terutama setelah China berhasil melakukan militerisasi pulau-pulau alami maupun buatan di Laut China Selatan (SESKOAD, 2020).

Kedua, meskipun diyakini operasi militer China di Indonesia akan diawali dengan pengerahan kekuatan Angkatan Laut, kekuatan TNI Angkatan Darat dipandang tetap perlu dipersiapkan dengan serius. Hal ini dikarenakan ketika TNI Angkatan Laut dan Udara gagal membendung serangan China, maka untuk mencegah pendudukan fisik di Kepulauan Natuna maupun Kepulauan Anambas maka TNI Angkatan Darat yang akan menjadi tulang punggung pertahanan Indonesia. Ketiga, untuk mempersiapkan kekuatan TNI Angkatan Darat menghadapi ancaman militer China maka mutlak diperlukan modernisasi dan peningkatan kapabilitas Alutsista. Keempat, dibutuhkan industri pertahanan nasional yang mampu memproduksi Alutsista yang berkualitas serta menciptakan kemandirian pertahanan (SESKOAD, 2020). Letjen (Purn). Sjafrie Sjamsoeddin selaku mantan wakil Menteri Pertahanan dan saat ini sebagai Penasihat Khusus Kementerian Pertahanan juga menyatakan pentingnya kehadiran industri pertahanan nasional. Menurutnya perubahan lingkungan strategis yang cepat dan penuh ketidakpastian membutuhkan kemampuan industri pertahanan untuk berinovasi (Sjamsoeddin, 2021).

Selain dihadapkan pada ancaman kebangkitan dan agresifitas China, Indonesia juga tidak bisa menafikkan gencarnya negara-negara Asia Tenggara lain melakukan akuisisi persenjataan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir, belanja pertahanan negara-negara di Asia Tenggara mengalami peningkatan yang cukup signifikan (S. T. Wezeman, 2019). Fenomena yang terjadi ini perlu diperhatikan dan di sikapi dengan bijak oleh Indonesia. Meskipun menurut Bitzinger (2010) apa yang terjadi di Asia Tenggara pada saat ini bukan sebagai suatu bentuk perlombaan senjata, melainkan sebagai dinamika persenjataan, bukan berarti fenomena yang terjadi tidak membawa elemen ancaman bagi Indonesia (Bitzinger, 2010). Hal ini dikarenakan kompleks keamanan regional

Asia tenggara menurut beberapa ahli cenderung konfliktual atau *enmity* (Emmers, 2017; Huxley, 1990; Kivimäki, 2008; Ruland, 2020). Buzan (1988) menyatakan meskipun kompleks keamanan regional di kawasan Asia Tenggara cenderung konfliktual, konflik akan sulit terjadi kecuali terdapat dorongan dari pihak eksternal (Buzan, 1988). Dalam konteks Asia Tenggara saat ini, persaingan yang terjadi antara China dan Amerika Serikat berpotensi menjadi pendorong munculnya konflik terbuka di Asia Tenggara sebagaimana disampaikan Buzan.

Seiring dengan dinamika persenjataan dan kompleks keamanan Asia Tenggara yang cenderung konfliktual, pemerintah perlu meningkatkan pertahanan di sepanjang perbatasan, baik itu laut, udara maupun darat. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengakui permasalahan perbatasan menjadi salah satu ancaman yang harus dihadapi (Kementerian Pertahanan Indonesia, 2015). Dalam konteks perbatasan darat, garis perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal ini dikarenakan Indonesia dan Malaysia secara historis pernah terlibat dalam konflik di Kalimantan, yang dikenal sebagai “konfrontasi Indonesia – Malaysia” (Nailufar, 2020).

Malaysia melalui program penguatan kapabilitas militernya, telah melakukan akuisisi *main battle tank* PT-91M Twardy. *Main battle tank* milik Malaysia ini kemudian ditempatkan di sepanjang perbatasan dengan Indonesia (Hermawan, 2016). Kehadiran *main battle tank* Malaysia di wilayah perbatasan perlu diimbangi oleh kehadiran kekuatan milik Indonesia. *Medium battle tank* Harimau yang dikembangkan Indonesia menjadi pilihan yang rasional tepat untuk memperkuat pertahanan Indonesia demi menjaga wilayah perbatasan darat. Hal ini dikarenakan *main battle tank* Leopard 2 milik Indonesia bisa dikatakan hampir mustail untuk digelar di perbatasan Kalimantan. Bobot yang sangat berat hingga topografi hutan lebat sangat menyulitkan pergerakan *main battle tank* Leopard 2. Sebaliknya, *medium battle tank* dengan bobot jauh lebih ringan dan kemampuan mobilitas yang lebih baik menjadikannya ideal ditempatkan di perbatasan Kalimantan.

Seluruh kondisi lingkungan strategis eksternal Indonesia yang dinamis dan kompleks ini juga menimbulkan konsekuensi lain dalam aspek pertahanan. Sebagaimana diketahui, Indonesia sejak lama dikenal menerapkan prinsip politik bebas-aktif, yang artinya Indonesia tidak tergabung dalam satu blok aliansi tertentu. Indonesia juga bahkan diketahui merupakan

bagian dan pelopor gerakan non-blok yang dibentuk pada era perang dingin. Prinsip politik-bebas aktif ini memiliki implikasi yang harus dikelola dengan baik oleh Indonesia, termasuk dalam aspek pertahanan. Secara teoretis keikutsertaan suatu negara dalam aliansi pertahanan akan menghadirkan *extended deterrence* yang mampu mencegah terjadinya serangan kepada negara tersebut (Bak, 2018; Johnson et al., 2015; Zagare & Kilgour, 2000).

Terkait kenyataan Indonesia tidak tergabung dalam satu aliansi apapun maka dipastikan Indonesia harus mengandalkan diri sendiri dengan melakukan upaya peningkatan kapabilitas militer guna menghasilkan *direct deterrence* untuk mencegah serangan. Oleh karena harus mengandalkan diri sendiri maka negara tanpa aliansi akan semakin persisten mengejar kemandirian pertahanan yang diimplementasikan melalui pengembangan industri pertahanan maupun sistem persenjataan (Bitzinger & Kim, 2005).

Menyadari kompleksitas dan ancaman yang hadir dari lingkungan strategis, Pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo telah melakukan transformasi organisasi TNI. Transformasi organisasi yang dimaksud diantaranya adalah pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I – III, pembentukan Divisi III Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) hingga Komando Armada III (Hakim, 2019; Saputri, 2020). Pembentukan organisasi – organisasi baru yang ditujukan untuk memperkuat pertahanan dan kesiapan Indonesia menghadapi dinamika lingkungan strategis serta ancaman yang ditimbulkan ini tentunya membutuhkan peningkatan jumlah alutsista. Sebagaimana Divisi I dan II Kostrad yang memiliki batalyon kavaleri untuk kekuatan *battle tank*, maka pembentukan Divisi III Kostrad pun akan membutuhkan kehadiran tank. Kebutuhan *battle tank* inilah yang akan diisi oleh *medium battle tank* Harimau.

Pakar pertahanan Indonesia sekaligus Analis Utama Politik Keamanan Laboratorium Indonesia 2045, Andi Widjajanto Ph.D mengkonfirmasi nilai strategis *medium battle tank* Harimau bagi pertahanan Indonesia. Menurutnya kehadiran *medium battle tank* Harimau diarahkan untuk memperkuat pertahanan Indonesia untuk menghadapi ancaman yang hadir dari kondisi lingkungan strategis yang tidak menentu. Termasuk didalamnya pertahanan dan pengamanan ruang perbatasan darat Indonesia, terutama di dua ruang perbatasan darat terpanjang yakni Kalimantan dan Papua. *Medium battle tank* Harimau lebih cocok untuk

manuver dalam yang menjadi doktrin dasar Angkatan Darat. Selain itu, Andi Widjajanto, Ph.D juga mengafirmasi adanya pertimbangan kebutuhan *medium battle tank* untuk memperkuat kebutuhan Divisi I – III Kostrad maupun Kogabwilhan I – III (Wawancara dengan Andi Widjajanto, Ph.D, 16 Juni 2021).

Berdasarkan temuan empirik yang disebutkan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan strategis di kawasan Asia Tenggara dinamis serta berpotensi berujung pada konflik. Kenyataan ini kemudian menempatkan Indonesia pada posisi yang berbahaya jika mengalami ketergantungan terhadap negara produsen senjata. Pertama, Indonesia tidak bisa bergantung pada alutsista yang berasal dari Amerika Serikat dan China, karena rawan digunakan menjadi elemen diplomasi koersif kedua negara tersebut untuk mempengaruhi kebijakan dan dukungan Indonesia, terutama terkait kompetisi keduanya di Laut China Selatan. Terlebih lagi Indonesia juga harus mewaspadaai kemungkinan klaim China terhadap wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna.

Kedua, posisi Indonesia yang tidak memihak pada pihak manapun di kompetisi antara Amerika Serikat dan China semakin tidak menjamin Indonesia akan bebas dari bayang-bayang tindakan koersif, seperti embargo senjata yang mungkin dilakukan keduanya. Pengembangan alutsista oleh industri pertahanan nasional menjadi jawaban yang tepat dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang dihadapi Indonesia. Dalam konteks pengembangan *medium battle tank* Harimau nilai strategis yang dihadirkan terkait dengan kebutuhan pengamanan wilayah perbatasan darat Indonesia dengan karakter topografi ekstrem.

3.1.3. Peningkatan Kapabilitas Militer Indonesia

Sebagaimana telah diketahui, postur pertahanan Indonesia pada saat ini sedang dalam kondisi yang tidak ideal. Banyak alutsista milik TNI yang sudah dalam usia tua sehingga tertinggal dalam aspek teknologi. Selain itu juga alutsista milik TNI pada saat ini tidak seluruhnya berada pada kondisi siap tempur. Kondisi postur pertahanan yang sedang dalam kondisi tidak ideal disaat dinamika lingkungan strategis yang harus dihadapi, maka Pemerintah Indonesia

mencanangkan program Kekuatan Pokok Minimum (KPM) sebagai upaya melakukan modernisasi persenjataan dan meningkatkan kapabilitas militernya.

Pada pelaksanaan KPM, modernisasi persenjataan yang dilakukan tidak serta-merta mengandalkan impor senjata dari negara lain. KPM harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kemandirian pertahanan. Hal ini telah ditekankan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang notabene pada era pemerintahannya program KPM dicanangkan. Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya juga pelaksanaan KPM didasarkan pada empat pilar yang mana dua diantaranya sangat terkait dengan pengembangan *medium battle tank* Harimau yakni skala prioritas dalam menghadapi ancaman aktual tanpa menafikkan ancaman potensial atau belum nyata, pembangunan yang akan menjadi kemandirian (*capability-based*) (Kementerian Pertahanan RI, 2012). Pengembangan *medium battle tank* Harimau dapat dipandang sebagai salah satu tindak lanjut dari upaya Pemerintah Indonesia melakukan peningkatan kapabilitas militer yang mengedepankan pada tujuan kemandirian pertahanan.

Medium battle tank Harimau dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dalam proses *military build-up* Indonesia demi memenuhi kebutuhan strategis dan sesuai dengan karakter peperangan era modern. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan dan teknologi-teknologi yang tersemat dalam *medium battle tank* Harimau. Sebagaimana disebutkan sebelumnya *medium battle tank* Harimau memiliki bobot 30-35 ton (FNSS, 2018). Bobot *medium battle tank* Harimau ini lebih ringan 50% dari bobot *main battle tank* Leopard 2 yang telah lebih dulu dioperasikan Indonesia yang diketahui memiliki bobot 63 ton (Hermawan, 2018).

Kemampuan dua jenis *tank* yang terpaut jauh dalam konteks bobot ini memiliki perbedaan yang tidak terlalu signifikan dalam beberapa aspek. Pertama, *Main battle tank* (MBT) Leopard 2 diketahui memiliki kemampuan untuk bergerak hingga kecepatan 72km/jam di jalan raya (Kementerian Pertahanan Singapura, 2008). Sedangkan *medium battle tank* Harimau diketahui mampu bergerak dengan kecepatan 70km/jam. Selain itu, dalam hal kemampuan menghadapi medan-medan dengan tingkat kesulitan tertentu, kemampuan *medium battle tank* Harimau mampu menyamai kemampuan MBT Leopard II. Keduanya mampu menaklukan medan dengan kemiringan 30° dan medan menanjak 60°

(FNSS, 2018; Kementerian Pertahanan Singapura, 2008). Namun *medium battle tank* Harimau dengan bobot yang lebih ringan memiliki keunggulan karena diklaim mampu beroperasi di wilayah rawa-rawa atau tanah yang tidak padat (gembur) maupun pantai (Ikhsanudin, 2018). Selain kemampuan yang tidak terlalu terpaut jauh dari sisi tersebut, *medium battle tank* Harimau dibekali kemampuan pertahanan diri dan *firepower* yang cukup baik. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, *medium battle tank* Harimau ini memiliki level proteksi hingga STANAG 5 NATO (PT. Pindad, n.d.).

Dalam aspek *firepower medium battle tank* Harimau telah didukung berbagai teknologi baru yang dapat membantu dalam pertempuran. *Turret* 105mm yang digunakan memang memiliki kaliber yang lebih kecil dibanding MBT Leopard yang berkaliber 120mm, namun *turret medium battle tank* Harimau adalah *turret* 3105 yang paling anyar yang dikembangkan CMI Belgia. Melalui *turret* terbaru produksi CMI Belgia ini mampu dengan efektif menyerang objek yang berjarak hingga 10 km. Selain itu *medium battle tank* Harimau juga telah dilengkapi kemampuan isi ulang senjata otomatis layaknya *main battle tank* Leopard 2 (FNSS, 2018; Jerchel & Schnellbacher, 1998; PT. Pindad, n.d.). Keberadaan *hunter killer system* yang dapat digunakan untuk menembak musuh yang telah dipilih komandan secara otomatis serta menentukan jenis senjata yang paling efektif juga dipercaya mampu meningkatkan efektifitas serangan dan daya hancur *medium battle tank* Harimau.

Lebih ringannya bobot *medium battle tank* Harimau dibandingkan *main battle tank* Leopard juga memberikan keuntungan lain bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan lebih ringan bobot *medium battle tank* Harimau maka Indonesia akan lebih mudah melakukan gelar kekuatan di wilayah konflik yang sedang terjadi atau sebagaimana dijelaskan oleh Coffey (1968), Rauhecker (1992) dan Willie & Delisanti (1992) disebut sebagai *strategic mobility* (Coffey, 1968; Rauhecker, 1992; Willie & Delisanti, 1992).

Aspek *strategic mobility* memang menjadi salah satu aspek penting yang kerap diperhitungkan negara dalam pembangunan postur pertahanannya. Menurut Coffey (1986) maupun Willie dan Delisanti (1992), karakter pertempuran di abad 21 akan semakin mengedepankan aspek *strategic mobility*. Negara harus mampu melakukan gelar pasukan secara cepat di lokasi konflik karena akan dapat mempengaruhi konstelasi pertempuran

(Coffey, 1968; Willie & Delisanti, 1992). Willie dan Delisanti bahkan menyatakan momen-momen krisis atau *decisive point* dalam perang di era modern bukan lagi dalam hitungan bulan atau hari, melainkan jam (Willie & Delisanti, 1992). Oleh karena pertimbangan *strategic mobility* ini negara-negara mulai mengembangkan alutsista yang memiliki bobot lebih ringan (*leaner*), lebih cepat (*faster*) tetapi juga tanpa mengorbankan aspek *lethality* atau daya hancur (*meaner*) (Sloan, 2002).

Nilai penting kehadiran *medium battle tank* Harimau bagi Indonesia dalam kerangka KPM juga terlihat dari *statement stakeholders* terkait. Menteri Pertahanan Indonesia di periode pertama pemerintahan Joko Widodo, Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu merupakan salah satu *stakeholders* tersebut. Menteri Pertahanan dalam sarasehan industri pertahanan 2017 menyatakan bahwasanya kehadiran *medium battle tank* menjadi solusi kebutuhan TNI terkait kendaraan tempur lapis baja namun dengan bobot yang ringan dan sesuai dengan topografi dan kesiapan infrastruktur Indonesia. MBT Leopard 2 yang dibeli Indonesia dianggap tidak cocok digunakan di Indonesia karena terlalu berat (Simbolon, 2017).

Menteri Pertahanan kembali mengutarakan *statement* serupa dalam kunjungannya ke Indo Defence Expo & Forum 2018:

"Kita memang cocoknya medium tank. Kalau Leopard berat itu enggak cocok. Kita mau kemana? Jalanan bisa ambrol kalau pakai Leopard, karena beratnya bisa 60 ton. Apalagi kalau sudah keluar Jawa, Sumatera dan Kalimantan yang [daerahnya] rawa-rawa. Enggak pas (CNN Indonesia, 2018)"

Pernyataan-pernyataan Menteri Pertahanan terkait tidak cocoknya MBT Leopard 2 dengan topografi serta infrastruktur Indonesia ini pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari pandangan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo ketika masih dalam status sebagai calon presiden (Capres) pada tahun 2014 menyatakan bahwa keputusan Indonesia membeli MBT Leopard 2 kurang tepat karena pertimbangan topografi dan infrastruktur Indonesia: **"Tank itu terlalu berat Pak Prabowo. Jalan kita rusak semua, jembatan kita tidak kuat menahan tank 62 ton. Oleh karena itu, sebaiknya, sebelum kita membeli alutsista, harus kita cek kita cocok tidak dengan barang itu (Detik.com, 2014b)".**

Kekhawatiran Presiden Joko Widodo bahwa *main battle tank* Leopard 2 akan menjadi sia-sia juga tercermin dari pernyataan Sekretaris Tim Kampanye Nasional yang juga merupakan pakar pertahanan terkemuka Indonesia, Andi Widjajanto, Ph.D. Dalam pernyataannya pada jurnalis, Andi Widjajanto menyatakan bahwa *main battle tank* Leopard 2 cukup sulit dimobilisasi karena bebannya mencapai 62 ton. *Main battle tank* Leopard 2 membutuhkan pesawat sekelas C-5 Galaxy untuk dapat dipindahkan. Selain itu, menurut Andi Widjajanto, dermaga-dermaga di Indonesia tidak ada satupun yang mampu menampung *main battle tank* Leopard 2 tersebut:

Pak Jokowi bertanya detail ke kami, 'Ini impor dari mana? Beratnya berapa? Bagaimana bisa sampai ke Indonesia?' Kami jelaskan ada 120 tank, masing-masing beratnya 62 ton dan itu **hanya bisa diangkut dengan pesawat Galaxy**. Akhirnya, Jokowi khawatir bahwa **infrastruktur yang ada di daerah ternyata belum siap, apalagi kalau tank Leopard akan ditempatkan di perbatasan Kalimantan Utara. Kalau tank Leopard dipaksakan, sementara infrastruktur tak disiapkan, maka akan sia-sia** (Kompas.com, 2014b)

Oleh karena berbagai keuntungan serta kemampuan *medium battle tank* Harimau ini maka pada masa yang akan datang dalam proses *military modernization* Indonesia tidak lagi perlu membeli MBT Leopard 2 atau yang sekelasnya. *Medium battle tank* Harimau dipercaya mampu diandalkan menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Hal ini tercermin dari pernyataan Menteri Pertahanan, Jenderal (Purn) Ryamizar Ryacudu yang menyatakan kedepannya Indonesia tidak akan membeli MBT Leopard 2, bahkan menurutnya MBT Leopard 2 yang sudah dimiliki Indonesia cukup dikeluarkan untuk keperluan defile HUT TNI saja (CNN Indonesia, 2018).

Nilai penitng *medium battle tank* Harimau dengan bobot yang lebih ringan dibandingkan *main battle tank* Leopard 2 karena pertimbangan kesiapan infrastruktur selain tercermin dari pernyataan-pernyataan tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan pertahanan negara. Sebagaimana yang tertulis dalam Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Indonesia tahun 2018, pemerintah memiliki kebijakan umum pertahanan periode 2015 – 2019. Salah satu tujuan strategis kebijakan umum pertahanan tersebut adalah pertahanan negara untuk keamanan wilayah, yang sasarannya adalah memiliki kekuatan darat yang mampu menjangkau daerah-daerah terpencil dan terluar

(Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan RI, 2018). Sebagaimana diketahui kondisi infrastruktur Indonesia masih belum cukup baik. Hal ini tercermin dari penilaian World Economic Forum (WEF) pada tahun 2018, Indonesia menempati peringkat 71 dari 140 negara (Hutapea, 2019). Posisi Indonesia kalah jauh dari negara tetangga seperti Singapura (peringkat 1) dan Malaysia (peringkat 32) (Hutapea, 2019).

Pengembangan *medium battle tank* Harimau yang dibekali teknologi-teknologi baru serta kemampuan mobilitas yang baik tentunya tidak bisa dilepaskan dari rencana induk pengembangan industri pertahanan Indonesia. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menetapkan satu rencana induk yang menampilkan keterkaitan dan kesinambungan antara pengembangan industri pertahanan nasional dengan upaya mencapai postur pertahanan minimum melalui KPM. Dalam dokumen rencana induk tersebut, target pemenuhan alat pertahanan dan keamanan (alpahankam) adalah alpahankam yang memiliki mobilitas tinggi serta pemukul dahsyat (KKIP, 2014).

Keterkaitan antara pengembangan *medium battle tank* Harimau dengan upaya peningkatan kapabilitas militer Indonesia juga dapat terlihat melalui kebijakan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo semenjak awal periode kepemimpinannya telah menyatakan betapa pentingnya peningkatan kapabilitas militer Indonesia. Pada pelaksanaan sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di bulan Desember tahun 2014, Presiden Joko Widodo menyatakan empat kebijakan prioritas pemerintahannya dalam bidang pertahanan. Kebijakan-kebijakan prioritas tersebut adalah (1) Pemenuhan kebutuhan pertahanan, baik itu yang terkait dengan kesejahteraan prajurit atau penyediaan alutsista (alat utama sistem pertahanan), (2) kemandirian pertahanan agar mampu menghindari ketergantungan pada pasokan produk impor, (3) Ketiga, pertahanan bukan hanya sekedar memenuhi kekuatan pokok minimum, melainkan harus bertujuan membangun TNI menjadi kekuatan yang disegani, dan (4) menempatkan kegiatan pertahanan keamanan negara sebagai bagian integral dari pendekatan keamanan yang komprehensif (Armenia, 2014).

Jika dilihat pada kebijakan-kebijakan tersebut maka akan terlihat bahwasanya Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan peningkatan kapabilitas militer dengan mengedepankan kemandirian. Kemandirian pertahanan ini menjadi penting jika

Indonesia memang benar-benar ingin menghadirkan TNI yang menyandang status sebagai kekuatan yang disegani, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan minimum sebagaimana poin ketiga. Mantan Katimlak KKIP, Laksamana TNI (Purn) Sumardjono turut mengkonfirmasi hal tersebut. Menurutnya alutsista yang di Indonesia saat ini tidak ditakuti negara lain karena Indonesia membelinya dari negara lain (Prireza, 2018). Hal ini sesuai dengan yang diutarakan sebelumnya, bahwa kredibilitas power negara tidak akan optimal jika mengalami ketergantungan senjata terhadap negara lain (Kinsella, 1998; Neuman, 1988). Selain itu juga, kemandirian pertahanan disebut sebagai salah satu kebijakan yang banyak dilakukan negara yang berkeinginan menyandang status sebagai *great power* (Bitzinger, 2015b, 2017).

Analisis Utama Politik Keamanan Laboratorium Indonesia 2045, Iis Gindarsah M.Sc, menyatakan bahwsanya kehadiran *medium battle tank* Harimau akan mampu meningkatkan kekuatan TNI di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan kehadiran *medium battle tank* Harimau ini akan menggantikan peranan tank-tank ringan milik TNI yang sudah berusia tua serta menghadirkan daya hancur, proteksi dan daya jelajah yang lebih baik. Namun menurutnya, hal ini baru akan efektif terjadi jika Pemerintah memutuskan untuk melakukan akuisisi *medium battle tank* Harimau dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan (Wawancara dengan Iis Gindarsah, 6 Juni 2021).

Andi Widjajanto Ph.D turut menyampaikan dampak positif yang dihadirkan *medium battle tank* Harimau dalam upaya peningkatan kapabilitas militer Indonesia. *Medium battle tank* Harimau menjadi jawaban dari kebutuhan TNI AD melakukan modernisasi persenjataan dengan memperhatikan topografi Indonesia. Setidaknya terdapat dua alasan yang menjadikan *medium battle tank* Harimau akan lebih efektif meningkatkan kapabilitas TNI AD dalam menghadapi peperangan jika dibandingkan *main battle tank* Leopard 2. Pertama, Kondisi medan pertahanan Indonesia tidak ada yang sesuai dan dipersiapkan untuk peperangan dengan menggunakan *main battle tank*. *Main battle tank* hanya akan cocok jika peperangan dilakukan di medan terbuka seperti padang pasir atau padang rumput. Topografi Indonesia yang didominasi hutan tidak mungkin di lewati *main battle tank*, namun lain halnya dengan *medium battle tank*.

Kedua, *main battle tank* juga hanya cocok digunakan untuk peperangan kota atau *urban warfare*, yakni peperangan yang dilakukan untuk menguasai atau mempertahankan satu kota. Akan tetapi Indonesia tidak memiliki *tactical doctrine* yang sifatnya *fortifications*. Indonesia memiliki doktrin perang *protracted* yang membutuhkan *strategic mobility*. Dalam hal *strategic mobility*, *medium battle tank* Harimau memiliki nilai *strategic mobility* yang lebih baik jika dibandingkan dengan *main battle tank* (Wawancara dengan Andi Widjajanto, Ph.D, 16 Juni 2021).

Mayor Kav. Adzan Marjohan Nasution, SH. MH. Selaku Kasilitbangmatsus dan Kudmil Pusenkav Kodilat AD, pengembangan *medium battle tank* Harimau memiliki peranan yang sangat penting bagi kekuatan TNI AD. Hal ini dikarenakan *medium battle tank* Harimau memang sejak awal dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasi TNI AD di kondisi medan khas Indonesia. Selain itu, kehadiran *medium battle tank* Harimau dipersiapkan untuk mengganti tank ringan AMX-13 produksi tahun 1938 yang hingga saat ini masih di gunakan TNI AD (Wawancara dengan Mayor Adzan Marjohan Nasution, SH, MH., 25 Juni 2021).

Berdasarkan temuan empirik dan analisis yang dilakukan maka terlihat terdapat kesinambungan pengembangan *medium battle tank* Harimau dengan upaya peningkatan kapabilitas militer Indonesia melalui KPM. Selain itu terlihat pula urgensi pengembangan *Medium battle tank* Harimau dalam proses pencapaian KPM. Hal ini dikarenakan *medium battle tank* Harimau ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan alutsista TNI juga sengaja dikembangkan menyesuaikan kondisi geografis Indonesia agar mampu beroperasi secara optimal menjaga kedaulatan Indonesia. Pengembangan senjata seperti *medium battle tank* Harimau oleh industri pertahanan nasional sebagai upaya mencapai kemandirian pertahanan, merupakan hal yang sering dipilih negara yang memiliki ambisi menjadi negara *great power* seperti Indonesia.

3.1.4 Keberhasilan Industri Pertahanan Nasional

Bitzinger dan Kim (2005) serta Bagci dan Kurc (2017) menyatakan bahwa di negara-negara *second-tier* dalam konteks kelas industri pertahanan, pengembangan industri pertahanan

tidak bisa dilepaskan dari impian kemandirian pertahanan (*autarky*) (Bağcı & Kurç, 2017; Bitzinger & Kim, 2005). Namun demikian, sesungguhnya *autarky* bukan merupakan hal yang mudah dicapai oleh negara. Moravcsik (1991) menyatakan bahwasanya *Autarky* membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Biaya tinggi yang harus dikeluarkan negara untuk mencapai status *autarky* ini menyebabkan hanya negara-negara tertentu – dalam hal ini *superpower* dan kaya – yang mampu mencapainya (Moravcsik, 1991).

Jika merujuk pada argumentasi Moravcsik (1991) tersebut dapat dikatakan bahwa Indonesia maupun negara-negara Asia yang sedang gencar mengembangkan industri pertahanan nasionalnya tidak memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk menggapai *autarky*. Namun pada kenyataannya negara-negara di Asia seperti Korea Selatan dan Indonesia tetap persisten bahwa *autarky* masih mampu dicapai. Bağcı & Kurç (2017) menyatakan persistensi mengejar *autarky* dipengaruhi oleh keberhasilan memproduksi alutsista melalui industri pertahanan nasional sebelumnya (Bağcı & Kurç, 2017).

Argumentasi Bağcı dan Kurç (2017) ini sesuai jika dilihat dalam konteks pengembangan *medium battle tank* Harimau. Sebelum Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengembangkan *medium battle tank* Harimau yang ditujukan untuk menyongsong kemandirian pertahanan, industri pertahanan nasional telah berhasil mengembangkan dan memproduksi beberapa jenis alutsista. Terlebih lagi, keberhasilan industri-industri pertahanan nasional memproduksi alutsista sebagaimana disebutkan sebelumnya banyak yang diraih melalui skema kerjasama internasional layaknya pengembangan *medium battle tank* Harimau (Muradi, 2016).

Hingga saat ini PT. PAL sebagai *lead intregator* industri pertahanan bidang maritim telah berhasil memproduksi berbagai jenis kapal dari berbagai kelas. Kapal-kapal produksi PT.PAL diantaranya adalah kapal patroli cepat 28 Meter (FPB 28M), FPB 38 M Aluminium, kapal cepat rudal (KCR) 60 M, Landing Platform Dock (LPD) 125 M dan 124M, *strategic sealift vessel* (SSV) 123 M, kapal perusak kawal rudal (PKR) 105 M serta kapal selam kelas Nagapasa (PT. PAL, n.d.).

Keberhasilan PT. PAL ini tidak bisa dilepaskan dari skema kerjasama internasional. FPB 28M & FPB 57M diproduksi PT. PAL sejak tahun 1979 (Karim, 2014; Muradi, 2016). LPD 125M hasil kerjasama dengan Daewoo International Korea Selatan dimulai semenjak tahun 2005. PKR 105M hasil kerjasama dengan Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) Belanda sejak tahun 2012 dan Kapal Selam kelas Nagapasa merupakan hasil kerjasama dengan Daewoo sejak tahun 2011 (Al-fadhat & Effendi, 2019; PT. PAL, n.d.; Sandi, 2020). Keberhasilan PT. PAL memproduksi beberapa jenis alutsista tersebut tidak berhenti begitu saja. Sesuai dengan argumentasi Bagci dan Kurc (2017), PT. PAL kemudian melakukan pengembangan lanjutan secara mandiri. Hasil dari pengembangan lanjutan ini diantaranya adalah KCR 60M dan SSV 123M. KCR 60M merupakan hasil pengembangan FPB 57M oleh PT. PAL (Hardjono, 2017). Sedangkan SSV 123M dan LPD 124M merupakan hasil pengembangan lanjutan dari LPD 125M (PT. PAL, 2017).

PT. DI sebagai *lead integrator* industri pertahanan bidang dirgantara, hingga saat ini telah memproduksi beberapa jenis pesawat terbang maupun helikopter. Tercatat PT. DI telah memproduksi pesawat NC-212 berbagai varian, CN-235 berbagai varian, CN-295 serta yang terbaru adalah N219 yang sedang melalui tahap ujicoba dan sertifikasi. Dalam lini *rotary wing* atau helikopter, PT. DI juga telah memiliki pengalaman memproduksi helikopter jenis AS550, AS565MBe, NSA330s Superpuma dan Bell 412EP dan NBO-105 (Dirgantara Indonesia, n.d.-b).

PT. Dahana sebagai industri pertahanan yang memiliki fokus produksi pada bahan peledak misalnya telah mampu memproduksi bom P-100L serta P-250L yang merupakan jenis bom *High Drags General Purpose* (HDGP) (Dahana, n.d.; Effendi, 2019). PT. LEN sebagai industri pertahanan dibidang elektronika juga telah mampu menghasilkan beberapa produk. Produk-produk yang dihasilkan diantaranya adalah radar maritim (Lenradar S-256/S-1000/S-5000/S-20000), *battlefield management system* (BMS), transponder sasaran torpedo hingga *combat management system* (CMS) Mandhala (LEN, n.d.).

Selain industri-industri pertahanan nasional tersebut, PT. Pindad yang ditunjuk sebagai *lead integrator* juga telah memiliki kemampuan memproduksi beberapa jenis Alutsista. Senada dengan PT. PAL dan PT. DI, produk-produk yang diproduksi PT. Pindad

bersumber dari kerja sama yang dijalin dengan industri pertahanan negara lain maupun pengembangan mandiri. Beberapa jenis alutsista maupun alat pertahanan dan keamanan (Alpanhankam) yang telah diproduksi PT. Pindad diantaranya adalah Panser Anoa, kendaraan taktis (Rantis) Komodo, senapan serbu, senjata genggam, pistol, peluncur granat, amunisi berbagai kaliber dan granat (PT. Pindad, n.d.).

Tidak berbeda dengan apa yang dilakukan PT. PAL, keberhasilan PT. Pindad mengembangkan dan memproduksi alutsista di era sebelumnya mendorong dilakukannya pengembangan lanjutan. Jika PT. PAL dengan KCR60M dan SSV 123M, maka *medium battle tank* Harimau adalah bentuk pengembangan lanjutan PT. Pindad. Dorongan PT. Pindad melakukan pengembangan dan produksi *medium battle tank* Harimau tidak terlepas dari keberhasilan PT. Pindad sebelumnya.

Berdasarkan penuturan Direktur Utama PT. Pindad 2013 – 2014, Tri Hardjono, setidaknya terdapat empat alasan mengapa PT. Pindad yakin dan bertekad melakukan pengembangan *medium battle tank*. Empat alasan tersebut adalah pengalaman dan keberhasilan PT. Pindad merakit tank Scorpion, mengembangkan Panser Anoa, memodifikasi tank kelas ringan lawas TNI AD, yakni AMX-13 serta keberhasilan membuat *prototype Armored Personnel Carrier* (APC) beroda rantai (Detik.com, 2014a). Pakar ekonomi pertahanan Indonesia, Curie Maharani (2016) dalam disertasinya juga menyampaikan argumentasi yang serupa. Menurutnya setelah keberhasilan PT. Pindad mengembangkan Panser Anoa, maka yang menjadi prioritas pengembangan lanjutan adalah tank kelas ringan atau medium (Savitri, 2016).

Sesuai dengan pernyataan Tri Hardjono, PT. Pindad memang tercatat berhasil merakit tank Scorpion pesanan TNI AD. Perakitan tank Scorpion oleh PT. Pindad ini dimungkinkan melalui kesepakatan mekanisme *offset* dalam akuisisi 35 tank Scorpion dari Inggris. Dalam melakukan perakitan di PT. Pindad tercatat sekitar 20 orang ahli PT. Pindad yang terlibat dan berhasil merakit 10 unit tank Scorpion (Savitri, 2016).

Pengembangan panser Anoa menjadi salah satu keberhasilan besar PT. Pindad. Hal ini disebabkan oleh setidaknya dua hal. Pertama, panser Anoa merupakan alutsista yang

proses pengembangannya murni dilakukan ahli-ahli dari PT. Pindad (Karim, 2014). Panzer Anoa sebagaimana dikenal saat ini bermula ketika kunjungan Wakil Presiden periode 2004 – 2009, yakni Jusuf Kalla ke PT. Pindad. Dalam kunjungannya tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla melihat keberhasilan PT. Pindad membangun panzer yang dikembangkan dari rangka truk komersial (Karim, 2014). Setelah melihat keberhasilan tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung menyatakan komitmen Pemerintah Indonesia membeli panzer yang dikembangkan PT. Pindad tersebut sebanyak 150 unit. Komitmen tersebut dibubuhkan langsung dalam gambar teknik panzer dan dibubuhi tandatangan (Karim, 2014). Kedua, panzer Anoa pada saat ini cukup mendapatkan perhatian dari dunia internasional, yang dibuktikan dengan digunakannya ratusan panzer Anoa oleh pasukan penjaga perdamaian PBB. Selain itu, panzer Anoa juga telah mampu di ekspor ke beberapa negara (Karim, 2014; Savitri, 2016).

Selain berhasil merakit Tank Scorpion dan mengembangkan Panzer Anoa, PT. Pindad juga memiliki keberhasilan melakukan modifikasi atau *retrofit* tank AMX-13 milik TNI AD. Proses modifikasi atau *retrofit* ini dilakukan PT. Pindad sejak tahun 2011 (Hermawan, 2014). Tank AMX-13 milik TNI AD berhasil dimodifikasi oleh PT. Pindad dalam beberapa aspek. Pertama, ahli-ahli PT. Pindad berhasil mengganti mesin yang digunakan tank AMX-13 ini dari yang sebelumnya berbasis diesel menjadi bensin. Kedua, modifikasi juga berhasil dilakukan dalam aspek sistem penembakan. Sistem penembakan di tank AMX-13 hasil modifikasi PT. Pindad ini berubah menjadi otomatis. Perubahan ketiga dan yang paling mencolok terlihat adalah pergantian atau *upgrade* meriam utama yang digunakan. Tank AMX-13 hasil modifikasi PT. Pindad dibekali meriam utama berkaliber 105mm, lebih besar dibandingkan meriam utama sebelumnya yang berkaliber 75-90mm (Hermawan, 2014; Tempo.co, 2014).

Keberhasilan PT. Pindad lainnya yang menurut Direktur Utama Pindad 2013 – 2014 Tri Hardjono mendorong pengembangan medium battle tank adalah keberhasilan mengembangkan *prototype* APC roda rantai. *Prototype* APC roda rantai yang dikembangkan ahli-ahli PT. Pindad ini sudah diperkenalkan pada publik pada tahun 2013. *Prototype* APC roda rantai ini kemudian diberi nama tank SBS. Untuk spesifikasi teknis ketika itu tank SBS

memiliki dimensi panjang 5.68 meter, lebar 2.77 meter dan tinggi 1.97 meter. Tank SBS ini disebut akan mampu mengangkut 10 orang kru atau pasukan dengan bobot total 13 ton (PT. Pindad, 2013). Berdasarkan *prototype* yang sempat dipublikasikan, terlihat ada kemiripan desain antara tank SBS ini dengan Panzer Anoa yang telah berhasil dikembangkan sebelumnya (Detik.com, 2013).

Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2014 – 2019, Rini Soemarno juga mengutarakan harapan dan keyakinannya terhadap pengembangan *medium battle tank* Harimau. Menteri BUMN menyatakan bahwa dengan melihat keberhasilan-keberhasilan industri pertahanan sebelumnya, seperti Panzer Anoa, ia berharap dan yakin pengembangan *medium battle tank* Harimau juga akan sukses (Fikri, 2019b).

Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis menjelaskan bahwasanya keputusan Indonesia melakukan pengembangan *medium battle tank* Harimau tidak bisa dilepaskan dari kondisi industri pertahanan nasional. Menurut Prof. Bondan, dalam mengembangkan alutsista atau industri pertahanan, negara dihadapkan pada dua pertimbangan, yakni: (1) ketersediaan dan kemampuan sumber daya serta (2) kondisi ideal yang diinginkan. Dalam konteks Indonesia, karena terbatasnya sumber daya yang ada maka pemerintah harus memilih. Berdasarkan *existing condition* yang ada seperti kemampuan teknologi dan keberhasilan PT. Pindad sebelumnya, maka Pemerintah Indonesia memilih untuk melakukan pengembangan *medium battle tank* Harimau (Wawancara dengan Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si, 14 Juni 2021).

Andi Widjajanto Ph.D, menyatakan hal yang serupa. Menurutnya keputusan Indonesia mengembangkan *medium battle tank* sangat dipengaruhi oleh keberhasilan PT. Pindad sebelumnya. Pemerintah Indonesia realistis memandang kemampuan yang dimiliki industri pertahanan nasional. Merujuk pada kemampuan dan keberhasilan PT. Pindad sebelumnya dalam mengembangkan Panzer Anoa dan retrofit tank ringan AMX-13, maka yang menjadi pilihan rasional adalah mengembangkan *medium battle tank*. Akan menjadi tidak realistis jika Pemerintah memaksa PT. Pindad untuk langsung melakukan lompatan kemampuan dengan mengembangkan *main battle tank* (Wawancara dengan Andi Widjajanto, Ph.D, 16 Juni 2021).

Dimas Aryo Pratomo selaku Assistant Manager Pemasaran Hankam PT. Pindad dalam wawancara dengan penulis mengkonfirmasi besarnya pengaruh keberhasilan PT. Pindad mengembangkan Panser Anoa maupun kendaraan tempur Komodo. Menurut Dimas, pada mulanya PT. Pindad mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk mengembangkan kendaraan tempur roda ban, dan setelah berhasil dengan Panser Anoa serta Komodo, maka Pemerintah memandang sudah saatnya PT. Pindad naik kelas dengan mengembangkan kendaraan lapis baja roda rantai atau *track* (Wawancara dengan Dimas Aryo Pratomo, 25 Juni 2021).

Berdasarkan data atau temuan empirik yang telah disebutkan sebelumnya, keputusan Indonesia melakukan pengembangan *medium battle tank* Harimau dapat dipahami. Melalui keberhasilan-keberhasilan industri pertahanan nasional sebelumnya, Pemerintah Indonesia memandang pengembangan *medium battle tank* Harimau menjadi hal yang mungkin dan harus dilakukan untuk mencapai impian kemandirian pertahanan. Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, PT. Pindad yang ditugasi oleh Pemerintah mengembangkan *medium battle tank* Harimau secara eksplisit menyatakan keputusan pengembangan ini didorong oleh keberhasilan PT. Pindad sebelumnya.

3.2 Ambisi Memperoleh Keuntungan Ekonomi dan Kedigdayaan Ekonomi - Teknologi

Jika sub-bab sebelumnya dimaksudkan untuk melihat keterkaitan antara pengembangan *medium battle tank* Harimau dengan ambisi Indonesia pada aspek strategis dan politis di level internasional, maka sub-bab ini akan melihat pada ambisi pada aspek yang berbeda. Sub-bab ini akan melihat keterkaitan antara pengembangan *medium battle tank* Harimau dengan ambisi Indonesia meraih status atau *prestige* di tingkat Internasional dalam aspek ekonomi dan teknologi. Sebagaimana disebutkan oleh Bitzinger dan Kim (2005) maupun Bitzinger (2011 & 2015), meskipun negara-negara *second tier* memahami pengembangan alutsista melalui industri pertahanan nasional kerap tidak efisien, ambisi menjadi negara yang mampu memproduksi dan mengeksport alutsista mampu mendorong negara menafikkan fakta tersebut (Bitzinger, 2011a, 2015b; Bitzinger & Kim, 2005).

Keberhasilan negara memproduksi dan mengekspor Alutsista dipandang dapat mendatangkan berbagai keuntungan bagi negara. Pertama, pengembangan Alutsista melalui industri pertahanan nasional dapat memacu industrialisasi pada bidang industri pendukung. Kedua, Selain mendatangkan keuntungan dari kegiatan ekspor, status sebagai negara eksportir senjata juga dipandang sebagai predikat yang akan meningkatkan *prestige* negara. Ketiga, pengembangan Alutsista melalui industri pertahanan nasional menjadi salah satu cara menunjukkan kedigdayaan teknologi maupun kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan *prestige* dari negara itu sendiri. Oleh karena itu Sub-bab ini akan melihat apakah dalam keputusannya mengembangkan *medium battle tank* Harimau Indonesia didorong oleh ambisinya memperoleh status sebagai negara dengan kedigdayaan ekonomi, teknologi dan sumber daya manusia dibandingkan negara lain, minimal di tingkat kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut akan dilihat melalui empat indikator.

Pertama, *spin-off* terhadap produk sipil dalam pengembangan *medium battle tank* Harimau. Kedua, pencapaian nilai ekspor industri pertahanan nasional maupun potensi ekspor *medium battle tank* Harimau. Ketiga, intervensi-intervensi yang dilakukan pemerintah untuk menjamin keberhasilan pengembangan industri pertahanan nasional pada umumnya maupun *medium battle tank* Harimau. Keempat, komparasi keberhasilan pengembangan *medium battle tank* Harimau dengan kemampuan produksi industri pertahanan negara lain.

3.2.1 Spin-off Dari Pengembangan Medium Battle Tank Harimau

Persistensi negara-negara melakukan pengembangan alutsista oleh industri pertahanan nasionalnya menurut Bitzinger dan Kim (2005), Bitzinger (2015) turut dipengaruhi oleh ambisi atau keinginan memperoleh status tertentu. Dalam konteks ekonomi, negara tetap persisten mengembangkan alutsista salah satunya karena ingin meraih status sebagai negara yang memiliki industri maju (Bitzinger, 2015b; Bitzinger & Kim, 2005). Pengembangan alutsista oleh industri pertahanan nasional dipercaya mampu merealisasikan impian negara menyangkal status sebagai negara industri maju. Hal tersebut dilakukan melalui efek lanjutan (*spill-over effect*) dari kegiatan penelitian dan pengembangan alutsista yakni melalui komersialisasi teknologi yang sebelumnya digunakan untuk alutsista menjadi produk untuk

keperluan sipil. Hal ini sering disebut dengan istilah *spin-off* (Kogila Balakrishnan, 2016; Brzoska, 2007).

Fenomena *Spin-off* ini memang bukan merupakan hal yang baru. Berbagai teknologi sipil yang hadir saat ini seperti radar sipil, peti kemas, teknologi komputer merupakan contoh keberhasilan *spin-off* dari teknologi pertahanan menjadi teknologi yang dimanfaatkan untuk komersial atau sipil (Kogila Balakrishnan, 2016). *Spin-off* dari pengembangan alutsista oleh industri pertahanan ke kebutuhan sipil pada dasarnya juga menjadi harapan Pemerintah Indonesia (Karim, 2014). Wakil Presiden Jusuf Kalla pada tahun 2016, menyatakan bahwa industri pertahanan akan ikut mendorong kemajuan teknologi sipil (Hulwan, 2016).

Harapan dan kepercayaan bahwa melalui pengembangan alutsista oleh industri pertahanan nasional akan mendorong kemajuan teknologi dan industri negara secara keseluruhan bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Semenjak era Presiden Soeharto, Pemerintah Indonesia telah memiliki harapan dan keyakinan yang tersebut. Ketika itu pemerintah berkeyakinan pengembangan alutsista oleh industri pertahanan nasional akan mampu membawa Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat kemajuan industri dan teknologi yang unggul (Bitzinger, 2015b).

Mantan Presiden B.J. Habibie yang dikenal bukan hanya sebagai seorang Presiden tetapi juga seorang teknokrat turut megutarakan pentingnya industri pertahanan demi mewujudkan impian Indonesia menjadi negara maju. Dalam acara Musyawarah Perencanaan Nasional (Musrenas) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tahun 2014, ia mengutarakan jika Indonesia ingin menjadi negara maju maka Indonesia harus menguasai 10 industri kunci. Dari 10 industri kunci yang harus dikuasai, salah satunya adalah industri pertahanan (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2014).

Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si dalam wawancara yang dilakukan penulis menyatakan bahwasanya negara memang mengharapkan dan berambisi terciptanya *spin-off* teknologi dari pengembangan alutsista seperti *medium battle tank* Harimau. Hal ini dikarenakan kemandirian industri pertahanan terutama yang mampu menciptakan *spin-off* teknologi akan memberikan efek lanjutan terhadap kemajuan industri lain dan ekonomi.

Terlebih lagi menurut Prof. Bondan, kemajuan industri pertahanan juga menjadi barometer kemajuan bangsa (Wawancara dengan Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si, 14 Juni 2021).

Berdasarkan paparan sebelumnya terlihat bahwasanya pengembangan alutsista oleh industri pertahanan nasional seperti *medium battle tank* Harimau diharapkan akan menjadi katalis kemajuan industri dan ekonomi Indonesia. Berdasarkan pemaparan Dimas Aryo Pratomo, *spin-off* teknologi yang terjadi berdasarkan teknologi *medium battle tank* Harimau adalah teknologi roda rantai atau *track*. Teknologi *track* ini digunakan PT. Pindad untuk produk industrial seperti eskavator maupun alat-alat pertanian (Wawancara dengan Dimas Aryo Pratomo, 25 Juni 2021).

3.2.2 Ekspor Industri Pertahanan Indonesia dan Potensi Medium Battle Tank Harimau

Secara teoretis menurut Bitzinger dan Kim (2005) negara akan melakukan pengembangan industri pertahanan nasional maupun alutsista karena terdorong oleh potensi keuntungan ekonomi melalui kegiatan ekspor yang dilakukan. Selain itu Bitzinger dan Kim (2005) juga menyatakan bahwa keberhasilan negara mengekspor alutsista hasil produksinya maka keberhasilan tersebut akan menjadi pendorong dilakukannya pengembangan alutsista lain oleh industri pertahanan nasional (Bitzinger & Kim, 2005). Argumentasi Bitzinger dan Kim ini kemudian juga disampaikan oleh Bağcı dan Kurc (2017). Menurut Bağcı dan Kurc negara akan semakin persisten melakukan pengembangan alutsista dan industri pertahanan nasional ketika mereka telah berhasil menjual alutsista ke negara lain (Bağcı & Kurç, 2017).

Dalam konteks Indonesia, hal ini terkonfirmasi melalui data empirik yang berhasil dihimpun. Indikator pertama adalah adanya pernyataan yang dikeluarkan pejabat maupun *stakeholders* terkait bahwasanya pengembangan industri pertahanan nasional harus mampu membawa keuntungan ekonomi melalui transaksi ekspor. Kedua, industri pertahanan nasional telah mampu mencatatkan penjualan alutsista yang dikembangkan maupun diproduksi ke negara lain. Ketiga, keberhasilan *medium battle tank* Harimau menarik minat berbagai negara.

Menteri Pertahanan Indonesia pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama, yakni Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu pernah mengeluarkan pernyataan terkait harapannya agar Indonesia mampu mengeksport alutsista:

Pembangunan industri pertahanan pada gilirannya dapat meningkatkan **kemampuan dan kekuatan pertahanan negara serta mendorong pertumbuhan kemandirian ekonomi** menuju masyarakat **Indonesia yang makmur dan sejahtera**. Marilah kita tunjukkan kepada dunia bahwa produk alutsista buatan Indonesia yang digunakan oleh TNI memiliki kualitas dan kemampuan yang handal dan prima didalam memperkuat sistem pertahanan Indonesia. Sehingga dunia akan melihat kemampuan alutsista produksi dalam negeri Indonesia, untuk kemudian **memesan alutsista tersebut dari Indonesia** (Hakim, 2018).

Muhammad Herindra selaku wakil menteri pertahanan dalam momen Rapat Kerja BUMN Industri Pertahanan 2021 menyatakan bahwasanya kapasitas industri pertahanan nasional berinovasi dan mandiri turut membawa dampak positif bagi perekonomian negara. Herindra turut menyatakan bahwa industri pertahanan nasional harus mampu menjadi pemain dalam level internasional:

Kita pernah mengalami suatu masa di mana kita tidak punya apa-apa, terkena embargo, bagaimana lemahnya pertahanan kita. Untung tidak ada perang (saat itu). Tapi kita tidak boleh seperti itu, harus kuat, harus mandiri. **Saya harapkan kita juga bisa menjadi bagian dari *global supply chain***. Dan inovasi tentunya, karena saya lihat alutsista itu berkembang terus. Dan **yang paling penting adalah ekonomi, karena dengan adanya industri yang kuat tentunya akan dapat menggerakkan ekonomi** (Kementerian BUMN, 2021).

Harapan dan ambisi agar produk industri pertahanan nasional seperti *medium battle tank* Harimau dapat mendunia dan diekspor dapat ditilik Melalui keberhasilan industri pertahanan nasional sebelumnya. PT. Pindad sebagai industri pertahanan nasional yang mengembangkan dan memproduksi *medium battle tank* Harimau merupakan salah satu industri pertahanan nasional yang sudah mampu menjual produknya keluar negeri. Produk yang berhasil diekspor tersebut adalah Panzer Anoa. Panzer Anoa produksi PT. Pindad dapat dikatakan telah mendunia karena digunakan oleh berbagai negara serta pasukan penjagan perdamaian PBB (Fikri, 2019b; Media Indonesia, 2019)

Panser Anoa merupakan produk hasil pengembangan ahli-ahli PT. Pindad dan diperkenalkan untuk pertama kalinya pada tahun 2006. Sebagai salah satu produk industri pertahanan nasional, Panser Anoa juga menjadi salah satu alutsista andalan Indonesia untuk dijual ke negara lain. Terbukti dengan telah terjualnya Panser Anoa ke berbagai negara, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Malaysia tercatat memiliki 32 Panser Anoa dengan kontrak pembelian senilai 80 juta dollar Amerika Serikat (Kumparan, 2018; Tempo.co, 2014). Sedangkan Brunei Darussalam pada tahun 2018 memutuskan untuk membeli 45 unit Panser Anoa untuk memperkuat angkatan bersenjataanya (Kumparan, 2018; Permana, 2018).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kabinet Presiden Joko Widodo periode 2014 – 2019, Rini Soemarno dalam momen perayaan ulang tahun BUMN ke-21 dan PT. Pindad ke-36 menyatakan harapan dan keyakinannya bahwa *medium battle tank* Harimau akan mampu mengikuti keberhasilan Panser Anoa. Menurutny Panser Anoa saat ini menjadi kebanggaan dan andalan ekspor industri pertahanan nasional, dan akan diikuti oleh *medium battle tank* Harimau. Menteri BUMN Rini Soemarno juga menyatakan bahwasanya saat ini produk-produk industri pertahanan nasional semakin diminati negara-negara di Asia Tenggara (Fikri, 2019b).

Selain keberhasilan ekspor yang dicapai oleh PT. Pindad, industri pertahanan nasional lainnya juga telah mampu melakukan hal serupa. Menurut data yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kabarahanan), tercatat terdapat 3 industri pertahanan lain yang melakukan transaksi ekspor. Industri pertahanan yang dimaksud adalah PT. Dirgantara Indonesia (DI), PT. Pal dan satu indsutri pertahanan swasta yakni PT. Lundin Industry Invest.

PT. Dirgantara Indonesia (DI) tercatat telah berhasil mengekspor pesawat terbang produksi mereka yang mendapatkan lisensi dari Airbus, yakni CN-235 dan NC-212. Pada rentang tahun 2015 – 2018, nilai penjualan luar negeri PT. DI tercatat mencapai 161 Juta dollar Amerika Serikat. Sedangkan PT. Pal pada periode yang sama tercatat melalukan tranksaksi ekspor sebesar 86,9 Juta dollar Amerika Serikat. Nilai ekspor PT. Pal ini didapat melalui penjualan kapal SSV ke Filipina sebanyak dua unit. PT. Lundin Industry Invest

sebagai industri pertahanan swasta pada periode tersebut mampu membukukan transaksi ekspor senilai 3.6 Juta dollar Amerika Serikat. Nilai ekspor ini diperoleh melalui keberhasilan penjualan kapal Sea Rider ke Rusia dan Swedia.

Keberhasilan-keberhasilan industri pertahanan nasional menjual produknya ke berbagai negara juga tercermin dalam data milik Badan Pusat Statistik (BPS). Nilai ekspor kendaraan tempur beserta komponen-komponennya oleh industri pertahanan nasional mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan tersebut terlihat jika melihat nilai ekspor periode 2010 – 2018. Nilai ekspor kendaraan tempur dan komponen-komponennya pada tahun 2010 adalah 60 juta dollar Amerika Serikat, sedangkan pada tahun 2018 mencapai 1.1 milyar dollar Amerika Serikat. Dalam kata lain terdapat kenaikan nilai ekspor kendaraan tempur dan komponen-komponennya lebih dari 1000%. Grafik 3.3 dibawah ini akan menunjukkan *trend* peningkatan nilai ekspor tersebut.



Grafik 3.3 Nilai Ekspor Kendaraan Tempur dan Komponennya
Sumber: (Kusnandar, 2019)

Selain berhasil melakukan penjualan alutsista hasil produksi industri pertahanan nasional, pencapaian industri pertahanan nasional tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara pengeskor senjata terbesar kedua di Asia Tenggara. Indonesia hanya berada dibawah Singapura dan unggul cukup jauh dari negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Hal ini terlihat dari data yang dirilis oleh SIPRI pada periode 2009 - 2019. Namun perlu dipahami

indikator yang digunakan oleh SIPRI bukan merefleksikan nilai kontrak penjualan, melainkan kepada penilaian terhadap kapabilitas militer yang dihadirkan senjata tersebut. Indikator ini kemudian dikenal dengan nama *Trend Indicator Value* (TIV). Tabel 3.1 dibawah ini akan menampilkan perbandingan ekspor Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara lain.

Tabel 3.1 Ekspor Senjata Negara Asia Tenggara 2009 - 2019 (Juta TIV)

Tahun	Singapura	Indonesia	Brunei	Malaysia	Thailand	Laos	Vietnam	Myanmar	Laos	Kamboja
2009	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	13	8	24	0	0	0	0	0	0	0
2012	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	1	0	0	15	0	0	0	0	0	0
2014	2	0	0	15	0	0	0	0	0	0
2015	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	47	86	12	0	2	0	0	0	0	0
2017	0	94	0	0	2	0	0	0	0	0
2018	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	243	212	36	30	4	0	0	0	0	0

Sumber: Olahan Penulis berdasarkan SIPRI, 2020

Selain data-data keberhasilan secara umum tersebut, *medium battle tank* Harimau juga memiliki potensi ekspor yang cukup terbuka. Hal ini tidak terlepas dari kesepakatan lanjutan yang dicapai Indonesia dengan Turki. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dalam kesepakatan lanjutan tersebut Turki dan Indonesia tidak akan bersaing dalam pemasaran *medium battle tank* Harimau. Indonesia memperoleh hak eksklusif untuk memasarkan *medium battle tank* Harimau di Asia dan sekitarnya disaat negara-negara Asia, terutama Asia Tenggara melakukan modernisasi persenjataan (Bitzinger, 2010; Mack & Ball, 1992; Raymond, 2017). Pasar Asia, terutama Asia Tenggara memang menjadi salah satu target pasar utama PT. Pindad dalam memasarkan *medium battle tank* Harimau (Handoyo, 2019;

Lukihardianti, 2019). Hal ini dikarenakan menurut PT. Pindad, *medium battle tank* Harimau sengaja didesain untuk negara dengan geografis yang mirip dengan Indonesia, yang ditandai dengan wilayah hutan dan tropis (PT. Pindad, n.d.).

Medium battle tank Harimau yang berhasil melalui serangkaian uji coba untuk sertifikasi dan dinyatakan lulus tahun 2018, telah mengundang minat dari berbagai negara di Asia untuk membelinya. Negara-negara ASEAN, seperti Filipina, Brunei Darussalam dan Malaysia telah menyatakan ketertarikannya untuk membeli *medium battle tank* Harimau (ABC, 2019; PT. Pindad, 2019b). Selain itu, satu negara Asia Selatan, yakni Bangladesh juga turut menyatakan minat atau keinginannya membeli *medium battle tank* Harimau produk PT. Pindad. Dirut PT. Pindad telah menyatakan kebanggaannya karena dua negara telah menyatakan ketertarikannya pada tahun 2018, yang notabene disaat itu *medium battle tank* Harimau belum memperoleh sertifikasi (CNN Indonesia, 2018). 120 unit *medium battle tank* Harimau bahkan disebut-sebut telah menjadi target akuisisi oleh satu negara Asia Selatan (Antara, 2019; Gideon, 2019). Dalam konteks yang lebih konkrit, *medium battle tank* Harimau juga menjadi bagian dari MoU yang ditandatangani Filipina untuk pengadaan Alutsista hasil produksi Indonesia. MoU ini ditandatangani pada Februari 2020 yang lalu (Handoyo, 2020; Kementerian BUMN, 2020).

Selain dari ketertarikan dari beberapa negara Asia, *medium battle tank* Harimau juga telah memperoleh kontrak penjualan. Berdasarkan pernyataan Direktur Utama (Dirut) PT. Pindad Abraham Mose pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada awal Februari 2020, menyatakan bahwa *medium tank* Harimau merupakan produk PT. Pindad yang memiliki nilai kontrak terbesar pada periode 2020 – 2023. Nilai kontrak pembelian *medium tank* Harimau yang diperoleh PT. Pindad pada saat itu senilai 135 juta Dollar Amerika Serikat.

Dimas Aryo Pratomo dalam wawancaranya turut menyatakan ambisi PT. Pindad untuk dapat melakukan penjualan *medium battle tank* Harimau ke negara lain. Menurutnya hal tersebut dikarenakan PT. Pindad memiliki *benchmark* keberhasilan ekspor alutsista, yakni Panser Anoa. Selain itu, menurut Dimas, PT. Pindad juga memiliki peluang yang bisa

dimanfaatkan, yakni hak eksklusif pemasaran di wilayah Asia Tenggara dan Asia Selatan (Wawancara dengan Dimas Aryo Pratomo, 25 Juni 2021).

Data-data empirik yang telah dipaparkan sebelumnya sesuai dan mengafirmasi argumentasi teoretis yang disampaikan oleh Bitzinger & Kim (2005) serta Bagci dan Kurc (2017). Kesesuaian dan afirmasi tersebut adalah sebelum maupun saat Indonesia melakukan pengembangan *medium battle tank* Harimau, industri pertahanan nasional telah mampu melakukan penjualan produk ke negara lain. Bahkan beberapa negara telah menyatakan ketertarikannya untuk membeli. Ketertarikan pembelian dan hak eksklusif pemasaran di Asia yang dimiliki PT. Pindad tentunya akan menguntungkan bagi PT. Pindad dan dapat mendatangkan keuntungan ekonomi dari penjualan. Oleh karena hal tersebut maka Pemerintah Indonesia berkeyakinan melalui pengembangan *medium battle tank* Harimau juga akan mampu dijual ke negara lain dan mendatangkan keuntungan ekonomi maupun meningkatkan status Indonesia sebagai negara produsen dan eksportir senjata.

3.2.3 Intervensi Pemerintah dan Ambisi Industri Pertahanan Berkelas Dunia

Bitzinger (2011 dan 2015) menyatakan bahwa salah satu indikator terkuat pengembangan industri pertahanan atau alutsista oleh suatu negara didorong oleh *techno-nationalist impulse* adalah adanya intervensi dari pemerintah. Bitzinger kemudian lebih jauh menyatakan bentuk-bentuk intervensi tersebut adalah intervensi terkait aspek ekonomi. Intervensi pemerintah yang melakukan pengembangan industri pertahanan atau alutsista dengan dorongan *techno-nationalist* adalah melalui penanaman modal atau investasi, pemberian insentif pajak atau subsidi atau pemotongan bea masuk suku cadang maupun pajak-pajak terkait lain (Bitzinger, 2011a, 2015b).

Selain bantuan dalam proses pengembangan maupun produksi, intervensi pemerintah juga kerap dilakukan pada fase pemasaran atau *post-production*. Intervensi ini dilakukan dengan cara membantu pemasaran alutsista atau produk industri pertahanan terhadap negara-negara potensial untuk di ekspor. Dalam tataran praktis bantuan pemasaran diberikan melalui pembiayaan ekspor maupun membantu memasarkan produk yang telah dihasilkan agar dapat di ekspor (Bitzinger, 2015b). Intervensi-intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam

proses pengembangan maupun pemasaran alutsista menurut Bitzinger (2015) maupun Bağcı dan Kurç (2017) tidak terlepas dari ambisi negara tersebut memperoleh status sebagai negara eksportir senjata dunia (Bağcı & Kurç, 2017; Bitzinger, 2015b).

Selain itu, hadirnya intervensi pemerintah dalam pengembangan industri pertahanan maupun alutsista juga tidak terlepas dari karakter pasar senjata yang monopsoni (Widjajanto et al., 2012). Sebagai pasar dengan karakter monopsoni, dimana terdapat banyak produsen dengan sedikit konsumen serta nilai investasi yang besar maka intervensi pemerintah menjadi penting. Intervensi yang dilakukan pemerintah baik dalam bentuk jaminan pembelian, sponsor atau jaminan pendanaan dalam pengembangan menjadi penggerak rantai produksi industri pertahanan, terutama di negara yang baru atau sedang mengembangkan kapasitas industri pertahanan nasionalnya (Karim, 2014).

Dalam konteks Indonesia, Pemerintah juga terlihat melakukan intervensi ekonomi dalam upaya pengembangan industri pertahanan nasional pada umumnya, maupun secara khusus dalam pengembangan *medium battle tank* Harimau. Intervensi yang dilakukan dapat terlihat melalui dokumen *legal* maupun dalam tataran praktis. Dokumen legal pertama yang menunjukkan adanya intervensi dari pemerintah dalam pengembangan alutsista seperti *medium battle tank* Harimau oleh industri pertahanan nasional adalah UU Industri Pertahanan. Tabel 3.2. dibawah ini akan memaparkan bentuk-bentuk intervensi yang dimungkinkan dan diamanatkan oleh UU Industri Pertahanan.

**Tabel 3.2. Intervensi Pemerintah Terhadap Industri Pertahanan Nasional
Berdasarkan UU Industri Pertahanan**

No.	Pasal	Bentuk Intervensi
1	43 Ayat 1	Kewajiban penggunaan alpanhankam produksi dalam negeri
2	43 Ayat 2	Kewajiban melakukan pemeliharaan dan perbaikan alpanhankam di dalam negeri
3	43 Ayat 5	Kewajiban <i>Transfer of Technology</i> , ofset
4	51 Ayat 1	Penyertaan modal negara untuk penmbangunan dan peningkatan kapasitas industri pertahanan
5	53 Ayat 1	Pemasaran alpanhankam dilaksanakan bersama oleh Industri Pertahanan dan Pemerintah
6	54 Ayat 2	Pemasaran Alpanhankam dapat dilakukan dengan dukungan pembiayaan Pemerintah
7	60 Ayat 1	Penyediaan fasilitas pinjaman untuk melakukan penjualan produk industri pertahanan
8	62 Ayat 1	Pemerintah memberikan jaminan kepada perbankan dan lembaga keuangan yang mendukung pembiayaan pengembangan dan pemanfaatan industri pertahanan
9	62 Ayat 2	Pemberian hak Industri Pertahanan dalam negeri untuk didahulukan dan diutamakan daripada harga produk luar negeri

Sumber: Olahan Penulis berdasarkan UU Industri Pertahanan

Selain UU Industri Pertahanan, terdapat setidaknya dua perangkat peraturan lain yang menggambarkan adanya intervensi Pemerintah. Pertama, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 141 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Industri Pertahanan. Melalui PP No. 141 Tahun 2015 ini secara eksplisit terlihat intervensi Pemerintah dalam beberapa hal: (1) Pembiayaan pelatihan, pendidikan dan magang demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia industri pertahanan (2) Pemberian imbalan terhadap sumber daya industri pertahanan yang memiliki keahlian khusus (3) Perlindungan terhadap industri pertahanan berupa insentif fiskal, yang termasuk didalamnya pembebasan bea masuk, jaminan pembelian hingga pendanaan atau investasi (4) Bantuan pemasaran luar negeri, yang tidak menutup kemungkinan dibiayai oleh Pemerintah (Pemerintah Republik Indonesia, 2015).

Kedua, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Meskipun PP No. 29 Tahun 2018 ini tidak secara spesifik dikeluarkan untuk industri pertahanan sebagaimana PP No. 141 Tahun 2015, industri pertahanan atau industri strategis menjadi salah satu kelompok industri yang diatur. Melalui

PP ini diketahui beberapa komitmen lain dari Pemerintah Indonesia untuk membantu peningkatan kapasitas industri pertahanan nasional maupun pengembangan alutsista yang dapat diartikan sebagai bagian dari intervensi. Intervensi tersebut adalah (1) Pemberian fasilitas baik fiskal maupun nonfiskal dan (2) Pemberian kompensasi kerugian. Pemberian fasilitas nonfiskal yang dimaksud adalah pemberian kemudahan perizinan, kemudahan memperoleh lahan atau lokasi serta pemberian bantuan teknis. Sedangkan pemberian kompensasi kerugian ini dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk margin (Pemerintah Republik Indonesia, 2018).

Intervensi yang dimungkinkan oleh dua dokumen legal negara tersebut juga dapat ditemukan dalam pernyataan yang disampaikan dua Presiden Republik Indonesia, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo pada era kepemimpinannya. Presiden SBY tercatat telah berulang kali melontarkan pernyataan bahwasanya TNI dan Polri wajib membeli alperangkat produksi dalam negeri. Pernyataan-pernyataan tersebut dilontarkan oleh Presiden SBY dalam forum-forum resmi seperti rapat kabinet terbatas, peringatan hari kebangkitan teknologi nasional hingga momen pelantikan taruna akademi militer (Berita Satu, 2011; Kompas.com, 2013; Medcom, 2014).

Senada dengan pendahulunya, Presiden Joko Widodo dalam satu kesempatan rapat kabinetnya menyampaikan *statement* yang menunjukkan komitmen dan pemikiran Pemerintahan yang dipimpin untuk menjamin keberlangsungan industri pertahanan nasional melalui pemberian fasilitas pembiayaan dan mempertemukan industri pertahanan dengan industri pendukung:

Saya ingin mempertegas lagi bahwa kita harus fokus terhadap pembenahan ekosistem industri pertahanan baik yang berkaitan dengan **fasilitas pembiayaan bagi BUMN klaster industri pertahanan** maupun **ketersambungan dengan industri komponen baik itu komponen pendukung maupun bahan baku**. Termasuk di dalamnya adalah reformasi *supply chain* dan pengembangan industri lokal untuk mengurangi ketergantungan kita kepada barang-barang impor (BPMI Sekretariat Presiden, 2020).

Dalam konteks pengembangan medium battle tank Harimau, fasilitas pembiayaan atau pendanaan bahkan sangat terlihat. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pengembangan *medium battle tank* Harimau ini membutuhkan biaya sebesar 330 miliar Rupiah dan

Indonesia secara keseluruhan mengeluarkan biaya sebesar 180 miliar Rupiah. Intervensi yang dilakukan Pemerintah semakin terlihat karena dari 180 miliar Rupiah tersebut sebagian besar biaya dikeluarkan Pemerintah Indonesia, bukan PT. Pindad (Kumparan, 2018).

Hal ini terlihat dari pernyataan Manager Pengembang Kendaraan Khusus Pindad, Windhu Paramarta diketahui pendanaan atau investasi yang ditanggung Pemerintah Indonesia adalah sebesar 150 milyar rupiah. PT. Pindad sendiri menurut Windhu mengeluarkan biaya sebesar 30 milyar Rupiah (Kumparan, 2018). Dalam kata lain, dari 180 milyar Rupiah yang dikeluarkan pihak Indonesia dalam pengembangan medium battle tank Harimau, 83% ditanggung oleh Pemerintah dan 17% sisanya ditanggung oleh PT. Pindad yang notabene sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Presiden Joko Widodo kemudian juga mengeluarkan *statement* yang menunjukkan intervensi pemerintah lainnya. Jika sebelumnya intervensi yang diberikan adalah fasilitas pembiayaan atau pendanaan, maka kali ini intervensi yang dimaksud adalah jaminan pembelian produk industri pertahanan nasional:

Saya juga perlu menyampaikan mengenai **belanja pertahanan dalam APBN kita sebesar Rp127 triliun itu agar diarahkan ke industri pertahanan kita, paling tidak 15 tahun industri strategis pertahanan kita harus memiliki pesanan** sehingga bisa dibangun sebuah rencana panjang yang baik dan investasinya bisa menjadi terarah (BPMI Sekretariat Presiden, 2020).

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta Kementerian Pertahanan untuk membeli produk industri pertahanan nasional kembali disampaikan pada bulan Juli 2020 dalam momen rapat terbatas. Presiden Joko Widodo secara eksplisit meminta Menteri Pertahanan untuk membeli produk alutsista yang diproduksi PT. Pindad: **"Di Kemenhan, bisa saja beli di Dirgantara Indonesia (DI), beli di Pindad, beli di PAL,** yang bayar di sini ya yang *cash, cash, cash* APBN. **Beli produk dalam negeri,** saya kira Pak Menhan (Prabowo) juga lebih tahu mengenai ini" (CNN Indonesia, 2020a).

Tidak hanya sebatas menginstruksikan secara eksplisit pembelian alutsista produk-produk industri pertahanan nasional, Presiden Joko Widodo dalam kesempatan yang sama juga menunjukkan keyakinannya akan dampak positif industri pertahanan nasional terhadap perekonomian negara. Sebagaimana disebutkan oleh beberapa ahli seperti Bitzinger (2003)

dan Willet (1997), pengembangan industri pertahanan nasional suatu negara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Bitzinger, 2003; Willett, 1997). **“Belanja-belanja (militer) yang dulu ke luar (negeri), direm dulu. Beli produk dalam negeri kita.** Kemhan bisa beli di DI (PT Dirgantara Indonesia), Pindad, PAL. Agar **ekonomi kena trigger, bisa memacu pertumbuhan ekonomi kita”** (Kumparan, 2020).

Namun sesungguhnya intervensi Pemerintah dalam bentuk jaminan pembelian sudah terlihat sebelum pernyataan-pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut. Sebagai buktinya adalah ketika *prototype medium battle tank* Harimau baru diperkenalkan pada tahun 2017, Pemerintah Indonesia sudah menjajaki pembelian *medium battle tank* Harimau. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan pada saat itu yakni Laksamana Madya TNI. Widodo (Tempo.co, 2017a). Bukti lainnya adalah Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan secara resmi telah menyepakati pembelian *medium battle tank* Harimau. Kesepakatan ini disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan periode 2014 – 2019, Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu. Melalui kesepakatan ini diketahui nilai kontrak pembelian *medium battle tank* Harimau sebesar 135 juta Dollar Amerika Serikat. Nilai kontrak tersebut untuk pengadaan 20 unit *medium battle tank* Harimau (Fikri, 2019a).

Selain intervensi dalam bentuk pembiayaan dan pembelian produk tersebut, Pemerintah Indonesia juga melakukan intervensi dalam bentuk bantuan pemasaran di luar negeri. Bantuan pemasaran produk industri pertahanan nasional, termasuk didalamnya *medium battle tank* Harimau dapat terlihat dari kebijakan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Menurut pemaparan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, dalam pelaksanaan misi dagang ke luar negeri, Kementerian Perdagangan kerap mengajak industri pertahanan nasional untuk ikut serta dalam delegasi. Hal ini dilakukan agar industri pertahanan nasional dapat mempromosikan produk-produk unggulannya di hadapan pembuat kebijakan negara sahabat (Andri, 2019).

Selain dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, bantuan pemasaran produk industri pertahanan nasional juga dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Hal ini terlihat dari upaya yang dilakukan Menteri Pertahanan Republik Indonesia menawarkan penjualan *medium*

battle tank Harimau produksi PT. Pindad kepada Menteri Pertahanan Filipina, Negrillo Lorenzana di sela-sela pertemuan menteri pertahanan ASEAN (ADMM) pada tahun 2019 (Kementerian Pertahanan Indonesia, 2019; Prawira, 2019). Menindak lanjuti pembicaraan dan tawaran yang disampaikan pada saat itu, delegasi Pemerintah Filipina melakukan kunjungan ke PT. Pindad pada tahun 2020. Dalam kunjungan tersebut sebagaimana disebutkan sebelumnya tercapai kesepakatan pengadaan alutsista, termasuk *medium battle tank* Harimau (Handoyo, 2020; Kementerian BUMN, 2020).

Terkait dengan penjualan produk industri pertahanan nasional ke luar negeri, bantuan yang diberikan Pemerintah tidak hanya berhenti sampai bantuan pemasaran atau promosi. Pemerintah tercatat juga memberikan fasilitas pembiayaan ekspor bagi industri pertahanan nasional. Fasilitas pembiayaan ekspor ini diberikan Pemerintah melalui program *National Interest Account* (NIA) yang dikelola oleh Lembaga Pengelolaan Ekspor Impor (LPEI) atau Indonesia Eximbank (Andri, 2019).

Bantuan pemasaran dan fasilitas pembiayaan ekspor ini kembali mencerminkan *techno-nationalist impulse* dalam pengembangan *medium battle tank* Harimau pada khususnya dan industri pertahanan pada umumnya. *Techno-nationalist impulse* terlihat dari adanya intervensi pemerintah sebagaimana dikemukakan Bitzinger (Bitzinger, 2015b). Namun selain itu, kebijakan ini juga menunjukkan adanya ambisi Pemerintah Indonesia agar nilai ekspor industri pertahanan nasional meningkat dan memposisikan Indonesia sebagai negara produsen senjata dunia. Ambisi Indonesia menjadi negara produsen senjata yang diakui dunia ini terkonfirmasi oleh visi PT. Pindad selaku industri pertahanan yang mengembangkan *medium battle tank* Harimau maupun *stakeholders* terkait.

Direktur Teknologi dan Pengembangan PT. Pindad, Dr. Ir. Ade Bagdja, MME dalam paparannya di momen Persiapan Keberangkatan LPDP Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa PT. Pindad memiliki visi menjadi bagian dari 100 besar industri pertahanan dunia pada tahun 2024. Menurutnya hal ini sesuai dengan instukri Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa sudah seharusnya Indonesia menjadi negara yang kuat dan disegani dengan didukung industri pertahanan nasional. Visi PT. Pindad masuk dalam jajaran 100

industri pertahanan terbaik dunia pada tahun 2024 itu akan dicapai melalui inovasi dan kemitraan strategis.

Selain itu, terkait dengan rencana pembentukan *holding* BUMN Industri Pertahanan yang diberi nama DEFENSE ID, ambisi Pemerintah menyandang status sebagai negara produsen senjata kelas dunia kembali terlihat. *Holding* BUMN Industri Pertahanan ini kelak dipimpin oleh PT. LEN Industri sebagai *holding company*. Meskipun belum resmi dibentuk, DEFENSE ID telah memiliki target besar. Jika sebelumnya PT. Pindad memiliki visi masuk kedalam 100 besar industri pertahanan dunia, maka DEFENSE ID memiliki target masuk kedalam peringkat 50 besar industri pertahanan dunia (PT. Len, 2021; E. P. Putra, 2020; Ramalan, 2021).

Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Laksma TNI, Sri Yanto, S.T. menyatakan bahwa keberhasilan industri pertahanan nasional memproduksi alutsista, termasuk didalamnya *medium battle tank* Harimau menjadi bukti Indonesia memiliki potensi menjadi produsen senjata dunia yang diperhitungkan:

“Tiga dari tujuh Program Prioritas Nasional telah mencapai hasil yang mengembirakan yaitu **Medium Tank Harimau**, Kapal Selam dan Roket RHan-122B. **Itu semua telah menunjukkan hasil bahwa Indonesia dapat muncul sebagai negara produsen alutsista yang diperhitungkan di kawasan** dengan mewujudkan Industri Pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan kekuatan pokok minimum (MEF) TNI (Kementerian Pertahanan RI, 2019)”

Menteri BUMN periode 2014 – 2019, Rini Soemarno dalam pernyataannya juga menunjukkan adanya ambisi Pemerintah Indonesia agar industri pertahanan nasional mampu menjadi pemain utama dunia:

“Negara-negara ASEAN sekarang melihat ke Indonesia untuk membeli alat-alat pertahanan. Sekarang **proses lanjutan adalah Medium Tank** yang kita sedang siapkan. **Moga-moga juga akan bisa mendunia juga**. Saya sangat bangga karena anak-anak muda Pindad sudah makin berinovasi sehingga **kita yakin ke depan akan bisa menjadi pemain dunia**.” (Fikri, 2019b).

Intervensi yang dilakukan Pemerintah dalam konteks *medium battle tank* Harimau dan kaitannya dengan ambisi menjadi industri pertahanan berkualitas dan berdaya saing tinggi terkonfirmasi dalam wawancara dengan Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si.

Menurutnya, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan memiliki tugas negara untuk memasarkan produk-produk industri pertahanan nasional. Target untuk membangun industri pertahanan yang maju dan memiliki daya saing tinggi maka pemerintah, yang dalam hal ini Ditjen Potan harus membantu pemasaran produk industri pertahanan nasional. Salah satu contoh konkret dari upaya tersebut adalah ditandatanganinya MoU dengan Filipina. MoU dengan Filipina memang ditargetkan agar *medium battle tank* Harimau maupun produk-produk PT. Pindad lainnya dapat langsung dibeli dan tidak perlu melalui proses *bidding* di Filipina (Wawancara dengan Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si, 14 Juni 2021).

Berdasarkan pemaparan sebelumnya ditemukan kesesuaian antara argumentasi teoretis dengan fakta empirik di lapangan. Argumentasi teoretis yang menyebutkan bahwasanya dorongan *techno-nationalist* dalam pengembangan senjata dapat terlihat dari besarnya peranan maupun intervensi negara. Pemerintah Indonesia dalam konteks penelitian ini terbukti melakukan intervensi dalam pengembangan dan pemasaran alutsista hasil produksi industri pertahanan nasional agar mampu berkembang dan bersaing di dunia internasional sesuai target dan harapan pemerintah.

3.2.4 Produsen Tank Pertama di Asia Tenggara

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, saat ini bukan hanya Indonesia negara di dunia yang sedang berupaya meningkatkan kapasitas industri pertahanan nasionalnya. India, Korea Selatan dan Turki merupakan contoh dari negara-negara di dunia yang sedang melakukan pengembangan industri pertahanan nasionalnya. Negara-negara yang melakukan pengembangan alutsisya oleh industri pertahanan nasional tersebut berharap keberhasilannya akan menyebabkan negaranya lebih dihormati dan disegani.

Sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Bitzinger dan Kim (2005) maupun Bağcı dan Kurc (2017), *techno-nationalist impulse* negara-negara berkembang atau negara *second-tier* dalam pembagian kelas industri pertahanan dunia dan terutama di Asia tetap menghendaki penguasaan teknologi persenjataan karena terkait dengan ambisi meningkatkan status atau *prestige* dalam sistem internasional (Bağcı & Kurç, 2017; Bitzinger & Kim, 2005). Keberhasilan industri pertahanan nasional mengembangkan alutsista atau teknologi

persenjataan tertentu dimaknai sebagai wujud kedigdayaan teknologi maupun keunggulan kualitas sumber daya manusia negara itu sendiri (Bağcı & Kurç, 2017; Bitzinger & Kim, 2005).

Melalui pengembangan *Medium battle tank* Harimau ini diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap status Indonesia di dunia internasional. Merujuk pada konsep *techno-nationalist impulse*, dampak positif yang diharapkan muncul adalah Indonesia dipandang sebagai negara yang memiliki kedigdayaan penguasaan teknologi. Terlebih lagi berdasarkan kategorisasi UNROCA, *medium battle tank* Harimau termasuk dalam *major conventional arms system* (UNROCA, n.d.). *Battle Tank* sebagai *major conventional arms system* setara dengan alutsista lain, seperti pesawat tempur dan kapal tempur (UNROCA, n.d.). Dengan demikian maka, keberhasilan negara menguasai kemampuan memproduksi *battle tank* naka negara tersebut dapat dikatakan telah memiliki kapasitas teknologi dan industri pertahanan yang baik. Kategori *battle tank* yang dimaksud UNROCA sebagai bagian dari *major conventional arms systems* adalah *battle tank* dengan bobot lebih dari 16.5 ton, kemampuan mobilitas dan pertahanan diri yang baik serta dipersenjatai meriam utama berkaliber lebih dari 75 mm (UNROCA, n.d.).

Dalam tesis ini, sebagai upaya pembuktian keberhasilan industri pertahanan nasional mengembangkan *medium battle tank* Harimau akan meningkatkan *prestige* dan status di dunia internasional, terutama kawasan maka perlu dilakukan komparasi dengan negara – negara lain. Komparasi dilakukan dengan melihat negara-negara di ASEAN maupun dunia internasional yang mampu memproduksi *battle tank*. Tabel 3.3 dibawah ini akan memperlihatkan negara-negara produsen *tank*.

Tabel 3.3 Daftar Negara Produsen Tank dan Model Pengembangannya

Negara	Model Pengembangan
Asia	
Jepang	Pengembangan Sendiri
Korea Selatan	Pengembangan Sendiri
India	Pengembangan Sendiri

Pakistan	Modifikasi / Lisensi
Korea Utara	Modifikasi / Lisensi
China	Pengembangan Sendiri
Taiwan	Modifikasi / Lisensi
Iran	Pengembangan Sendiri
Iraq	Modifikasi / Lisensi
Indonesia	Pengembangan Sendiri
Eropa	
Russia	Pengembangan Sendiri
Italia	Pengembangan Sendiri
Jerman	Pengembangan Sendiri
Perancis	Pengembangan Sendiri
Inggris	Pengembangan Sendiri
Israel	Pengembangan Sendiri
Swiss	Pengembangan Sendiri
Polandia	Modifikasi / Lisensi
Swedia	Modifikasi / Lisensi
Amerika Utara dan Selatan	
Amerika Serikat	Pengembangan Sendiri
Argentina	Modifikasi / Lisensi
Afrika	
Afrika Selatan	Modifikasi / Lisensi
Mesir	Modifikasi / Lisensi

Sumber: Olahan Penulis berdasarkan (Militaryfactory, 2020)

Merujuk pada tabel 3.3 diatas, maka diperoleh fakta empiris yang menunjukkan hingga saat ini terdapat 23 negara produsen *battle tank* dan 10 diantaranya di Asia. Berdasarkan tabel diatas juga diketahui bahwasanya hanya Indonesia negara ASEAN yang mampu memproduksi *battle tank*. Hal ini menandakan melalui keberhasilan pengembangan *medium battle tank* Harimau, Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang

memiliki kemampuan tersebut. Pada level yang lebih luas, yakni Asia, hanya terdapat 6 negara termasuk Indonesia yang memproduksi *battle tank* melalui pengembangan sendiri.

Keberhasilan pengembangan *medium battle tank* Harimau ini disambut baik oleh beberapa pihak. Salah satunya adalah Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si yang merupakan pejabat eselon 1 di Kementerian Pertahanan Indonesia. Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si adalah Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Potan). Ia menyatakan bahwasanya keberhasilan ini menjadi salah satu pembuktian kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sumber daya manusia Indonesia berhasil membuktikan diri memiliki kualitas tinggi karena berhasil mengembangkan alutsista berat sekelas tank (Parno, 2018). Tim Pertahanan di kedeputan V Kantor Staff Presiden pun memiliki pandangan yang sama. Melalui keberhasilan ini maka Indonesia telah membuktikan diri sebagai bangsa yang mampu berinovasi menghasilkan produk pertahanan berteknologi tinggi serta sesuai dengan cita-cota kemandirian pertahanan Indonesia (Kantor Staf Presiden, 2018).

Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si turut mengkonfirmasi dampak positif keberhasilan pengembangan *medium battle tank* Harimau ini. Menurut Prof. Bondan, keberhasilan pengembangan *medium battle tank* menjadi bukti kemajuan dan keunggulan bangsa serta industri pertahanan nasional. Terlebih lagi jika dilihat dalam konteks Asia Tenggara, belum ada negara lain yang sudah mampu mengembangkan *medium battle tank*. Kemampuan industri pertahanan nasional menjadi yang terbaik di kawasan Asia Tenggara (Wawancara dengan Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si, 14 Juni 2021).

Hal senada juga disampaikan oleh Iis Gindarsah. Menurutnya keputusan dan keberhasilan PT. Pindad melakukan pengembangan *medium battle tank* Harimau dapat meningkatkan *prestige* Indonesia di mata dunia internasional. *Prestige* yang dihadirkan oleh keputusan dan keberhasilan ini adalah Indonesia dapat dipandang memiliki kemampuan teknologi dan industri yang baik. Hal ini dikarenakan tidak semua negara memiliki industri pertahanan nasional yang mampu memproduksi alutsista sekelas tank tempur (Wawancara dengan Iis Gindarsah, M.Sc, 6 Juni 2021).

3.3 Pursuit of Domestic Prestige (Ambisi Memperoleh Kewibawaan Domestik)

Jika pada dua variabel sebelumnya pengembangan industri pertahanan atau sistem persenjataan oleh suatu negara ditujukan untuk meningkatkan *prestige* negara ataupun meraih status tertentu di level internasional, maka variabel ketiga berada pada level domestik. Menurut Bagci dan Kurc (2017) Keberhasilan suatu negara menciptakan industri pertahanan yang kuat bisa dipergunakan oleh pemimpin atau partai politik berkuasa untuk kepentingan politiknya yakni meningkatkan *prestige* serta memperoleh dukungan lebih besar di dalam negeri. *Prestige* yang Untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya kepentingan politik pada lingkup domestik dalam pengembangan industri pertahanan dan *medium battle tank* Harimau, maka diperlukan analisis terhadap retorika politik maupun janji-janji kampanye yang disampaikan.

3.3.1. Klaim Keberhasilan Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Pemerintah Indonesia di era kepemimpinan Presiden SBY dalam beberapa kesempatan menyampaikan klaim keberhasilan melakukan revitalisasi industri pertahanan nasional. Klaim keberhasilan ini disampaikan baik oleh Presiden SBY maupun oleh jajaran di Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II). Revitalisasi Industri Pertahanan sendiri merupakan bagian dari program prioritas Presiden SBY di 100 hari kerja pertama kepemimpinan periode kedua. Presiden SBY tercatat beberapa kali menyampaikan pernyataan yang menggambarkan keberhasilannya maupun pemerintahan yang ia pimpin dalam melakukan revitalisasi industri pertahanan nasional.

Presiden SBY dalam momen pelantikan taruna Akademi Militer di Magelang menyampaikan pernyataan yang menggambarkan klaim keberhasilan pemerintahannya melakukan revitalisasi industri pertahanan. Ketika itu Presiden SBY menyatakan bahwa saat ini industri pertahanan nasional telah mampu memproduksi berbagai jenis alutsista modern secara mandiri (Medcom, 2014). Pernyataan Presiden SBY berikutnya yang mengklaim keberhasilan revitalisasi industri pertahanan nasional disampaikan pada tahun 2015, atau 1 tahun setelah menyelesaikan tanggungjawab sebagai Presiden. Dalam momen menyambut hari ulang tahun (HUT) TNI ke-70, Presiden SBY menggunakan akun twitter pribadinya

untuk menyampaikan klaim keberhasilan tersebut. Ketika itu Presiden SBY menyatakan bahwasanya pada era kepemimpinannya industri pertahanan nasional telah mampu memproduksi berbagai alutsista secara mandiri, termasuk didalamnya kendaraan lapis baja. Pada saat yang sama, Presiden SBY juga menyampaikan harapannya agar Presiden Joko Widodo mampu melanjutkan kebijakan dan keberhasilannya (Qusnulyakin, 2015).

Tidak hanya disampaikan langsung oleh Presiden SBY, klaim keberhasilan revitalisasi Industri Pertahanan juga turut disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Bappenas KIB II. Menteri PPN / Bappenas ketika itu menyatakan selama 10 tahun kepemimpinan Presiden SBY, tercatat berbagai prestasi yang dihasilkan. Keberhasilan melakukan modernisasi alutsista TNI dan revitalisasi Industri Pertahanan merupakan salah satu prestasi yang disebutkan. Menurutnya keberhasilan itu bisa dilihat pada momen perayaan HUT TNI tahun 2014 yang menunjukkan alutsista yang baru dibeli TNI maupun produk industri pertahanan nasional (Kompas.com, 2014a).

3.3.2. Janji Kampanye dan Klaim Keberhasilan Kepemimpinan Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo pada kepemimpinan periode I (2014 – 2019) yang berpasangan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut sebagai *nawacita*. *Nawacita* merupakan suatu sembilan prioritas pembangunan selama lima tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. *Nawacita* ini sendiri merupakan bagian dari visi dan janji kampanye saat Pemilihan Presiden 2014. Melalui *nawacita*, Presiden Joko Widodo berharap mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2014).

Kedaulatan dan Kemandirian Indonesia dalam bidang pertahanan juga menjadi bagian dari keinginan Presiden Joko Widodo. Dalam kerangka *nawacita*, pengembangan industri pertahanan masuk dalam poin “menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara” (Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan RI, 2018; Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2014). Selain itu, kemandirian pertahanan juga ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai

bagian dari prioritas di bidang pertahanan (Angriani, 2014; Armenia, 2014). Tidak hanya Presiden Jokowi, elit-elit pemerintahannya juga kerap menyuarkan penegasan kewajiban akuisisi alutsista produk industri pertahanan nasional (Dewan Pertimbangan Presiden, 2016; Indrawan & Widiyanto, 2016; Stefanie, 2016)

Sejalan dengan visi politik pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pernyataan Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu sesuai dengan argumentasi teoretis sebagaimana disebutkan sebelumnya. Pada Forum Merdeka Barat (FMB) 9 edisi 4 tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, Menteri Pertahanan menyampaikan keberhasilan Pemerintah membangun industri pertahanan. Tidak hanya itu, Menteri Pertahanan pada kesempatan yang sama juga membanggakan keberhasilan Pemerintah melakukan ekspor alutsista ke negara lain:

Dalam era **Kabinet Kerja ini, sebagian produk Alutsista dalam negeri telah memiliki kualitas dan Performace yang handal dan prima** didalam memperkuat Sistem Pertahanan Negara Indonesia. **Beberapa Negara Sahabat juga telah membeli Produk Alut Sista Indonesia**, seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, serta beberapa Negara di Eropa dan Afrika. Kedepan Indonesia akan dilihat sebagai sebagai salah satu Produsen Alutsista potensial Internasional” (Kementerian Pertahanan Indonesia, 2018b).

Klaim keberhasilan Pemerintah saat era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga disampaikan oleh Deputy V Kantor Staff Presiden, Jaleswari Pramodhawardani. Ia menyampaikan bahwasanya kemandirian pertahanan merupakan bagian dari janji nawacita Pemerintah. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa Pemerintah sejak tahun 2014 – 2018 telah dengan serius membina industri pertahanan nasional agar dapat berkembang secara mapan. Salah satu hasil konkret dari pembinaan industri pertahanan pada era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah keberhasilan PT. Pindad memproduksi *medium battle tank* Harimau (Kantor Staf Presiden, 2018).

Selain pada janji Pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014 – 2019, retorika politik yang mengungkapkan pentingnya kemandirian pada aspek pertahanan juga terlihat ketika proses pemilihan presiden pada tahun 2019. Isu terkait pengembangan industri pertahanan pada umumnya maupun pengembangan *medium battle tank* Harimau menjadi bagian dari retorika politik serta dokumen tim kampanye Presiden Joko Widodo yang kali ini

berpasangan dengan Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin (Tim Kampanye Nasional Jokowi -Ma'ruf Amin, 2018).

Pertama, pada dokumen resmi visi dan misi pasangan calon yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan menjadi dasar dari penyusunan materi kampanye, tim kampanye Presiden Joko Widodo bersama K.H. Ma'ruf Amin memasukkan isu pengembangan industri pertahanan. Isu terkait pengembangan industri pertahanan menjadi bagian dari misi ketujuh, tepatnya pada poin 7.2 yang menyatakan bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama telah mampu merintis atau memulai proses pembangunan industri pertahanan nasional agar menjadi kekuatan yang diegani di kawasan Asia Pasifik serta memperkuat kedaulatan sebagai negara terbesar di ASEAN. Bahkan isu pengembangan industri pertahanan disebutkan dalam dua butir penyusun poin 7.2 (Tim Kampanye Nasional Jokowi -Ma'ruf Amin, 2018).

Selain terlihat dalam dokumen resmi visi dan misi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, retorika politik terkait urgensi dan keberhasilan pengembangan industri pertahanan pada umumnya dan *medium battle tank* Harimau pada khususnya turut terlihat dalam debat publik calon presiden. Dalam debat calon presiden yang mengangkat isu pertahanan-keamanan, Presiden Joko Widodo mengungkit keberhasilan PT. Pindad memproduksi *medium battle tank* Harimau (Kusuma, 2019). Pernyataan Presiden Joko Widodo yang membanggakan pencapaian PT. Pindad disampaikan untuk merespon narasi yang disampaikan calon presiden Letjen (Purn). Prabowo Subianto (Pablo & Anggit, 2019):

Saya lihat Pak Prabowo enggak percaya pada TNI kita. Saya sipil sangat percaya dengan TNI yang kita miliki. Saya lihat sendiri di Natuna dibangun di Sorong mulai dibangun. Yang kita kurang di anggaran kita adalah investasi. **Setiap anggaran di Kemenhan harus dipakai untuk membangun industri alutsista kita. Kita sudah punya Tank Harimau.** Kapal selam Ardadedali. Kalau investasi di bidang pertahanan terus kita lakukan, teknologi pertahanan kita akan semakin kuat, ada *transfer of knowledge* (Pablo & Anggit, 2019).

Retorika-retorika politik maupun klaim keberhasilan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan jajarannya sebagai upaya untuk memperoleh *prestige* di dalam negeri baru akan efektif jika mendapat dukungan dan diakui masyarakat. Berdasarkan temuan empirik, retorika politik dan klaim keberhasilan yang dilakukan turut mendapat apresiasi

dari beberapa pihak. Salah satu tokoh yang mengapresiasi pengembangan alutsista seperti *medium battle tank* Harimau oleh industri pertahanan nasional adalah mantan Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Mar (Purn) Djoko Pramono. Menurutnya Presiden Joko Widodo memiliki keunggulan dalam visi pembangunan pertahanan karena memprioritaskan industri pertahanan nasionalnya. Selain itu menurutnya, saat ini dan terutama ketika era Presiden Joko Widodo, industri pertahanan nasional telah mampu menghasilkan berbagai jenis alutsista, dan salah satunya adalah *medium battle tank* Harimau (Fauzi, 2019).

Dukungan dan apresiasi juga disampaikan oleh akademisi atau pakar di bidang pertahanan. Ketua Lembaga Kajian Reformasi Keamanan dan Pertahanan Pokja8, Edy Prasetyono, Ph.D mengapresiasi visi pertahanan dan keberhasilan pengembangan alutsista oleh industri pertahanan nasional selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo telah mencapai berbagai keberhasilan dalam pengembangan pertahanan melalui industri pertahanan nasional, yang salah satunya adalah pengembangan *medium battle tank* Harimau (Adiyudha, 2019). Tidak hanya Edy Prasetyono yang mengakui keberhasilan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam upaya mencapai kemandirian pertahanan melalui pengembangan berbagai alutsista seperti kapal selam dan *medium battle tank* Harimau oleh industri pertahanan nasional. Akademisi Hubungan Internasional dari Universitas Bina Nusantara, Tangguh Chairil pun turut menyampaikan pengakuan dan apresiasinya (Chairil et al., 2019).

4.1.3. Harapan Publik Terhadap Kemandirian Pertahanan

Upaya elit-elit politik di dalam negeri memasukkan klaim keberhasilan pengembangan alutsista oleh industri pertahanan nasional sebagai bagian dari pencapaian dan bukti janji kampanye dalam retorika politik, guna memperoleh dukungan dari masyarakat dapat dikatakan cukup beralasan. Hal ini dikarenakan publik atau masyarakat di Indonesia ternyata memiliki pandangan bahwa Indonesia Indonesia harus mampu mandiri di bidang pertahanan. Selain itu, publik atau masyarakat di level domestik juga memandang bahwasanya seharusnya Indonesia mampu mencapai kemandirian pertahanan. Setidaknya hal ini terekam dalam hasil survei Litbang Kompas.

Litbang Kompas melakukan survei setelah terjadinya peristiwa memilukan tenggelamnya Kapal Selam milik TNI Angkatan Laut yakni KRI Nanggala 402. Survei dilakukan pada tanggal 17 – 19 Mei 2021 dengan menggunakan metode *multistage random sampling* yang melibatkan 511 responden di 34 provinsi. Responden tersebut terbagi secara proporsional sesuai dengan jumlah populasi setiap provinsi.

Survei ini kemudian memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan *margin of error* $\pm 4,34\%$ (Litbang Kompas, 2021). Hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas tersebut kemudian memunculkan beberapa temuan. Pertama, publik di level domestik dengan memandang pada kondisi alutsista yang dioperasikan TNI saat ini memiliki ketidakyakinan akan kemampuan TNI untuk menghasilkan kemenangan dalam peperangan. Kedua, publik memandang penting penguatan dan modernisasi alutsista milik TNI. Publik menyatakan bahwa sudah seharusnya pemerintah mendukung dan memastikan akuisisi dan modernisasi alutsista milik TNI karena memiliki peranan dan tugas penting untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan negara (Litbang Kompas, 2021).

Ketiga, publik atau masyarakat di dalam negeri memandang penting kemandirian pertahanan dan menyatakan keyakinannya bahwa seharusnya Indonesia mampu mencapai kemandirian. Hal ini terlihat dari begitu dominannya persentase keyakinan publik terhadap keyakinan Indonesia mampu mencapai kemandirian pertahanan, dimana terdapat 87,7% responden yang yakin akan hal tersebut. Melalui survei ini, mayoritas responden (53,7%) menyatakan bahwasanya strategi yang harus dipilih pemerintah untuk memperkuat alutsista TNI adalah melalui kerjasama produksi dengan negara lain (Litbang Kompas, 2021).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, politisi atau pemerintah kerap menggunakan keberhasilan dan janji mengembangkan alutsista secara mandiri sebagai cara meraih simpati dan dukungan masyarakat. Berdasarkan data-data empirik yang telah dipaparkan tersebut maka terlihat adanya upaya yang dilakukan pemerintah maupun tokoh politik tertentu untuk memperoleh *prestige* di dalam negeri tersebut. Bahkan tokoh politik, yang dalam hal ini Presiden Joko Widodo melakukannya secara eksplisit baik dalam dokumen visi – misi pencalonannya untuk Pemilihan Presiden 2019, maupun dalam retorika politik saat

perhelatan debat calon presiden. Terlebih lagi ternyata publik domestik memandang penting kemandirian pertahanan untuk memperkuat kemampuan TNI.

BAB 4

PENUTUP

Sebagai bab yang akan menjadi penutup dalam tesis ini, maka pada bab ini penulis akan menulis dua hal. Pertama, penulis akan menyampaikan kesimpulan temuan-temuan maupun hasil analisis yang telah dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian tesis ini. Kedua, pada bab ini penulis juga akan menyampaikan rekomendasi baik itu rekomendasi kebijakan terkait pengembangan alutsista maupun industri pertahanan nasional. Selain rekomendasi kebijakan, penulis juga akan menyampaikan rekomendasi teoretis terkait analisis motivasi pengembangan alutsista dan industri pertahanan.

4.1. Simpulan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, untuk menghadapi ketidakpastian dan menjamin survivalitas di sistem internasional yang anarki, negara dituntut untuk melakukan akumulasi kekuatan atau *power*. Akumulasi kekuatan yang dilakukan negara salah satunya dan yang paling sering mendapatkan perhatian adalah melalui akuisisi alutsista. Akuisisi alutsista baru dipercaya mampu meningkatkan kesiapan tempur dan kekuatan militer negara. Proses akuisisi alutsista oleh negara kerap dilakukan melalui mekanisme impor dari negara lain. Namun, selayaknya mata uang koin, impor alutsista yang dilakukan ini juga memiliki dampak negatif, yakni adanya ketergantungan terhadap negara produsen alutsista.

Ketergantungan suatu negara kepada alutsista yang di produksi negara lain memiliki potensi terjebak didalam pengaruh negara produsen senjata. Negara-negara produsen alutsista tercatat kerap kali memanfaatkan status mereka tersebut guna mencapai kepentingan nasional maupun motif tertentu demi keuntungan negara tersebut. Bahkan kerap kali negara pembeli alutsista harus dirugikan oleh kepentingan negara produsen alutsista. Pemanfaatan status dan pengaruh negara produsen alutsista dapat dilakukan melalui beberapa strategi seperti ancaman embargo, hingga larangan penggunaan senjata yang telah dibeli oleh suatu negara.

Oleh karena adanya potensi kerugian yang harus ditanggung negara ketika mengalami ketergantungan, maka berbagai negara kini berupaya mengembangkan alutsista melalui industri pertahanan nasionalnya. Hal ini dilakukan tidak lain demi menghilangkan atau minimal memperkecil tingkat ketergantungan dan potensi kerugian yang ditimbulkan. Negara-negara seperti Korea Selatan, India dan Indonesia merupakan negara yang saat ini sedang melakukan pengembangan alutsista melalui industri pertahanan nasionalnya. Indonesia sendiri tercatat telah memiliki beberapa program pengembangan atau produksi alutsista oleh industri pertahanan nasional.

Beberapa program tersebut diantaranya adalah kerjasama Indonesia – Korea Selatan dalam proses produksi dan *transfer of technology* kapal selam kelas Changbogo (Nagapasa). Contoh lainnya adalah pengembangan senjata SS-2, pengembangan panser anoa dan pengembangan *medium battle tank* Harimau oleh PT. Pindad. Upaya pengembangan *medium battle tank* Harimau ini dilakukan Indonesia melalui skema kerjasama dengan Turki, yang dalam hal ini adalah FNSS. Kerjasama antara Indonesia dengan Turki dalam pengembangan *medium battle tank* Harimau ditandai dengan penandatanganan MoU pada tahun 2014. Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU tersebut, pada tahun 2016 untuk pertama kalinya *design medium battle tank* diperkenalkan kepada publik. Progres terus ditunjukkan dalam pengembangan *medium battle tank* hingga akhirnya pada tahun 2017 *prototype medium battle tank* muncul dan berselang satu tahun kemudian menjalani serangkaian uji coba untuk memperoleh sertifikat tipe. Sertifikat tipe *medium battle tank* Harimau sendiri dikeluarkan pada tahun 2019.

Spesifikasi teknis *Medium battle tank* harimau hasil pengembangan PT. Pindad bersama dengan FNSS Turki didasarkan pada kebutuhan dan permintaan TNI Angkatan Darat. Spesifikasi *medium battle tank* Harimau ini diantaranya adalah memiliki bobot 30 – 35 ton, mampu melaju hingga kecepatan 70km/jam dan mampu melewati medan yang cukup berat seperti kemiringan 30° dan medan menanjak 60°. *Medium battle tank* Harimau juga terbukti dapat diandalkan untuk melakukan operasi di daerah rawa, tanah gembur dan pantai. Dalam aspek perlindungan diri, *medium battle tank* Harimau memiliki kemampuan yang cukup mempunyai yakni STANAG 4 hingga STANAG 5. Daya hancur *medium battle tank*

Harimau sendiri dihadirkan melalui *Turret* 105mm terbaru yang memungkinkan untuk menembak sasaran sejauh 10 kilometer.

Medium battle tank Harimau juga telah disematkan beberapa teknologi canggih untuk mendukung daya hancur maupun proteksi. Sebagai contohnya adalah penggunaan sistem *autoloader* meriam maupun *hunter killer system* yang memungkinkan proses serangan terjadi lebih cepat. *Medium battle tank* Harimau juga dimungkinkan untuk menggunakan APS PULAT untuk menghancurkan serangan musuh yang mendekat.

Seluruh spesifikasi dan kemampuan *medium battle tank* Harimau ini sengaja dipersiapkan untuk memperkuat postur pertahanan Indonesia yang sedang dalam kondisi tidak ideal. Melalui program Kekuatan Pokok Minimum (KPM), Pemerintah Indonesia memang sedang melakukan upaya modernisasi alutsista TNI, termasuk TNI AD yang sudah uzur dan tidak siap operasional. Dalam beberapa kali kesempatan terucap bahwasanya Indonesia membutuhkan setidaknya 400 – 500 unit *medium battle tank* Harimau, dan pada saat ini telah terdapat kontrak pembelian 18 unit *medium battle tank* Harimau oleh Kementerian Pertahanan.

Namun keputusan Indonesia melakukan pengembangan *Medium battle tank* Harimau menimbulkan anomali yang menjadikannya menarik untuk diteliti. Anomali tersebut adalah ketidaksesuaian karakter *medium battle tank* Harimau dengan ancaman nyata Indonesia yang jika merujuk pada Buku Putih Pertahanan berdimensi non-tradisional. Jika merujuk pada ancaman nyata yang berdimensi non-tradisional tersebut, jenis alutsista yang lebih tepat dibangun Indonesia adalah alutsista yang mengedepankan teknologi penginderaan dan *surveillance*, kemampuan logistik serta kemampuan SAR. Selain itu spesifikasi teknis *medium battle tank* Harimau tidak menghadirkan suatu teknologi dengan kemampuan khusus yang membedakannya dengan produk tank sejenis. Terlebih lagi beberapa komponen vital seperti mesin dan lapisan baja pelindung yang masih di impor.

Tesis ini bertujuan untuk menjawab mengapa Indonesia memilih untuk melakukan pengembangan *medium battle tank* Harimau meskipun menimbulkan anomali-anomali tersebut. Untuk mampu menjawab pertanyaan tersebut, analisis pada bab 3 tesis ini akan didasarkan pada konsep *techno-nationalist impulse*. Analisis penulis menggunakan kerangka

analisis tersebut menemukan bahwasanya alasan Indonesia melakukan pengembangan *medium battle tank* Harimau terkait dengan ambisi Indonesia untuk meningkatkan *prestige* atau menyandang status tertentu. Ambisi memperoleh *prestige* dan status dalam 3 komponen yang menjadi alasan Indonesia melakukan pengembangan *medium battle tank* Harimau.

Komponen pertama adalah ambisi untuk memperoleh *prestige* serta status yang menjadi alasan Indonesia melakukan pengembangan *medium battle tank* Harimau yang pertama adalah pada aspek *power*. Pada aspek ini, Indonesia memiliki ambisi untuk memperoleh *prestige* dan menyandang status sebagai negara kekuatan utama kawasan yang disegani dan menjadi negara yang mandiri atau berdikari. Ambisi ini muncul dan dapat terlihat dari empat hal. Pertama, memori kolektif sebagai korban kesewenangan negara *great powers* melalui penjajahan dan embargo senjata hingga memunculkan *distrust*. Memori kolektif dan *distrust* ini mendorong Indonesia untuk tidak lagi bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan alutsista serta menjadi kekuatan utama di kawasan agar disegani dan tidak lagi menjadi korban kepentingan negara lain. Pengembangan *medium battle tank* Harimau menjadi penting karena berdasarkan CASI Index, alutsista jenis *light-medium tank* TNI AD merupakan jenis alutsista yang tingkat ketergantungannya tertinggi. Selain itu, pengembangan *medium battle tank* Harimau juga penting karena berdasarkan kemampuan industri pertahanan nasional yang ada. Dalam kata lain ada pertimbangan aspek *doability*.

Kedua, dinamika lingkungan strategis eksternal Indonesia turut menjadi pertimbangan Indonesia dalam mengembangkan *medium battle tank* Harimau. Dinamika lingkungan strategis eksternal Indonesia seperti peningkatan asertifitas China dan persaingannya dengan Amerika Serikat, dinamika persenjataan Asia Tenggara dan kebutuhan pengamanan perbatasan darat merupakan kondisi lingkungan strategis yang harus dihadapi. Kondisi lingkungan strategis yang berpotensi menimbulkan konflik tersebut membutuhkan kekuatan militer yang siap digelar untuk menghadapi ancaman yang ada. Dalam hal kebutuhan tersebut *medium battle tank* Harimau memainkan peranan yang strategis. *Medium battle tank* Harimau lebih cocok digelar di daerah perbatasan darat Indonesia dibandingkan *main battle tank* Leopard 2. Selain itu, seiring dengan pembentukan Kogabwilhan I – III dan Divisi III Kostrad untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis

yanga ada, maka kebutuhan akan kekuatan kavaleri yang sesuai topografi dan doktrin maneuver dalam TNI seperti *medium battle tank* Harimau menjadi penting.

Ketiga, upaya Indonesia melakukan peningkatan kapabilitas militer melalui modernisasi alutsista TNI. Pengembangan *medium battle tank* Harimau dengan kemampuan mobiltas, daya hancur dan proteksi yang dihadirkan serta teknologi yang disematkan membawa dampak positif terhadap peningkatan kapabilitas militer Indonesia agar lebih disegani dalam prosesnya menuju kekuatan utama di kawasan. Keempat, Sebagai tindak lanjut keberhasilan industri pertahanan sebelum pengembangan *medium battle tank* Harimau. Keberhasilan PT. Pindad dalam merakit tank ringan Scorpion, mengembangkan Panser Anoa, *retrofit* tank ringan AMX-13 dan menciptakan *prototype* tank SBS menyebabkan Pemerintah Indonesia memandang pengembangan *medium battle tank* sebagai suatu bentuk tindak lanjut keunggulan kemampuan Industri Pertahanan nasional. Selain itu keberhasilan (*existing condition*) tersebut juga memberikan keyakinan bahwa teknologi dan sumber daya yang dibutuhkan sudah siap untuk mengembangkan *medium battle tank* Harimau demi mencapai kemandirian.

Komponen kedua adalah ambisi Indonesia memperoleh *prestige* dan status pada aspek ekonomi. *Prestige* dan status yang ingin diperoleh adalah keuntungan ekonomi dan kedigdayaan ekonomi – teknologi hingga akhirnya menyandang status sebagai negara maju dengan tingkat penguasaan teknologi tinggi serta maupun sebagai eksportir senjata (*pursuit of wealth and technological prowess*). Komponen ini akan terlihat melalui empat hal. Pertama, Pemerintah Indonesia dalam melakukan pengembangan alutsista oleh industri pertahanan nasional, termasuk di dalamnya *medium battle tank* Harimau berharap dan yakin akan adanya efek lanjutan dari pengembangan tersebut. Efek lanjutan yang diharapkan adalah munculnya *spin-off* teknologi. Melalui *spin-off* ini diharapkan akan semakin memperkuat penguasaan teknologi dan industri dalam negeri sehingga Indonesia akan mampu melangkah menjadi negara industri atau negara maju. *Spin-off* teknologi dari pengembangan *medium battle tank* Harimau terkonfirmasi dari pernyataan Assistant Manager Pemasaran Hankam PT. Pindad.

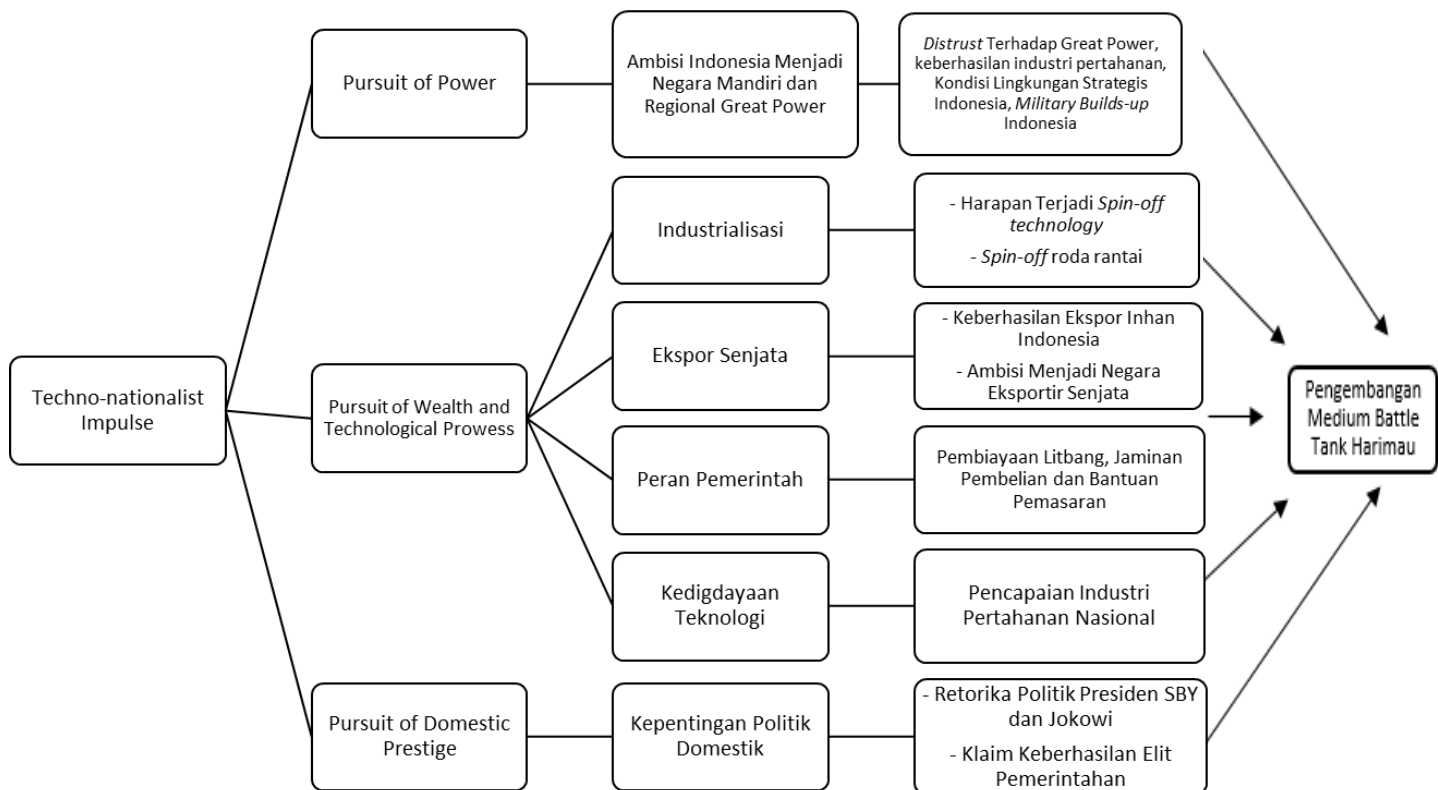
Kedua, keberhasilan ekspor industri pertahanan nasional dan potensi ekspor *medium battle tank* Harimau. Industri pertahanan nasional sebelum maupun saat pengembangan *medium battle tank* Harimau telah mampu melakukan penjualan produk alutsistanya ke luar negeri. Merujuk pada data SIPRI, nilai ekspor alutsista Indonesia menempati peringkat kedua di Asia Tenggara. Selain itu nilai ekspor kendaraan tempur beserta komponennya menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Selain berkaca pada keberhasilan industri pertahanan nasional melakukan ekspor, *medium battle tank* Harimau juga memiliki potensi meningkatkan capaian ekspor industri pertahanan nasional. Hal ini dibuktikan dengan cukup tingginya minat beberapa negara di Asia Tenggara maupun Asia Selatan untuk membeli. Bahkan Filipina telah menandatangani MoU pembelian pada tahun 2020. Selain itu perlu diingat bahwasanya PT. Pindad memiliki hak pemasaran eksklusif *medium battle tank* Harimau di Asia.

Ketiga, ambisi Indonesia memperoleh keuntungan ekonomi dan status sebagai negara kaya, maju dan penguasaan teknologi tinggi juga terlihat dari intervensi-intervensi yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan *medium battle tank* Harimau. Pemerintah Indonesia melakukan intervensi mulai dari proses pengembangan hingga proses pemasaran. Pada proses pengembangan Pemerintah Indonesia melakukan pembiayaan biaya penelitian dan pengembangan *medium battle tank* Harimau. Selain itu pemerintah juga memberikan jaminan pembelian *medium battle tank* Harimau maupun produk industri pertahanan nasional lain. Tercatat telah ada MoU pembelian *medium battle tank* Harimau oleh Pemerintah Indonesia sebanyak 18 unit. Tidak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga melakukan intervensi dalam proses pemasaran *medium battle tank* Harimau ke luar negeri. Intervensi yang dilakukan berupa bantuan promosi ke negara-negara lain serta penyediaan pembiayaan ekspor melalui Lembaga Pengelolaan Ekspor Impor (LPEI). Bantuan pemasaran yang dilakukan pemerintah ini membuahkan hasil MoU dengan Filipina. Segala bentuk intervensi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dimaksudkan untuk melindungi dan mendukung perkembangan industri pertahanan nasional, terlebih lagi industri pertahanan milik negara memiliki ambisi menduduki peringkat 50 besar dunia.

Keempat, ambisi Indonesia memperoleh keuntungan ekonomi dan status sebagai negara kaya, maju dan penguasaan teknologi tinggi juga terlihat ketika kita membandingkan keberhasilan PT. Pindad dengan industri pertahanan milik negara lain di kawasan. Indonesia tercatat sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mampu alutsista sekelas *tank*. Hal ini menunjukkan industri pertahanan Indonesia memiliki keunggulan dalam aspek pengetahuan, kemampuan dan penerapan teknologi dibanding negara-negara lain. Selain itu keberhasilan ini juga menjadi barometer kemajuan bangsa Indonesia yang mampu meningkatkan *prestige* dan status di dunia internasional.

Komponen ketiga adalah ambisi untuk memperoleh kewibawaan atau *prestige* di tingkat domestik (*pursuit of domestic prestige*). Keberhasilan mengembangkan alutsista oleh industri pertahanan nasional serta bisa dimanfaatkan oleh tokoh maupun partai politik untuk kepentingan politik elektoralnya. Kepentingan politik electoral yang dimaksud adalah meningkatkan *prestige* serta memperoleh simpati dan dukungan dari pemilih dalam pemilihan umum. Hal ini turut terjadi dalam konteks Indonesia dan pengembangan *medium battle tank* Harimau. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun pejabat di era pemerintahannya beberapa kali menyampaikan pernyataan yang mengklaim keberhasilan revitalisasi dan penhemnangan kapasitas industri pertahanan nasional sebagai bagian dari keberhasilannya. Hal serupa ternyata juga dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan jajarannya. Presiden Joko Widodo beserta jajarannya tercatat beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang mengklaim keberhasilan pengembangan *medium battle tank* Harimau sebagai bentuk keberhasilan di era kepemimpinannya. Selain itu, Presiden Joko Widodo dalam masa kampanye sebagai Calon Presiden Indonesia periode kedua juga menyampaikan capaian-capaiannya dalam bidang pertahanan, termasuk keberhasilan mengembangkan *medium battle tank* Harimau. Tidak hanya pada retorika politik yang digunakan, visi-misi Presiden Joko Widodo dalam kampanye menghadapi Pemilihan Presiden 2019 juga mencantumkan klaim kemajuan industri pertahanan nasional di era kepemimpinan periode pertamanya. Tesis ini juga menemukan bahwasanya publik di level domestik ternyata memang menghendaki tercapainya kemandirian pertahanan.

Dari tiga komponen tersebut terlihat bahwa alasan Pemerintah Indonesia memilih melakukan pengembangan *medium battle tank* Harimau adalah untuk meningkatkan dan memperoleh *prestige* serta status pada tiga aspek. Pengembangan *medium battle tank* Harimau meskipun tidak menghadirkan *deterrence* yang optimal dipandang sebagai salah satu cara yang bisa dan perlu dilakukan agar Indonesia mampu menyanggah *prestige* dan status sebagai negara kekuatan utama di kawasan dan sebagai negara yang mandiri atau berdikari. Selain itu pengembangan *medium battle tank* Harimau meskipun tidak memiliki keunggulan inovatif, juga dipandang sebagai cara untuk meningkatkan dan memperoleh *prestige* serta status sebagai negara yang kaya, negara industri maju serta memiliki penguasaan teknologi tinggi. Selain itu pengembangan *medium battle tank* Harimau juga menjadi cara politisi atau pemerintah untuk meningkatkan *prestige* di level domestik dan memperoleh simpati serta dukungan masyarakat dalam kontestasi politik.



Gambar 4.1: Kesimpulan Analisis Pengembangan *Medium battle tank* Harimau

Sumber: Olahan Sendiri

4.2. Rekomendasi

4.2.1 Rekomendasi Kebijakan

Pada bagian ini, penulis akan memberikan rekomendasi kebijakan terhadap Pemerintah Indonesia agar pengembangan alutsista oleh industri pertahanan nasional mampu memberikan dampak positif lebih besar bagi Indonesia. Pertama, Pemerintah Indonesia perlu tetap dan meningkatkan komitmen politiknya untuk melakukan pengembangan alutsista oleh industri pertahanan nasional. Komitmen politik dari pemerintah menjadi sangat penting karena proses penelitian dan pengembangan membutuhkan biaya yang besar. Meskipun kedepannya industri pertahanan milik swasta juga sudah diizinkan untuk menjadi industri alat utama, peranan pemerintah tetap dibutuhkan, terutama terkait komitmen pengadaan dalam negeri maupun bantuan pemasaran dan pembiayaan ekspor. Hal ini menjadi sangat penting karena di negara berkembang, industri pertahanan tidak akan mampu untuk mandiri sepenuhnya. Industri-industri pertahanan di negara berkembang harus terus di subsidi atau mendapatkan intervensi positif dari pemerintah.

Rekomendasi kedua, pada dasarnya masih berkelindan dengan rekomendasi pertama penulis. Rekomendasi kedua dari penulis adalah Pemerintah Indonesia perlu benar-benar memperhatikan aspek keberlanjutan atau *sustainability* dalam pengembangan alutsista maupun industri pertahanan nasional. Keberlanjutan pengembangan alutsista ini dapat dilakukan melalui komitmen politik dari pemerintah yang kuat untuk melakukan pengadaan dalam negeri. Hal ini dimaksudkan agar industri pertahanan dalam negeri tetap berminat dan berkomitmen mengembangkan alutsista di masa yang akan datang.

Sesuai dengan apa yang dituliskan dalam rumusan masalah, alutsista yang dikembangkan Indonesia idealnya memiliki keunggulan inovatif demi potensi keuntungan ekonomi maupun menghadirkan *deterrence* yang optimal. Oleh karena itu penulis merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk fokus pada pengembangan jenis-jenis alutsista tertentu yang secara basis teknologi telah dikuasai oleh industri pertahanan nasional. Salah satunya adalah *medium battle tank* Harimau. Hal ini dimaksudkan agar alutsista – alutsista – terutama *medium battle tank* – yang dikembangkan industri pertahanan nasional

memiliki keunggulan inovatif dibanding produk negara lain. Ketika keunggulan inovatif telah hadir, produk industri pertahanan nasional seperti *medium battle tank* akan menjadi referensi bagi negara lain yang ingin melakukan pembelian alutsista pada jenis tersebut. Selain itu, jika industri pertahanan nasional fokus melakukan pengembangan lanjutan dari *medium battle tank*, terutama menghadirkan *interoperability* antara *medium battle tank* dengan alutsista-alutsista lain seperti pesawat tempur maupun artileri maka *deterrence* yang dihasilkan akan lebih optimal. Jika strategi ini dijalankan oleh Indonesia, maka kedepannya produk-produk industri pertahanan nasional menghadirkan keunggulan inovatif, *deterrence* maupun *prestige* akan optimal.

4.2.2. Rekomendasi Akademis

Tesis ini telah menghasilkan temuan analisis yang menunjukkan ambisi meningkatkan dan memperoleh *prestige* serta status sebagai alasan Indonesia melakukan pengembangan *medium battle tank* Harimau. Hal ini wajar dan sesuai dengan konsep *techno-nationalist impulse*. Kerangka analisis *techno-nationalist impulse* yang digunakan dalam tesis ini memang sangat didominasi pemikiran dan karya ilmiah Richard Bitzinger. Akan tetapi pada tesis ini penulis memperkayanya dengan menggunakan rujukan karya ilmiah ahli selain Bitzinger. Jika Bitzinger dalam karya ilmiahnya memandang *Prestige* dan status yang ingin diperoleh negara berada pada level internasional. Penelitian ini juga melihat *prestige* dan status dalam tataran politik domestik.

Ambisi memperoleh dan meningkatkan *prestige* serta status di level domestik ini merujuk pada tulisan Hüseyin Bağcı & Çağlar Kurç. Pada tulisannya tersebut Bağcı dan Kurç melihat bahwasanya keputusan negara mengembangkan alutsista melalui industri pertahanan nasional didorong oleh ambisi untuk memperoleh *prestige* dan dukungan dari masyarakat. Politisi atau kelompok yang sedang berkuasa meyakini bahwasanya ketika dalam era pemerintahannya industri pertahanan nasional dapat mengembangkan alutsista, maka masyarakat akan memandang pemimpin negara tersebut telah mencapai keberhasilan meningkatkan *power* dan *prestige* negara. Oleh karena itu masyarakat akan kembali memilih pemimpin tersebut.

Meskipun kerangka analisis yakni konsep *techno-nationalist impulse* yang penulis gunakan dalam penelitian ini bisa dikatakan sudah cukup komprehensif, penulis merasa masih ada ruang yang bisa dieksplorasi lebih jauh. Ruang yang masih bisa dieksplorasi terutama dalam variabel ketiga, yakni *pursuit of domestic prestige*. Pada penelitian ini penulis melakukan analisis dengan melihat apakah ada upaya yang dilakukan pemerintah mengklaim keberhasilan melalui retorika politik maupun janji kampanye. Penulis berpandangan pembahasan dan analisis pada variabel ketiga akan semakin baik ketika penelitian berikutnya juga melihat apakah klaim keberhasilan mengembangkan alutsista oleh industri pertahanan nasional mampu meyakinkan masyarakat untuk kembali memilih pemimpin atau partai politik yang sama dalam pemilihan umum berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- ABC. (2019). *Alasan Impor Alat Militer Indonesia Turun, Saat Saudi dan Australia Malah Naik*. Tempo. <https://www.tempo.co/%0Aabc/4782/alasan-impor-alat-militerindonesia-turun-saat-saudi-danaustralia-malah-naik>
- Adiyudha, R. (2019). *Visi Pertahanan Jokowi Dinilai Lebih Baik Dibanding Prabowo*. Republika. <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/ppc5u4354/visi-pertahanan-jokowi-dinilai-lebih-baik-dibanding-prabowo>
- Aini, N. (2019). *Pindad Jajaki Ekspor Tank Harimau ke negara Asia*. Republika. <https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/19/04/12/ppuerc382-pindad-jajaki-ekspor-tank-harimau-ke-negara-asia>
- Al-fadhat, F., & Effendi, N. N. A. (2019). Kerjasama Pertahanan Indonesia-Korea Selatan: Kedaulatan Maritim dan Transfer Teknologi dalam Pengadaan Kapal Selam DSME 209/1400. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(3), 373–392. <https://doi.org/10.22146/jkn.48822>
- Allison, G. (2015). The Thucydides Trap: Are the U.S. and China Headed for War? *The Atlantic*, 1–16. <http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/09/united-states-china-war-thucydides-trap/406756/>
- Ambarwati, E., Mahroza, J., & Supandi. (2019). Strategi Hedging dalam Mendukung Diplomasi Pertahanan Indonesia (Studi Kasus: Alih Teknologi Rudal C-705). *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 5(1), 27–46.
- Amrullah, M. R. (2016). Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Turki: Studi Kasus Kerjasama Industri Pertahanan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(1), 151–168. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v6i1.299>
- Andri, Y. (2019). *Indonesia Akan Genjot Ekspor Alutsista ke ASEAN dan Afrika*. Bisnis.com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190211/12/887596/indonesia-akan-genjot-ekspor-alutsista-ke-asean-dan-afrika>

- Angriani. (2014). *Prioritas Utama Pertahanan RI Era Jokowi*. Medcom.
<https://www.medcom.id/nasional/hukum/Gbm4QOyN-4prioritas-utama-pertahanan-ri-erajokowi>
- Antara News. (2018). *Jokowi berikan nama Medium Tank di “Indo Defence.”* Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/765000/jokowi-berikan-nama-medium-tank-di-indo-defence>
- Armandha, S. T., Datumaya, A., & Sumari, W. (2015). Ekonomi Politik Kerja Sama Korea Selatan - Indonesia dalam Joint Development Pesawat Tempur KFX / IFX. *Global & Strategis*, 10(1), 74–94.
- Armenia, R. (2014). *Presiden Jokowi Beberkan Empat Kebijakan Pertahanan Prioritas*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141230114031-32-21287/presiden-jokowi-beberkan-empat-kebijakan-pertahanan-prioritas>
- Armor Specs. (2020). *STANAG 4569 / AEP-55*. <https://www.armorspecs.com/stanag-4569/>
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. (2014). *BJ Habibie: Untuk Jadi Negara Maju, Indonesia Harus Mengandalkan 10 Industri Ini*. Berita Layanan Info Publik. <https://www.bppt.go.id/layanan-informasi-publik/2035-bj-habibie-untuk-jadi-negara-maju-indonesia-harus-mengandalkan-10-industri-ini>
- Bağcı, H., & Kurç, Ç. (2017). Turkey’s strategic choice: buy or make weapons? *Defence Studies*, 17(1), 38–62. <https://doi.org/10.1080/14702436.2016.1262742>
- Bak, D. (2018). Alliance Proximity and Effectiveness of Extended Deterrence. *International Interactions*, 44(1), 107–131.
<https://doi.org/10.1080/03050629.2017.1320995>
- Balakrishnan, Kogi, & Matthews, R. (2009). the Role of Offsets in Malaysian Defence Industrialisation. *Defence and Peace Economics*, 20(4), 341–358.
<https://doi.org/10.1080/10242690802333117>
- Balakrishnan, Kogila. (2016). Effective Absorption of Emerging Technologies in Defense

- Automotives to Enhance Land-Based Military Capabilities. In R. A. Bitzinger (Ed.), *Emerging Critical Technologies and Security in the Asia-Pacific* (hal. 75–90). Palgrave Macmillan.
- Benoit, E. (1978). Growth and Defense in Developing Countries. *Economic Development and Cultural Change*, 26(2), 271–280.
- Berita Satu. (2011). *SBY: Wajib Hukumnya Beli Alutsista Dalam Negeri*. Berita Satu.
<https://www.beritasatu.com/nasional/16734/sby-wajib-hukumnya-beli-alutsista-dalam-negeri>
- Bitzinger, R. A. (2003). *Towards a Brave New Arms Industry*. Routledge.
- Bitzinger, R. A. (2010). A New Arms Race? Explaining Recent Southeast Asian Military Acquisitions. *Contemporary Southeast Asia*, 32(1), 50–69.
<https://doi.org/10.1355/cs32-lc>
- Bitzinger, R. A. (2011a). China's defense technology and industrial base in a regional context: Arms manufacturing in Asia. *Journal of Strategic Studies*, 34(3), 425–450.
<https://doi.org/10.1080/01402390.2011.574985>
- Bitzinger, R. A. (2011b). Offsets and defense industrialization in Indonesia and Singapore. In *In Arms trade and economic development: Theory, policy, and cases in arms trade offsets*. (hal. 249–263).
- Bitzinger, R. A. (2013). Revisiting armaments production in Southeast Asia: New dreams, same challenges. *Contemporary Southeast Asia*, 35(3), 369–394.
<https://doi.org/10.1355/cs35-3c>
- Bitzinger, R. A. (2015a). Comparing Defense Industry Reforms in China and India. *Asian Politics and Policy*, 7(4), 531–553. <https://doi.org/10.1111/aspp.12221>
- Bitzinger, R. A. (2015b). Defense Industries in Asia and the Technonationalist Impulse. *Contemporary Security Policy*, 36(3), 453–472.
<https://doi.org/10.1080/13523260.2015.1111649>

- Bitzinger, R. A. (2017). Asian arms industries and impact on military capabilities. *Defence Studies*, 17(3), 295–311. <https://doi.org/10.1080/14702436.2017.1347871>
- Bitzinger, R. A., & Kim, M. (2005). Why do small states produce arms? The case of South Korea. *Korean Journal of Defense Analysis*, 17(2), 183–205. <https://doi.org/10.1080/10163270509464089>
- Blatter, J., & Haverland, M. (2012). *Designing Case Studies: Explanatory Approaches in Small-N Research* (1 ed.). Palgrave Macmillan.
- Boutin, J. D. K. (2009). Emerging Defense Industries: Prospects and Implications. In R. A. Bitzinger (Ed.), *The Modern Defence Industry* (hal. 235). ABC-CLIO.
- BPMI Sekretariat Presiden. (2020). *Perkuat Industri Pertahanan Nasional dengan Pembenahan Ekosistem Industri dan Adopsi Teknologi Terkini*. Siaran Pers. <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/perkuat-ind>
- Brzoska, M. (2007). Chapter 34 Success and Failure in Defense Conversion in the ‘Long Decade of Disarmament.’ In T. Sandler & K. B. T.-H. of D. E. Hartley (Ed.), *Handbook of Defense Economics* (Vol. 2, hal. 1177–1210). Elsevier. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1574-0013\(06\)02034-5](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1574-0013(06)02034-5)
- Budianto, A. (2018). *Turkish Aerospace Bantu PT DI Pasarkan N219 Nurtanio*. Sindonews. <https://ekbis.sindonews.com/berita/1273752/34/turkish-aerospace-bantu-pt-di-pasarkan-n219-nurtanio>
- Buzan, B. (1988). The Southeast Asian Security Complex. *Contemporary Southeast Asia*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.1355/cs10-1a>
- Chairil, T., Prabandari, A., Kumorotomo, W., & Sulaiman, Y. (2019). *Respons pakar soal debat presiden ke-4: Jokowi unggul dari Prabowo*. The Conversation. <https://theconversation.com/respons-pakar-soal-debat-presiden-ke-4-jokowi-unggul-dari-prabowo-114558>
- Chen, J., & Glaser, B. (2015). *What China’s ‘ Militarization ’ of the South China Sea Would*

Actually Look Like. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2015/11/what-chinas-militarization-of-the-south-china-sea-would-actually-look-like/>

Cheng, D., & Chinworth, M. W. (1996). The Teeth of the Little Tigers: Offsets, Defense Production and Economic Development in South Korea and Taiwan. In S. Martin (Ed.), *The Economics of Offsets: Defence Procurement and Countertrade* (hal. 245–298). Routledge.

Cheung, T. M. (2017). Commentary on Asian arms industries and impact on military capabilities. *Defence Studies*, 17(3), 312–316.
<https://doi.org/10.1080/14702436.2017.1345279>

CNNC Indonesia. (2020). *Parah! Kapal China Masuk RI, Klaim Natuna, Diusir Tak Mau*. Berita Internasional. <https://www.cnnindonesia.com/news/20200914062050-4-186492/parah-kapal-china-masuk-ri-klaim-natuna-diusir-tak-mau>

CNN Indonesia. (2018). *Tank Harimau Buatan Pindad Mejang di Indo Defence Expo*. Berita Peristiwa. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181107175321-20-344766/tank-harimau-buatan-pindad-mejang-di-indo-defence-expo>

CNN Indonesia. (2020a). *Alat Tempur Pindad yang Diminta Jokowi untuk Dibeli Prabowo*. Berita Bisnis. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200710062335-92-523051/alat-tempur-pindad-yang-diminta-jokowi-untuk-dibeli-prabowo>

CNN Indonesia. (2020b). *Diancam AS, RI Terancam Batal Beli Sukhoi Su-35 Rusia*. CNN Indonesia: Berita ASEAN. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200317132132-106-484174/diancam-as-ri-terancam-batal-beli-sukhoi-su-35-rusia>

Coffey, J. I. (1968). Technology and strategic mobility. *The Adelphi Papers*, 8(46), 15–27.
<https://doi.org/10.1080/05679326808448100>

Collin, K. S. L. (2015). What next for the Indonesian navy? Challenges and prospects for attaining the minimum essential force by 2024. *Contemporary Southeast Asia*, 37(3), 432–462. <https://doi.org/10.1355/cs37-3e>

- CSIS. (2021). *FORCE MAJEURE: CHINA'S COAST GUARD LAW IN CONTEXT*. Asia Maritime Transparency Initiative. <https://amti.csis.org/force-majeure-chinas-coast-guard-law-in-context/>
- Dahana. (n.d.). *Lini Produksi: Pertahanan*. Dahana. Diambil 25 November 2020, dari <http://www.dahana.id/business-line-id-id/defense-related-id-id/>
- Defence Turkey. (2017). *Turkey's New Approach in Defense Cooperation: FNSS Leads the Way with Kaplan Modern Medium Weight Tank Developed for Indonesia*. Defence Turkey News. <https://www.defenceturkey.com/en/content/turkey-s-new-approach-in-defense-cooperation-fnss-leads-the-way-with-kaplan-modern-medium-weight-tank-developed-for-indonesia-2739>
- Detik.com. (2010). *Gelar Pertemuan Bilateral, RI-Turki Tanda Tangan 8 MoU dan Agreement*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-1389602/gelar-pertemuan-bilateral-ri-turki-tanda-tangani-8-mou-dan-agreement->
- Detik.com. (2013). *Hebat! Ini Dia Tank Produksi Pertama Indonesia*. Detikfinance. <https://finance.detik.com/industri/d-2398965/hebat-ini-dia-tank-produksi-pertama-indonesia>
- Detik.com. (2014a). *Dua Tahun Lagi RI Bakal Punya Tank Medium Buatan Sendiri*. Detikfinance. <https://finance.detik.com/industri/d-2588036/dua-tahun-lagi-ri-bakal-punya-tank-medium-buatan-sendiri>
- Detik.com. (2014b). *Jokowi Sebut Tank Leopard Tak Cocok, Prabowo: Itu Tak Sepenuhnya Benar*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-2615710/jokowi-sebut-tank-leopard-tak-cocok-prabowo-itu-tak-sepenuhnya-benar>
- Detik.com. (2014c). *PT Dirgantara Indonesia, Sempat Mati Kini Terbang Kembali*. Detikfinance. <https://finance.detik.com/industri/d-2587833/pt-dirgantara-indonesia-sempat-mati-kini-terbang-kembali>
- Dewan Pertimbangan Presiden. (2016). *Kunjungan Kerja Wantimpres Bidang Pertahanan dan Keamanan ke Provinsi Jawa Barat*. Wantimpres.

<https://wantimpres.go.id/id/kunjungan-kerja-wantimpres-bidang-pertahanan-dan-keamanan-ke-provinsi-jawa-barat/>

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan RI. (2018). *Laporan Tahunan 2018 Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan RI*. Kementerian Pertahanan Indonesia.

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan RI. (2021). POTHAN MAGAZINE. *POTHAN MAGAZINE*.

Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan. (2008). *Perkembangan Lingkungan Strategis dan Prediksi Ancaman Tahun 2008*. 1–2. <https://www.kemhan.go.id/strahan/wp-content/uploads/migrasi/Produk/perkembangan-lingkungan-strategis.pdf>

Dirgantara Indonesia. (n.d.-a). *CN235 Family*. Dirgantara Indonesia. https://www.indonesian-aerospace.com/aircraft/detail/1_cn235+family

Dirgantara Indonesia. (n.d.-b). *Portofolio*. Dirgantara Indonesia. Diambil 25 November 2020, dari <https://www.indonesian-aerospace.com/portfolio>

DPR RI. (2011). Laporan Kunjungan Kerja Delegasi Komisi I DPR RI Ke Turki. In *Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia*.

Dzikri, I. (2016). Negara dan Kapasitas Adopsi Inovasi: Studi Kasus Tranformasi Pertahanan Indonesia Periode 1998-2014. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 18(2), 131–151. <https://doi.org/10.7454/global.v18i2.305>

Edgerton, D. E. H. (2007). The Contradictions of Techno-Nationalism and Techno-Globalism: A Historical Perspective. *New Global Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.2202/1940-0004.1013>

Effendi, R. (2019). *Dua Bom Pesawat Tempur Produksi PT Dahana*. RRI.co.id. <https://rri.co.id/teknologi/sains-dan-teknologi/701238/dua-bom-pesawat-tempur-produk-pt-dahana-mendapat-type-certificate-kemenhan>

Emmers, R. (2017). Enduring Mistrust and Conflict Management in Southeast Asia: An Assessment of ASEAN as a Security Community. *TRaNS: Trans-Regional and -*

- National Studies of Southeast Asia*, 5(1), 75–97. <https://doi.org/10.1017/trn.2016.24>
- Er, L. P. (2016). China, the United States, Alliances, and War: Avoiding the Thucydides Trap? *Asian Affairs(UK)*, 43(2), 36–46.
<https://doi.org/10.1080/00927678.2016.1150765>
- Fauzi, A. (2019). *Prioritas Jokowi Membangun Industri Pertahanan Tepat dan Strategis*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/227451/prioritas-jokowi-membangun-industri-pertahanan-tepat-dan-strategi>
- Fikri, A. (2018a). *Pindad Klaim Kandungan Lokal Medium Tank Tembus 70%*. Tempo. <https://bisnis.tempo.co/read/1117731/pindad-klaim-kandungan-lokal-medium-tank-tembus-70-persen>
- Fikri, A. (2018b). *Pindad Tetap Gandeng Turki Garap Proyek Medium Tank*. Tempo. <https://bisnis.tempo.co/amp/1117850/pindad-tetap-gandeng-turki-garap-proyek-medium-tank>
- Fikri, A. (2019a). *Kemenhan Pesan Tank dan Panzer Cobra ke PT Pindad*. CNN Indonesia Bisnis. <https://bisnis.tempo.co/read/1195158/kemenhan-pesan-tank-dan-panzer-cobra-ke-pt-pindad/full&view=ok>
- Fikri, A. (2019b). *Selain Panzer Anoa, Pindad Siap Ekspor Medium Tank ke Luar Negeri*. Tempo. <https://bisnis.tempo.co/read/1193079/selain-panzer-anoa-pindad-siap-ekspor-medium-tank-ke-luar-negeri/full&view=ok>
- FNSS. (2018). *KAPLAN MT*.
- FNSS. (2019). *Pulat Integration Shows Kaplan Ability to Adapt Evolving Threats*. FNSS. <https://www.0Afnss.com.tr/en/news/pulat-integrationshows-kaplan-mts-ability-to-adapt-toevolving-threats>
- Gatra, S. (2018). *Presiden Jokowi Akan Beri Nama Tank dalam Indo Defence 2018*. Kompas News. <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/04/22311731/presiden-jokowi-akan-beri-nama-tank-dalam-indo-defence-2018?page=all>

- George, A. (1991). *Forceful Persuasion: Coercive Diplomacy as an Alternative to War*. United States Institute of Peace.
- Gilpin, R. (1981). *War and Change in World Politics*. Cambridge University Press.
- Gindarsah, I. (2016). Strategic hedging in Indonesia's defense diplomacy. *Defense and Security Analysis*, 32(4), 336–353. <https://doi.org/10.1080/14751798.2016.1233695>
- Grossman, D. (2019). Military Build Up in the South China Sea. In L. Buszynsk & D. T. Hai (Ed.), *The South China Sea From a Regional Maritime Dispute to Geo-Strategic Competition*. Routledge.
- Hakim, S. (2013). *Indonesia - Turki Kerja Sama Bangun Tank*. Antara News. https://www.viva.co.id/berita/dunia/454889-indonesia-dan-turki-akan-buat-tank-bersama?page=all&utm_medium=all-page
- Hakim, S. (2019). *Panglima TNI resmikan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/1084354/panglima-tni-resmikan-komando-gabungan-wilayah-pertahanan>
- Handoyo. (2019). *Pindad bidik Asean dan Asia Selatan untuk pasarkan produk Tank Harimau*. Kontan. <https://industri.kontan.co.id/news/pindad-bidik-asean-dan-asia-selatan-untuk-pasarkan-produk-tank-harimau>
- Hardjono, S. (2017). Kajian Kapal Cepat Rudal (KCR 60M) Terhadap Kondisi Seastate Perairan Kawasan Barat dan Timur Indonesia. *Majalah Ilmiah Pengkajian Industri*, 11(3), 239–250.
- Hartley, K. (2011). Creating a European Defence Industrial Base. *Security Challenges*, 7(3), 95–111.
- Henricus, H. (2009). *SBY: Kita Tidak Ingin Dilecehkan Negara Lain*. Kontan. <https://nasional.kontan.co.id/news/sby-kita-tidak-ingin-dilecehkan-negara-lain-1>
- Hermawan, N. (2014). *Retrofitting tank ringan AMX13 TNI Sudah Rampung*. Berita Satuan TNI AD. <https://tniad.mil.id/retrofitting-tank-ringan-amx13-tni-sudah-rampung/>

- Hermawan, N. (2016). *Tank Tempur: Menanti Kemampuan Maksimal Leopard*. Berita Satuan TNI AD. <https://tniad.mil.id/tank-tempur-menanti-kemampuan-maksimal-leopard/>
- Hermawan, N. (2018). *Lima Unit MBT Leopard 2 RI, Bergeser Dari Yonkav 1 Kostrad ke Yon Mandala Yudha Kostrad*. Berita TNI AD. <https://tniad.mil.id/lima-unit-mbt-leopard-2-ri-bergeser-dari-yonkav-1-kostrad-ke-yon-mandala-yudha-kostrad/>
- Herrera, M., & Matthews, R. (2014). Latin America in step with global defence offset phenomenon. *RUSI Journal*, 159(6), 50–57.
<https://doi.org/10.1080/03071847.2014.990815>
- Hughes, C. W. (2011). The slow death of Japanese techno-nationalism? emerging comparative lessons for China's defense production. *Journal of Strategic Studies*, 34(3), 451–479. <https://doi.org/10.1080/01402390.2011.574987>
- Hulwan, A. (2016). *Industri Pertahanan Majukan Teknologi Sipil*. Media Indonesia. https://m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/75398-industri-pertahanan-majukan-teknologi-sipil
- Hutapea, E. (2019). *Jokowi: Infrastruktur Indonesia Tertinggal dari Negara Lain*. Kompas. <https://properti.kompas.com/read/2019/03/31/090000921/jokowi--infrastruktur-indonesia-tertinggal-dari-negara-lain>
- Huxley, T. (1990). South-East Asia's Arms Race: Some Notes on Recent Developments. *Arms Control*, 11(1), 69–76. <https://doi.org/10.1080/01440389008403923>
- IISS. (2012). Chapter Six: Asia. *Military Balance*, 112(1), 205–302.
<https://doi.org/10.1080/04597222.2012.663215>
- IISS. (2020). Military Balance. In *International Institute for Strategic Studies*.
- IISS. (2021). Chapter Six: Asia. *The Military Balance*, 121(1), 218–313.
<https://doi.org/10.1080/04597222.2021.1868795>
- Ikhsanudin, A. (2018). *Penampakan Tank Harimau Buatan Pindad yang Lincah-Akurat*

- Menembak*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-4291276/penampakan-tank-harimau-buatan-pindad-yang-lincak-akurat-menembak>
- Indrawan, R. M. J., & Widiyanto, B. (2016). Offset Policy in Building State Defense Independence. *Jurnal Pertahanan*, 6(2), 29–50.
- Inkiriwang, F. W. (2020). The dynamic of the US–Indonesia defence relations: the ‘IMET ban’ period. *Australian Journal of International Affairs*, 74(4), 377–393. <https://doi.org/10.1080/10357718.2020.1712327>
- International Strategic Analysis. (2016). *Southeast Asia: The 21st Century’s Leading Flashpoint*. International Strategic Analysis. https://www.isa-world.com/news/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=252&cHash=d7156a141cdde49ecf1bc046f5342868
- Jerchel, M., & Schnellbacher, U. (1998). *Leopard 2 Main Battle Tank 1979 - 1998*. Osprey Publishing.
- Johnson, J. C., Leeds, B. A., & Wu, A. (2015). Capability, Credibility, and Extended General Deterrence. *International Interactions*, 41(2), 309–336. <https://doi.org/10.1080/03050629.2015.982115>
- Kantor Staf Presiden. (2018). *Jaleswari Urai Implementasi Konkret Pertahanan dalam Nawacita*. Berita KSP. <https://www.ksp.go.id/jaleswari-urai-implementasi-konkret-pertahanan-dalam-nawacita.html>
- Karim, S. (2014). *Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Kawashima, S. (2021). *China’s Worrying New Coast Guard Law*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2021/03/chinas-worrying-new-coast-guard-law/>
- Kementerian BUMN. (2021). *Wamen BUMN I & Wamen Pertahanan Hadiri Rapat Holding BUMN Indhan*. Info BUMN. <https://bumn.go.id/media/news/wamen-bumn-i-wamen-pertahanan-hadiri-rapat-holding-bumn-indhan>

- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2014). *Jadikan Indonesia Mandiri, Berkepribadian, dan Berdaulat*. Infografis Kominfo.
<https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5629/NAWACITA%3A+9+Program+Perubahan+Untuk+Indonesia/0/infografis>
- Kementerian Pertahanan Indonesia. (2008). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*. Kementerian Pertahanan Singapura.
- Kementerian Pertahanan Indonesia. (2014). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2014*. Kementerian Pertahanan Indonesia.
- Kementerian Pertahanan Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan 2015*. Kementerian Pertahanan Indonesia.
- Kementerian Pertahanan Indonesia. (2016). *Kapal PKR-105 Resmi Diluncurkan Untuk Perkuat Armada Perang TNI AL*. Berita dan Media.
<https://www.kemhan.go.id/2016/09/29/kapal-pkr-105-resmi-diluncurkan-untuk-perkuat-armada-perang-tni-al.html>
- Kementerian Pertahanan Indonesia. (2017). *Industri Pertahanan Indonesia dan Uni Emirat Arab Kerjasama Produksi Senjata dan Tankboat*. Berita dan Media.
<https://www.kemhan.go.id/2017/02/20/industri-pertahanan-indonesia-dan-uni-emirat-arab-kerjasama-produksi-senjata-dan-tankboat.html>
- Kementerian Pertahanan Indonesia. (2018a). *KKIP : Kemandirian Industri Pertahanan Penting Untuk Mendukung Sistem Pertahanan Negara*. Berita dan Media.
<https://www.kemhan.go.id/2018/12/28/kkip-kemandirian-industri-pertahanan-penting-untuk-mendukung-sistem-pertahanan-negara.html>
- Kementerian Pertahanan Indonesia. (2018b). *Pencapaian 4 Tahun Pemerintahan Jokowi – JK, Menhan: Indonesia Urutan Ke 10 Besar Kekuatan Pertahanan Dunia*. Berita dan Media. <https://www.kemhan.go.id/2018/10/25/pencapaian-4-tahun-pemerintahan-joko-widodo-jusuf-kalla-di-bidang-pertahanan-menhan-indonesia-urutan-ke-10-besar-kekuatan-pertahanan-dunia.html>

- Kementerian Pertahanan Indonesia. (2019). *Bertemu Menhan Filipina, Menhan RI Tawarkan Medium Tank Buatan PT Pindad*. Berita dan Media.
<https://www.kemhan.go.id/2019/11/17/bertemu-menhan-filipina-menhan-ri-tawarkan-medium-tank-buatan-pt-pindad.html>
- Kementerian Pertahanan RI. (2012). *Permenhan 19 2012*. 19(650), 4–35.
- Kementerian Pertahanan RI. (2019). WIRA Edisi Khusus HUT TNI ke 74. *WIRA Edisi Khusus HUT TNI ke 74 tahun 2019*, 1–60. <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2019/12/wiraedsus2019-web.pdf>
- Kementerian Pertahanan Singapura. (2008). *Fact Sheet : Leopard 2A4 Main Battle Tank*.
- Kementerian Sekretariat Negara Indonesia. (2019). *Kebijakan Pengadaan Alutsista Harus Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Dalam Negeri*. Berita dan Artikel.
https://setneg.go.id/baca/index/kebijakan_pengadaan_alutsista_harus_membangun_ke_mandirian_industri_pertahanan_dalam_negeri
- Kesavapany, K. (2009). Flashpoint: South China Sea. In *Energy and Geopolitics in the South China Sea: Implications for ASEAN and Its Dialogue Partners* (hal. 65–67). ISEAS–Yusof Ishak Institute. <https://doi.org/DOI: undefined>
- Kinsella, D. (1998). Arms Transfer Dependence and Foreign Policy Conflict. *Journal of Peace Research*, 35(1), 7–23.
- Kivimäki, T. (2008). Power, interest or culture - Is there a paradigm that explains ASEAN's political role best? *Pacific Review*, 21(4), 431–450.
<https://doi.org/10.1080/09512740802294663>
- KKIP. (n.d.). *Sejarah Industri Pertahanan Nasional*. Sejarah. Diambil 19 Desember 2020, dari <https://www.kkip.go.id/sejarah/>
- KKIP. (2014). *Kebijakan*. KKIP. <https://www.kkip.go.id/kebijakan/>
- Kompas.com. (2013). *Presiden: Wajib Pakai Alutsista Dalam Negeri*. Kompas News.
<https://nasional.kompas.com/read/2013/08/29/1535527/Presiden.Wajib.Pakai.Alutsista>

.Dalam.Negeri

Kompas.com. (2014a). *Ini prestasi pemerintahan SBY versi Bappenas*. Kontan.

<https://nasional.kontan.co.id/news/ini-prestasi-pemerintahan-sby-versi-bappenas>

Kompas.com. (2014b). *Jokowi Anggap Leopard Sia-sia karena Infrastruktur Tak Memadai*.

Kompas News.

<https://nasional.kompas.com/read/2014/06/24/1458096/Jokowi.Anggap.Leopard.Sia-sia.karena.Infrastruktur.Tak.Memadai>

Kompas.com. (2015). *Kegetiran Habibie Mengenang Runtuhnya Industri Penerbangan Indonesia*. Kompas News.

<https://nasional.kompas.com/read/2015/05/25/05280011/Kegetiran.Habibie.Mengenang.Runtuhnya.Industri.Penerbangan.Indonesia>

Krause, K. (1991). Military Statecraft: Power and Influence in Soviet and American Arms Transfer Relationships. *International Studies Quarterly*, 35(3), 313.

<https://doi.org/10.2307/2600702>

Kuah, A., & Loo, B. (2004). *EXAMINING THE DEFENCE INDUSTRIALIZATION – ECONOMIC GROWTH RELATIONSHIP: THE CASE OF SINGAPORE* (Nomor 70).

<https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/rsis-pubs/WP70.pdf>

Kumparan. (2018). *Tank Harimau Buatan Pindad Dijual Rp 101 Miliar per Unit*.

Kumparan Bisnis. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/tank-harimau-buatan-pindad-dijual-rp-101-miliar-per-unit-1541684838585343836/full>

Kumparan. (2020). *Kian Harmonis: Jokowi Minta Tekan Impor Alat Militer, Prabowo Langsung ke Pindad*. Kumparan Bisnis. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kian-harmonis-jokowi-minta-tekan-impor-alat-militer-prabowo-langsung-ke-pindad-1tnOQblRDf4/full>

Kurç, Ç., & Neuman, S. G. (2017). Defence industries in the 21st century: a comparative analysis. *Defence Studies*, 17(3), 219–227.

<https://doi.org/10.1080/14702436.2017.1350105>

- Kusnandar, V. B. (2019). *Berapa Nilai Ekspor Kendaraan Tempur Indonesia*. Katadata.
- Laksmiana, E. A. (2018). Why Is Southeast Asia Rearming? An Empirical Assessment. In R. Dossani & S. W. Harold (Ed.), *U.S. Policy in Asia -- Perspectives for the Future* (hal. 106–137). RAND Corporation. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3171126>
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in Politics and International Relations*. Sage Publications.
- LEN. (n.d.). *Katalog Produk Pertahanan LEN*. LEN. Diambil 25 November 2020, dari <https://www.len.co.id/teknologi-bisnis/katalog-produkkk201/>
- Liputan6.com. (2019). *8 Strategi Prabowo Perkuat Pertahanan Indonesia Agar Tak Diganggu Asing*. Liputan6 News. <https://www.liputan6.com/news/read/4113985/8-strategi-prabowo-perkuat-pertahanan-indonesia-agar-tak-diganggu-asing>
- Litbang Kompas. (2021). *Publik Setuju Penguatan Alutsista*. Kompas. https://www.kompas.id/baca/riset/2021/05/27/publik-setuju-penguatan-alutsista?status_login=login
- Luerdi, & Marisa, H. (2019). Civil Participation in Military Innovation : Cooperation between the Defense Industry of Indonesia and Turkey 2010-2018 Partisipasi Sipil dalam Inovasi Militer : Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia dan Turki 2010-2018. *Global Strategis*, 13(2), 17–34.
- Lukihardianti, A. (2019). *Pindad Bidik Pasar Asia*. Republika. <https://www.republika.co.id/berita/ppvizf335/pindad-bidik-pasar-asia>
- Mack, A., & Ball, D. (1992). The military build-up in Asia-Pacific. *Pacific Review*, 5(3), 197–208. <https://doi.org/10.1080/09512749208718982>
- Manafe, C., Swastanto, Y., & Pedrason, R. (2020). Indonesia and South Korea Defense Diplomacy: Case Study of Procurement of Changbogo Class Vessels in 2010-2018. *Jurnal Pertahanan*, 6(2), 162–173.
- Manning, R. A., & Cronin, P. M. (2020). *Under Cover of Pandemic, China Steps Up*

- Brinkmanship in South China Sea*. Foreign Policy.
<https://foreignpolicy.com/2020/05/14/south-china-sea-dispute-accelerated-by-coronavirus/#>
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The Tragedy of Great Power Politics*. In W.W. Norton & Company. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Medcom. (2014). *SBY: Alutsista Wajib Diproduksi Sendiri*. Medcom.
<https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/ObznGXeb-sby-alutsista-wajib-diproduksi-sendiri>
- Media Indonesia. (2018). *Industri Pertahanan Mandiri Tunjang Pertahanan Indonesia*. Megapolitan. <https://mediaindonesia.com/megapolitan/196481/industri-pertahanan-mandiri-tunjang-pertahanan-indonesia.html>
- Media Indonesia. (2019). *Panser Anoa PT. Pindad Mulai Mendunia*. Media Indonesia.
- Modelski, G. (1987). Long cycles in world politics. In *International Affairs* (Vol. 64, Nomor 3). The MacMillan Press. <https://doi.org/10.2307/2622861>
- Mohanty, D. R. (2004). Changing Times? India's Defence Industry in the 21 st Century. In *Bone International Center for Conversion*.
https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/paper36.pdf
- Moore, G. J. (2017). Avoiding a Thucydides Trap in Sino-American Relations (...and 7 Reasons Why that Might be Difficult). *Asian Security*, 13(2), 98–115.
<https://doi.org/10.1080/14799855.2017.1286162>
- Moosa, N., Ramiah, V., Pham, H., & Watson, A. (2020). The origin of the US-China trade war. *Applied Economics*, 52(35), 3842–3857.
<https://doi.org/10.1080/00036846.2020.1722797>
- Moravcsik, A. (1991). Arms and Autarky in Modern European. *Searching for Security in a Global Economy*, 120(4), 23–45.
- Muchtiwibowo, R. L., Octavian, A., & Soediro, D. (2019). *Manajemen teknologi pt pal*

- indonesia dalam pembangunan kapal perusak kawal rudal. *Jurnal Industri Pertahanan*, 1(1), 75–94.
- Muradi. (2016). Praktik-praktik defense offset di Indonesia. In *Pustaka Unpad* (Nomor 47).
- Mutakin. (2017). *Menhan Sebut Tank medium Buatan Pindad Cocok di Indonesia*. Medcom.
- Nailufar, N. N. (2020). *Sejarah Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia*. Kompas News. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/06/160000769/sejarah-konfrontasi-indonesia-dengan-malaysia?page=all>
- Neuman, S. G. (1988). Aid and The Superpowers. *Foreign Affairs*, 66(5), 1044–1066.
- Neuman, S. G. (2010). Power, influence, and hierarchy: Defense industries in a unipolar world. *Defence and Peace Economics*, 21(1), 105–134. <https://doi.org/10.1080/10242690903105398>
- Novotny, D. (2010). *Torn between America and China: Elite Perceptions and Indonesian Foreign Policy*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Nupus, H. (2018). *CEO Turkish Aerospace Industries Kunjungi PTDI Pagi Ini*. Anadolu Agency. <https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/ceo-turkish-aerospace-industries-kunjungi-ptdi-pagi-ini/1030950>
- Ott, M. C. (2011). Deep danger: Competing claims in the South China sea. *Current History*, 110(737), 236–241. <https://doi.org/10.1525/curh.2011.110.737.236>
- Pablo, S., & Anggit, I. (2019). *Dikritik Prabowo, Ini Strategi Jokowi di Bidang Alutsista*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190330211809-4-63885/dikritik-prabowo-ini-strategi-jokowi-di-bidang-alutsista>
- Pasandideh, S. (2021). Do China's New Islands allow it to militarily dominate the South China Sea? *Asian Security*, 17(1), 1–24. <https://doi.org/10.1080/14799855.2020.1749598>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *UU No. 16 Tahun 2012 Tentang Industri*

Pertahanan. Dewan Perwakilan Rakyat.

UU No. 19 tahun 2014 Tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia - Turki, Lembaran negara Republik Indonesia (2014).

Pemerintah Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Industri Pertahanan*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri*.

Permana, E. (2019). *Indonesia targetkan produksi 412 medium tank*. Anadolu Agency. <https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/indonesia-targetkan-produksi-412-medium-tank-/1453779>

Permana, E. (2020). *Indonesia dan Turki Kembangkan Jenis Baru Medium Tank*. Anadolu Agency. <https://www.aa.com.tr/id/nasional/indonesia-dan-turki-kembangkan-jenis-baru-medium-tank/1756473>

Prasetyo, T., Armawi, A., & Salim, D. A. (2017). Evaluasi Kinerja KKIP Dalam Kerjasama Republik Indonesia-Korea Selatan Pada Pembangunan Kapal Selam Untuk Mendukung Ketahanan Alutsista TNI Angkatan Laut. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 86–103.

Prawira, A. (2019). *Bertemu Menhan Filipina, Prabowo Tawarkan Medium Tank Produksi PT Pindad*. Sindonews. <https://nasional.sindonews.com/berita/1459876/14/bertemu-menhan-filipina-prabowo-tawarkan-medium-tank-produksi-pt-pindad>

Presiden Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara*.

Peraturan Presiden No. 42, Pub. L. No. 43, 3 (2010).

Prireza, A. (2018). *Komite Industri Pertahanan: Alutsista Kita Belum Ditakuti*. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1058724/komite-industri-pertahanan-alutsista-kita-belum-ditakuti/full&view=ok>

- PT. Len. (2017). *Len-Aselsan Teken Joint Production Radio Militer HF dan V/UHF SDR*. Press Release. <https://www.len.co.id/len-aselsan-teken-joint-production-radio-militer-dan-vuhf-sdr/>
- PT. Len. (2021). *Industri Pertahanan Indonesia Promosikan Produknya di Abu Dhabi*. Release Berita. <https://www.len.co.id/industri-pertahanan-indonesia-promosikan-produknya-di-abu-dhabi/>
- PT. PAL. (n.d.). *Naval Shipbuilding*. PT. PAL. Diambil 25 November 2020, dari <https://pal.co.id/naval-shipbuilding/>
- PT. PAL. (2017). *Inovasi LPD TNI AL Membawa Keharuman Bangsa*. Berita. <https://pal.co.id/2019/12/publikasi/news-berita/inovasi-lpd-tni-al-membawa-keharuman-bangsa/>
- PT. Pindad. (n.d.). *Produk dan Jasa*. Pindad. Diambil 25 November 2020, dari <https://pindad.com/weapon>
- PT. Pindad. (2013). *Pindad Siap Luncurkan Tank SBS (APC)*. Inovasi Baru. <https://www.pindad.com/pindad-siap-luncurkan-tank-sbs>
- PT. Pindad. (2016). *Pindad dan FNSS Luncurkan Desain Medium Tank di Indo Defence 2016*. Press Release. <https://www.pindad.com/pindad-dan-fnss-luncurkan-desain-medium-tank-di-indo-defence-2016>
- PT. Pindad. (2017). *Medium Tank Diperkenalkan Pada HUT TNI Ke-72*. Press Release. <https://www.pindad.com/medium-tank-diperkenalkan-pada-hut-tni-ke72>
- PT. Pindad. (2018). *Firing Test Medium Tank Pindad*. Siaran Pers. <https://pindad.com/firing-test-medium-tank-pindad>
- PT. Pindad. (2019a). *Penyerahan dan Penandatanganan Sertifikat Tipe Medium Battle Tank Harimau*. Berita. <https://www.pindad.com/penyerahan-dan-penandatanganan-sertifikat-tipe-medium-tank-harimau>
- PT. Pindad. (2019b). *SAMBUT KSAD BANGLADESH, DIRTEKBANG PINDAD*

- PAMERKAN MEDIUM TANK*. Siaran Pers. <https://www.pindad.com/sambut-ksad-bangladesh-dirtekbang-pindad-pamerkan-medium-tank>
- Putra, E. P. (2020). *Beberapa Industri Pertahanan akan Disatukan dalam Holding*. Berita Nasional Republika. <https://www.republika.co.id/berita/qfo4e1484/beberapa-industri-pertahanan-akan-disatukan-dalam-holding>
- Putra, Y. M. P. (2013). *RI - Turki Akan Kerjasama Bangun Tank*. Republika. <https://nasional.republika.co.id/berita/mmu54g/riturki-akan-kerja-sama-bangun-tank>
- Qusnulyakin, F. (2015). *SBY Harap Jokowi Lanjutkan Modernisasi TNI*. Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/nasional/312054/sby-harap-jokowi-lanjutkan-modernisasi-tni>
- Rachmat, A. N. (2014). Tantangan dan Peluang Perkembangan Teknologi Pertahanan Global Bagi Pembangunan Kekuatan Pertahanan Indonesia. *Jurnal Transformasi Global*, 1(2), 199–212.
- Ramadhan, D. I. (2018). *Tank Medium Buatan Pindad Kebal Kena Ledakan TNT*. Detiknews.
- Ramalan, S. (2021). *Holding BUMN Pertahanan: Belum Dikokang, Sudah Pasang Target Muluk*. Sindonews. <https://ekbis.sindonews.com/read/356238/34/holding-bumn-pertahanan-belum-dikokang-sudah-pasang-target-muluk-1615010597>
- Rauhecker, D. C. (1992). *The Critical Impact of Strategic Mobilitu on National Security*.
- Raymond, G. V. (2017). Naval modernization in Southeast Asia: Under the shadow of army dominance? *Contemporary Southeast Asia*, 39(1), 149–177. <https://doi.org/10.1355/cs39-1e>
- Ringsmose, J. (2012). *Investing in fighters and alliances: Norway, Denmark, and the bumpy road to the joint strike fighter*. 68(1), 93–110.
- Romaniuk, S. N., & Burgers, T. (2019). *China's Next Phase of Militarization in the South China Sea*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2019/03/chinas-next-phase-of->

militarization-in-the-south-china-sea/

- Rosh, R. M. (1990). Third World Arms Production and the Evolving Interstate System. *Journal of Conflict Resolution*, 34(1), 57–73.
- RSIS Indonesia Programme. (2013). Indonesia's Emerging Defence Economy: The Defence Industry Law and Its Implications. *RSIS Policy Report*, 53, 1–11.
- Ruland, J. (2020). Asean as an Actor in the United Nations: How Cohesive Is It? In K. E. Smith & K. V. Laatikainen (Ed.), *Group Politics in UN Multilateralism* (hal. 115–134). Brill Nijhoff.
- Salsabiela, B. F. (2016). ANALISIS AKUISISI TEKNOLOGI INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA : STUDI KASUS PENGEMBANGAN PESAWAT TEMPUR KOREAN FIGHTER XPERIMENT / INDONESIAN FIGHTER XPERIMENT (KFX / IFX) ANALYSIS OF TECHNOLOGY ACQUISITIONS OF INDONESIAN DEFENSE INDUSTRY : A CASE STUDY OF. *Jurnal Pertahanan*, 6(2), 51–74.
- Sandi, F. (2020). *Hanya di ASEAN, Kapal Selam Made in RI Sukses Uji Selam 310 M*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200306063847-4-142867/hanya-di-asean-kapal-selam-made-in-ri-sukses-uji-selam-310-m>
- Sandi, F. (2021). *RI Tinggalkan Sukhoi Beralih ke F-15 & Rafale, Ini Alasannya?* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210224183544-4-225947/ri-tinggalkan-sukhoi-beralih-ke-f-15-rafale-ini-alasannya>
- Santosa, I. (2017). *Pasang Surut Menuju Armada Kelas Dunia*. Kompas. https://arsip-interaktif.kompas.id/armada_tni_al
- Saputri, D. S. (2020). *Jokowi Singgung Pembentukan Kogabwilhan Perkuat TNI*. Republika. <https://www.republika.co.id/berita/qhpoug484/jokowi-singgung-pembentukan-kogabwilhan-perkuat-tni>
- Savitri, C. M. (2016). Contribution of Offset to Defence Industrialisation in Indonesia. In

Cranfield Defence and Security (Nomor May).

Sekolah Staf Komando Angkatan Darat. (2012). *Modernisasi Alutsista TNI AD Dalam Tinjauan Tantangan Tugas Kedepan*.

SESKOAD. (2020). Tantangan TNI Angkatan Darat. *Buletin Virajati: Media Komunikasi Online Seskoad*, 1–61.

Siddiq, T. (2018). *Mengenal Harimau Tank Medium Terbaru Indonesia*. Tempo.

Simbolon, H. (2017). *Menhan: Tank Medium Paling Tepat untuk Indonesia*. Liputan6 News. <https://www.liputan6.com/news/read/3099128/menhan-tank-medium-paling-tepat-untuk-indonesia>

Sindonews.com. (2017). *Diaspora IPTN Anak Rantau Yang Dihargai Mahal*. Sindo Weekly. <https://nasional.sindonews.com/berita/1258492/15/diaspora-iptn-anak-rantau-yang-dihargai-mahal>

SIPRI. (2012). *EU arms embargo on Indonesia*. SIPRI Database: Arms Embargoes. https://www.sipri.org/databases/embargoes/eu_arms_embargoes/indonesia

Sjamsoeddin, S. (2021). *Tekad dan Militansi Membangkitkan Industri Pertahanan Dalam Negeri*. Detiknews. <https://news.detik.com/kolom/d-5563391/tekad-dan-militansi-membangkitkan-industri-pertahanan-dalam-negeri>

Sloan, E. C. (2002). The Revolution in Military Affairs: Implications for Canada and NATO. In *The Foreign Policy, Security and Strategic Studies*. McGill-Queen's University Press. <https://doi.org/10.4324/9781315753614-2>

Soursa, O. P. (2020). *China's Artificial Islands in South China Sea: Extended Forward Presence* (Nomor 042-March 2020). <https://southfront.org/chinas-artificial-islands-south-china-sea-review/>

Stefanie, C. (2016). *Presiden: Utamakan Penggunaan Alutsista Produk Dalam Negeri*. CNN Indonesia.

Supandi, A. (2015). *Pembangunan Kekuatan TNI AL Dalam Rangka Mendukung Visi*

- Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Pertahanan*, 5(2), 1–24.
- Supriyanto, A. (2005). *Kesiapan Pesawat Tempur Hanya 40 Persen*. Tempo.
<https://koran.tempo.co/read/nasional/43700/kesiapan-pesawat-tempur-hanya-40-persen?read=true>
- Suryowati, E. (2014). *Pesawat-Pesawat Ini Telah Diproduksi PT DI*. Kompas.).
- Susanti, R. (2018). *Pindad Sebut Krisis Turki Tak Pengaruhi Proyek Medium Tank*. Kompas. <https://amp.kompas.com/yogyakarta/read/2018/08/16/154600026/pindad-sebut-krisis-turki-tak-pengaruhi-proyek-medium-tank>
- Syafputri, E. (2011). *Kesiapan Alutsista TNI Tak Sampai 50 Persen*. Antara News.
<https://www.antaranews.com/berita/261155/kesiapan-alutsista-tni-tak-sampai-50-persen#mobile-src>
- Syailendra, E. A. (2017). A nonbalancing act: Explaining Indonesia’s failure to balance against the Chinese threat. *Asian Security*, 13(3), 237–255.
<https://doi.org/10.1080/14799855.2017.1365489>
- Tai, T., Chong, L., & Li, X. (2019). Understanding the China – US trade war : causes , economic impact , and the worst-case scenario. *Economic and Political Studies*, 7(2), 185–202. <https://doi.org/10.1080/20954816.2019.1595328>
- Tempo.co. (2014). *Hasil Modifikasi Tank AMX-13 Unjuk Gigi di HUT TNI*. Tempo.
<https://nasional.tempo.co/read/612779/hasil-modifikasi-tank-amx-13-unjuk-gigi-di-hut-tni/full&view=ok>
- Tempo.co. (2015). *Anggaran Pertahanan Indonesia Harusnya 700 Triliun*. Tempo.
<https://nasional.tempo.co/read/680789/anggaran-pertahanan-indonesia-seharusnya-rp-700-triliun/full&view=ok>
- Tempo.co. (2017a). *Pemerintah Jajaki Pemesanan Medium Tank Terbaru Pindad*. Tempo Bisnis. <https://bisnis.tempo.co/read/900260/pemerintah-jajaki-pemesanan-medium-tank-terbaru-pindad/full&view=ok>

- Tempo.co. (2017b). *TNI AL Terkuat di Zaman Soekarno*. Tempo.
<https://nasional.tempo.co/read/628140/tni-al-terkuat-di-asia-di-masa-sukarno/full&view=ok>
- Tim Kampanye Nasional Jokowi -Ma'ruf Amin. (2018). *Meneruskan Jalan Perubahan Untuk Indonesia Maju: Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*.
- Trisni, S., Apriwan, A., & Irawan, P. (2016). Strategi Indonesia dalam Merespon Kebangkitan Tiongkok pada Masa Kepemimpinan Presiden SBY (Studi Kasus: Konflik Laut Tiongkok Selatan). *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 5(2), 129–150. <https://doi.org/10.25077/ajis.5.2.129-150.2016>
- Tyroler-Cooper, S., & Peet, A. (2011). The Chinese aviation industry: Techno-hybrid patterns of development in the C919 program. *Journal of Strategic Studies*, 34(3), 383–404. <https://doi.org/10.1080/01402390.2011.574981>
- United States Government. (2017). *National Security Strategy of the United States of America*.
- United States Government. (2018). *National Defense Strategy*.
- UNROCA. (n.d.). *Categories of Major Conventional Arms*. UNROCA.
<https://www.unroca.org/categories>
- US Department of Defense. (2019). *2019 China Military Power Report*.
- Ventura, B. (2016). *Indonesia-Turki Kembangkan Medium Tank Senilai USD 30 Juta*. Sindonews. <https://ekbis.sindonews.com/berita/1106473/34/indonesia-turki-kembangkan-tank-medium-senilai-usd30-juta>
- Viva. (2013). *Indonesia dan Turki Akan Bangun Tank Bersama*. Viva News.
https://www.viva.co.id/berita/dunia/454889-indonesia-dan-turki-akan-buat-tank-bersama?page=all&utm_medium=all-page
- Waltz, K. (2001). Man, the State, and War. In *Man, the State, and War* (3 ed.). Columbia

- University Press. <https://doi.org/10.7312/walt18804>
- Weimar, N. D. (2013). Sino-Indian power preponderance in maritime Asia: A (re-)source of conflict in the Indian Ocean and South China sea. *Global Change, Peace and Security*, 25(1), 5–26. <https://doi.org/10.1080/14781158.2013.761192>
- Wenas Inkiriwang, F. (2020). ‘Garuda shield’ vs ‘sharp knife’: operationalising Indonesia’s defence diplomacy. *Pacific Review*, 0(0), 1–30. <https://doi.org/10.1080/09512748.2020.1772352>
- Wezeman, P. D., Fleurant, A., Kuimova, A., Tian, N., Wezeman, S. T., & The. (2019). *Trends in international Arms Transfer* (Nomor March). <https://doi.org/10.1016/b978-0-08-101276-5.00003-x>
- Wezeman, S. T. (2019). *Arms Flows to South East Asia*.
- Widjajanto, A., Prasetyono, E., & Keliat, M. (2012). *Dinamika Persenjataan dan Revitalisasi Industri Pertahanan*. UI Press.
- Willett, S. (1997). East asia’s changing defence industry. *Survival*, 39(3), 107–134. <https://doi.org/10.1080/00396339708442929>
- Willie, J. F., & Delisanti, N. J. (1992). *THE U.S. STRATEGIC MOBILITY POSTURE -- A CRITICAL FACTOR TO SUPPORT NATIONAL SECURITY OBJECTIVES*.
- Wulandari, A. (2017). Kepentingan Indonesia Bekerjasama Dengan Turki Dalam Industri Pertahanan (Studi Kasus: Pembuatan Tank Medium). *JOM FISIP*, 4(2), 1–12.
- Yahuda, M. (2013). China’s new assertiveness in the South China Sea. *Journal of Contemporary China*, 22(81), 446–459. <https://doi.org/10.1080/10670564.2012.748964>
- Yuniar, R. W. (2021). *Indonesia flags unease over Beijing’s South China Sea actions in comments from maritime security chief, army staff college*. South China Morning Post. <https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3120780/indonesia-flags-unease-over-beijings-south-china-sea-actions>

Zagare, F. C., & Kilgour, D. M. (2000). *Perfect Deterrence*. Cambridge University Press.

LAMPIRAN

Notulensi Wawancara I

Informan 1

Tanggal Wawancara : 6 Juni 2021

Tempat : Zoom Meeting

Informasi Informan 1

Nama : Iis Gindarsah, M.Sc

Profil: : Analis Utama Politik Keamanan Laboratorium Indonesia 2045

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat Mas Gigin terkait dengan keputusan Indonesia melakukan pengembangan *medium battle tank* Harimau? Apakah keputusan tersebut didasarkan keinginan Indonesia meningkatkan *prestige* maupun *status*?
2. Apakah menurut Mas Gigin pengembangan *medium battle tank* Harimau akan mampu meningkatkan kapabilitas militer Indonesia, khususnya TNI AD di masa yang akan datang?
3. Bagaimana dampak keberhasilan pengembangan *medium battle tank* Harimau terhadap *prestige* dan *status* Indonesia, terutama di kawasan Asia Tenggara?

LAMPIRAN

Notulensi Wawancara II

Informan 2

Tanggal Wawancara : 14 Juni 2021

Tempat : Gedung Widyaishwara, Lembaga Ketahanan Nasional

Informasi Informan 2

Nama : Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si

Profil: : Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2018 – 2020 dan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Daftar Pertanyaan

1. Menurut Prof. Bondan, Mengapa dalam beberapa waktu terakhir Pemerintah Indonesia gencar melakukan kerjasama internasional di bidang industri pertahanan, yang salah satunya adalah pengembangan *medium battle tank* Harimau?
2. Apakah dapat diartikan pengembangan *medium battle tank* Harimau ini juga dipengaruhi oleh keberhasilan PT. Pindad sebelumnya yang sudah mampu memproduksi Panser Anoa, Prof?
3. Pertanyaan berikutnya Prof, sebelumnya Prof. Bondan sudah menyebutkan terkait *multiplier effect* pengembangan industri pertahanan terhadap ekonomi, apakah dalam konteks *medium battle tank* Harimau Pemerintah Indonesia mengharapkan terjadinya *spin-off* teknologi?
4. Pertanyaan berikutnya Prof, terkait pengembangan *medium battle tank* Harimau. Apakah ini juga menjadi salah satu bukti bahwa Sumber Daya Manusia Indonesia pada dasarnya

berkualitas. Menurut Prof. Bondan, apakah itu juga menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki keunggulan teknologi jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara? Karena disaat negara lain belum mampu memproduksi *battle tank*, kita sudah mampu memproduksinya?

5. Terkait dengan MoU dengan Filipina, MoU tersebut memang untuk pembelian *medium battle tank* Harimau?
6. Terkait penjelasan Prof. Bondan sebelumnya, berarti dapat dikatakan ada kerjasama antara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan dengan Industri Pertahanan nasional untuk membantu pemasaran produk?
7. KKIP telah merancang dan menetapkan rencana induk atau *masterplan* pengembangan Industri Pertahanan yang memiliki kesinambungan dengan program KPM. Dalam rencana induk tersebut, KKIP memiliki target kemandirian industri pertahanan pada tahun 2029. Menurut Prof. Bondan, sejauh apakah signfikansi pengembangan *medium battle tank* Harimau untuk memenuhi target tersebut? Apakah memang sudah disiapkan rencana pengembangan lanjutan dari *medium battle tank* Harimau ini?
8. Menurut Prof. Bondan, keberhasilan pengembangan *medium battle tank* Harimau ini juga menjadi pemenuhan janji Presiden Joko Widodo yang sejak awal memiliki keinginan Indonesia harus mandiri, termasuk di bidang pertahanan dan menunjukkan *political will* yang kuat?

LAMPIRAN

Notulensi Wawancara III

Informan 3

Tanggal Wawancara : 17 Juni 2021

Tempat : Laboratorium Indonesia 2045

Informasi Informan 3

Nama : Andi Widjajanto, Ph.D

Profil: : Analis Utama Politik Keamanan Laboratorium Indonesia 2045 dan
Penasihat Kantor Staff Presiden Republik Indonesia

Daftar Pertanyaan

1. Menurut Mas Andi, apa yang sesungguhnya menjadi alasan Indonesia melakukan pengembangan industri pertahanan? Apakah terkait dengan sejarah Indonesia sebagai korban embargo senjata sehingga Indonesia tidak lagi ingin berada dibawah pengaruh negara produsen senjata?
2. Menurut Mas Andi, mengapa Indonesia melakukan pengembangan *medium battle tank* Harimau meskipun tidak sesuai dengan logika pengembangan industri pertahanan sebagaimana tertulis dalam buku Mas Andi bersama Mas Edi dan Pak Makmur serta ketidaksesuaian dengan persepsi ancaman Indonesia yang ada di Buku Putih Pertahanan Indonesia?
3. Menurut Mas Andi, apakah ada keterkaitan dengan keberhasilan atau kapasitas teknologi industri pertahanan nasional yang sudah ada sebelumnya?
4. Menurut Mas Andi, apakah keputusan pengembangan *medium battle tank* Harimau juga dipengaruhi kesadaran pemerintah bahwasanya *main battle tank* Leopard 2 yang sudah

dimiliki TNI tidak bisa digelar secara optimal karena kondisi geografis dan infrastuktur?

5. Menurut Mas Andi dengan kondisi lingkungan strategis eksternal Indonesia saat ini yang diwarnai dengan peningkatan asertifitas China di Laut China Selatan serta dinamika persenjataan Asia Tenggara disaat masih terdapat sengketa perbatasan darat dengan negara tetangga, apakah juga menjadi pertimbangan pemerintah memilih melakukan pengembangan *medium battle tank* Harimau?
6. Apakah pengembangan *medium battle tank* Harimau akan memberikan dampak positif terutama terkait dengan kebijakan Presiden Jokowi untuk membangun organisasi TNI, salah satunya adalah pembentukan Kogabwilhan dan juga Divisi III Kostrad yang tentunya akan membutuhkan tambahan kekuatan tank atau kavaleri?

LAMPIRAN**Notulensi Wawancara IV****Informan 4**

Tanggal Wawancara : 25 Juni 2021

Tempat : Zoom Meeting

Informasi Informan 4

Nama : Dimas Aryo Pratomo

Profil: : Assistant Manager Pemasaran Hankam PT. Pindad

Daftar Pertanyaan

1. Apakah pengembangan *medium battle tank* Harimau dipengaruhi oleh keberhasilan PT. Pindad dalam mengembangkan Panzer Anoa?
2. Bagaimana PT. Pindad memandang potensi ekspor *medium battle tank* Harimau? Apakah memang diharapkan menyamai keberhasilan Panzer Anoa?
3. Apakah dalam proses pengembangan *medium battle tank* Harimau juga terjadi *spin-off* teknologi?

LAMPIRAN

Notulensi Wawancara V

Informan 5

Tanggal Wawancara : 25 Juni 2021

Tempat : Zoom Meeting

Informasi Informan 5

Nama : Mayor Kav. Adzan Marjohan Nasution, SH. MH.

Profil: : Kasilitbangmatsus dan Kudmil Pussenkav Kodiklat AD

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana pandangan TNI AD terhadap keberhasilan PT. Pindad mengembangkan *medium battle tank* Harimau?
2. Apakah TNI AD meyakini *medium battle tank* Harimau akan mampu memenuhi kebutuhan TNI AD dan meningkatkan kapabilitasnya?